TABALONG

SARABAKAWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 - 2024





Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si
(BUPATI TABALONG)



Drs. H. MAWARDI, M.Si
(WAKIL BUPATI TABALONG)

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2019

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 – 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

15. Program pembangunan daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SKPD dalam melaksanakan program RPJMD dituangkan lebih lanjut dalam rencana strategis SKPD dan dijabarkan dalam rencana Kerja SKPD.

Pasal 4

(1) Sistematika Dokumen RPJMD disusun sebagai berikut:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
   d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
   e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
   g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   i. Bab IX : Penutup.

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4,65 /2019)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika Penulisan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakterisitik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana II-8
2.1.3 Demografi II-9
2.1.4 Potensi Sumber Daya II-12
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-13
2.2.1 Pertumbuhan PDRB II-13
2.2.2 Laju Inflasi II-22
2.2.3 PDRB Per kapita II-24
2.2.4 Indeks Gini II-25
2.2.5 Pemerataan Pencapatan Versi Bank Dunia II-26
2.2.6 Indeks Ketimpangan Williamson II-27
2.2.7 Persentase Penduduk Miskin II-30
2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia II-32
2.2.9 Angka Melek Huruf II-34
2.2.10 Angka Rata-rata Lama Sekolah II-35
2.2.11 Angka Harapan Lama Sekolah II-36

2.2.12 Angka Harapan Hidup II-37
2.2.13 Persentase Balita Gizi Buruk II-39
2.2.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-40
2.2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka II-42
2.2.16 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah II-43
2.2.17 Kontribusi Sektor Tanaman Pertanian .. II-44
2.2.18 Kontribusi Sektor Pertambangan II-46
2.2.19 Kontribusi Sektor Perdagangan II-47
2.2.20 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan . II-48
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-48
2.3.1 Layanan Urusan Wajib II-48
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan II-136
2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-153
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-161

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja pelaksanaan APBD III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-12
3.2 Kebijakanan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-16
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-21
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-26
3.3 Kerangka Pendanaan III-31
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-31
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan III-36

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Permasalahan Kesejahteraan ..... Masyarakat IV-2
4.1.2 Permasalahan Pelayanan Umum IV-3
4.1.3 Permasalahan Penunjang Pelayanan Umum..... IV-11
4.2 Isu Strategis..... IV-13
4.2.1 Telaahan Isu Strategis Internasional IV-14
4.2.2 Telaahan Isu Strategis Nasional IV-16
4.2.3 Telaahan Isu Strategis Provinsi IV-18
4.2.4 Telaahan Isu Strategis Kabupaten Tabalong IV-21
4.2.5 Telaahan RPJMD Daerah Lainnya IV-29
4.2.6 Isu Strategis Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tabalong..... IV-31

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi V-1
5.2 Misi..... V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran..... V-3
5.4 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2019-2024..... V-10

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VI-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VIII-1

BAB IX PENUTUP

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1
9.2 Pedoman Transisi IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018.	II-1
Tabel 2.2	Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Tabalong	II-8
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2017.....	II-9
Tabel 2.4	Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-10
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017.....	II-10
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tabalong Tahun 2017.....	II-11
Tabel 2.7	Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong	II-12
Tabel 2.8	PDRB menurut Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah) ..	II-16
Tabel 2.9	PDRB menurut Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)...	II-18
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-21
Tabel 2.11	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong.....	II-23
Tabel 2.12	PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-24
Tabel 2.13	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2017.....	II-27
Tabel 2.14	Ketimpangan Wilayah Berdasarkan Indeks Williamson	II-28

Tabel 2.15	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-31
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-34
Tabel 2.17	Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2013-2017.....	II-34
Tabel 2.18	Persentase Balita Dengan Gizi Kurang dan Buruk Di Kabupaten Tabalong Menurut BB/U Tahun 2013 – 2017	II-39
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013 – 2017	II-40
Tabel 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-42
Tabel 2.21	Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.22	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017.....	II-46
Tabel 2.23	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017	II-47
Tabel 2.24	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017	II-47
Tabel 2.25	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017.....	II-49
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017.....	II-50
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017.....	II-50
Tabel 2.29	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-51

Tabel 2.30	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017	II-52
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017	II-52
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Sekolah Dasar Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-53
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tabalong 2013-2017	II-54
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tabalong 2013-2017.....	II-54
Tabel 2.36	Angka Kelulusan (AL) Sekolah SD/MI Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-55
Tabel 2.37	Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMP/MTs Di Kabupaten Tabalong 2013-2017.....	II-56
Tabel 2.38	Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMA/SMK Di Kabupaten Tabalong 2013-2017.....	II-56
Tabel 2.39	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar Di Kabupaten Tabalong 2013-2017.....	II-57
Tabel 2.40	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tabalong 2013-2017.....	II-57
Tabel 2.41	Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tabalong 2013-2017.....	II-58
Tabel 2.42	Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Dasar Di Kabupaten Tabalong 2013-2017	II-59
Tabel 2.43	Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tabalong 2013-2017.....	II-60

Tabel 2.44	Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/ SMK) Di Kabupaten Tabalong 2013-2017	II-61
Tabel 2.45	Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SD/MI Di Kabupaten Tabalong 2013-2017	II-62
Tabel 2.46	Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMP/MTs Di Kabupaten Tabalong 2013-2017	II-62
Tabel 2.47	Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMA/SMK /MA Di Kabupaten Tabalong 2013-2017	II-63
Tabel 2.48	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017	II-64
Tabel 2.49	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-65
Tabel 2.50	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2017	II-65
Tabel 2.51	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2013- 2017 Kabupaten Tabalong	II-66
Tabel 2.52	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2017	II-67
Tabel 2.53	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-68
Tabel 2.54	Jumlah Dokter Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-68
Tabel 2.55	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Tabalong	II-69
Tabel 2.56	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-70
Tabel 2.57	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-71

Tabel 2.58	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.59	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-72
Tabel 2.60	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-72
Tabel 2.61	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-73
Tabel 2.62	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.63	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.....	II-74
Tabel 2.64	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.65	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-77
Tabel 2.66	Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.67	Panjang jaringan irigasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-80
Tabel 2.68	Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.69	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-82

Tabel 2.70	Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.71	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.72	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.73	Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.74	Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong Tahun 2017	II-87
Tabel 2.75	Rasio Jumlah Linmas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.76	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.77	Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 2.78	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017	II-93
Tabel 2.79	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-95
Tabel 2.80	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.81	Rasio Lulusan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017	II-97
Tabel 2.82	Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS) Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017	II-98
Tabel 2.83	Rasio KDRT di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017	II-99

Tabel 2.84	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-100
Tabel 2.85	IDG, IPG dan Status Kota Layak Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-102
Tabel 2.86	Perkembangan Indikator Pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-103
Tabel 2.87	Perkembangan Indikator Pertanahan Tahun 2013-2017	II-104
Tabel 2.88	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-106
Tabel 2.89	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2013-2017 di Kabupaten Tabalong	II-106
Tabel 2.90	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2017	II-107
Tabel 2.91	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2013-2017 di Kabupaten Tabalong	II-108
Tabel 2.92	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-108
Tabel 2.93	Status mutu sungai di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 menurut metode Indeks Pencemaran (IP)	II-109
Tabel 2.94	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)	II-110
Tabel 2.95	Klasifikasi Indeks Kualitas Air	II-111
Tabel 2.96	Status Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-112
Tabel 2.97	Status Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-113

Tabel 2.98 Status Kepemilikan Akte Nikah di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-113
Tabel 2.99 Ketersediaan Database di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-114
Tabel 2.100 Status Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-115
Tabel 2.101 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-116
Tabel 2.102 Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-117
Tabel 2.103 Jumlah LSM Yang Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-117
Tabel 2.104 Jumlah PKK Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-118
Tabel 2.105 Cakupan Peserta KB Aktf di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-119
Tabel 2.106 Pelayanan Angkutan Umum Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-120
Tabel 2.107 Jumlah Penduduk Menggunakan Handphone Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-122
Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-122
Tabel 2.109 Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017 ..... I-124
Tabel 2.110 Jumlah Investor Berskala Nasional Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-125
Tabel 2.111 umlah Nilai Investasi Berskala Nasional Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-126
Tabel 2.112 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN Dan PMA Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 II-127

Tabel 2.113 Perkembangan Organisasi Olah Raga Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017 ..... II-129
Tabel 2.114 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-130
Tabel 2.115 Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-131
Tabel 2.116 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-131
Tabel 2.117 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-132
Tabel 2.118 Jumlah Perpustakaan Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong II-133
Tabel 2.119 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-134
Tabel 2.120 Jumlah SKPD yang telah dilakukan Penataan Arsip Dinamis Tahun 2013-2017 ..... II-136
Tabel 2.121 Perkembangan Sektor Perikanan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017 ..... II-137
Tabel 2.122 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Tahun 2013-2017 ..... II-140
Tabel 2.123 Peranan Pertanian terhadap PDRB Tahun 2013 – 2017 ..... II-141
Tabel 2.124 Perkembangan Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya PerHektar Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017 ..... II-142
Tabel 2.125 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2013 – 2017 ..... II-145
Tabel 2.126 Produksi dan Produktivitas Peternakan Tahun 2013 – 2017 ..... II-146

Tabel 2.127 Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Tabalong (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009) II-147
Tabel 2.128 Luas dan Sebaran Lahan Kritis Di Kabupaten Tabalong Tahun 2012 – 2016 ..... II-148
Tabel 2.129 Perkembangan Penerbitan SIUP Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017 ..... II-149
Tabel 2.130 Perkembangan Penerbitan TDP Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017 ..... II-150
Tabel 2.131 Jumlah Unit Usaha Menurut Kelompok Industri Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017 ..... II-151
Tabel 2.132 Pendataan Industri Kecil, Menengah, dan Besar Kabupaten Tabalong II-151
Tabel 2.133 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-155
Tabel 2.134 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-156
Tabel 2.135 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-157
Tabel 2.136 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-158
Tabel 2.137 Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-159
Tabel 2.138 Nilai SAKIP dan Nilai LPPD Pemda Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-160
Tabel 2.139 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 ..... II-162

Tabel 2.140	Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-163
Tabel 2.141	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong	II-164
Tabel 2.142	Produktivitas per Sektor di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	II-166
Tabel 2.143	Angka Kriminalitas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017	II-167
Tabel 2.144	Kasus kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Tabalong	II-168
Tabel 2.145	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017	II-169
Tabel 2.146	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong	II-171
Tabel 3.1	Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tabalong	III-4
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 .	III-7
Tabel 3.4	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran DaerahKabupaten Tabalong Tahun 2016-2017	III- 8
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	III-10
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	III-13
Tabel 3.7	Analisis Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	III-16
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	III-22

Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	III-24
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2017 ..	III-25
Tabel 3.11	Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	III-27
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017	III-28
Tabel 3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2013-2017	III-30
Tabel 3.14	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019-2024	III-33
Tabel 3.15	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 .	III-36
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024	III-38
Tabel 3.17	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong	III-41
Tabel 3.18	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.....	III-43
Tabel 4.1	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	IV-29
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2019-2024	V-6
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-2

Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024	VI-7
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Tabalong	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024	VII-3
Tabel 7.3	Program Penanggungjawab Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2024.....	VII-53
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024	VIII-4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Tabalong.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Administrasi dan Topografi	II-4
Gambar 2.3	Peta Jenis Tanah dan Geologi.....	II-5
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017	II-22
Gambar 2.5	Indeks Gini Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017	II-25
Gambar 2.6	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017	II-32
Gambar 2.7	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017.....	II-33
Gambar 2.8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017	II-35
Gambar 2.9	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017	II-37
Gambar 2.10	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017.....	II-38
Gambar 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2017	II-43

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Tabalong telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bersama beberapa daerah lainnya pada Tahun 2018. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 telah dilaksanakan pelantikan Bupati Drs. H. Anang Syakhfiani M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. Mawardi, M.Si oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan telah disampaikan pula visi misi Bupati dan Wakil

Bupati pada masa jabatan 2019-2024 pada tanggal 19 Maret 2019. Sebelum disampaikan pada rapat paripurna DPRD ke-4 masa sidang I tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 dalam rangka penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, telah dilakukan konsultasi publik dan telah mendapat masukan dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta stakeholder lainnya pada tanggal 27 Maret 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa janji yang disampaikan oleh Bupati terpilih sewaktu kampanye dituangkan kedalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik merupakan salah satu dari 4 (empat) pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi pada proses. Adapun pendekatan lainnya adalah pendekatan partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu

dengan lainnya. Adapun pendekatan lainnya adalah pendekatan integratif, dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2019-2024 ini juga disusun dengan menganalisa beberapa hal penting yang menggambarkan pencapaian pembangunan beberapa tahun terakhir, sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Bertolak dari gambaran capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, dapat diketahui permasalahan pembangunan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu/kebijakan yang berkembang di lingkup internasional, nasional, provinsi dan Kabupaten Tabalong akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang akan datang.

Mengingat pentingnya dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan sekaligus instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, maka dipandang perlu untuk melakukan penyiapan data dan informasi pembangunan dan keuangan beberapa tahun terakhir yang akan menjadi dasar dalam perumusan rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong periode 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tabalong berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014–2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong; dan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Tabalong dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap/periode III dan IV RPJPD Kabupaten Tabalong 2006-2025. Secara lebih detail telaahan arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap/periode III dan IV disajikan pada Bab IV.

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan Penetapan Perda RPJMD, maka dokumen RPJMD akan menjadi pedoman bagi penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD tahunannya. Dalam pelaksanaannya di

tahunan, RKPD menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Tabalong dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kabupaten Tabalong bersama kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan harus membangun sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong antara lain memperhatikan RPJMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang

pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW dan KLHS

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014–2034. Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Dokumen lain yang perlu ditelaah dalam penyusunan RPJMD, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar fokus dan mampu menyiapkan parameter perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan;
2. Menyiapkan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong;
3. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyiapan Renstra;

4. Menjadi dokumen pembentukan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalong; dan
5. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Tabalong 2014-2018.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Tabalong.
5. Menjabarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang fokus dan terukur.
6. Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan.
7. Merumuskan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah untuk pembangunan lima tahun yang akan datang.
8. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sebagai bentuk komitmen kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Bab III Gambaran Keuangan Daerah
- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran
- 5.4 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2019-2024

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Tabalong berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) adalah ± 3.946 Km² atau ± 394.600 Ha. Namun setelah dilakukan penataan batas dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, luas wilayah Kabupaten Tabalong menjadi ± 3.646,52 Km² atau ± 364.652 Ha, yang terdiri dari 12 kecamatan, 121 desa, dan 10 kelurahan.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018

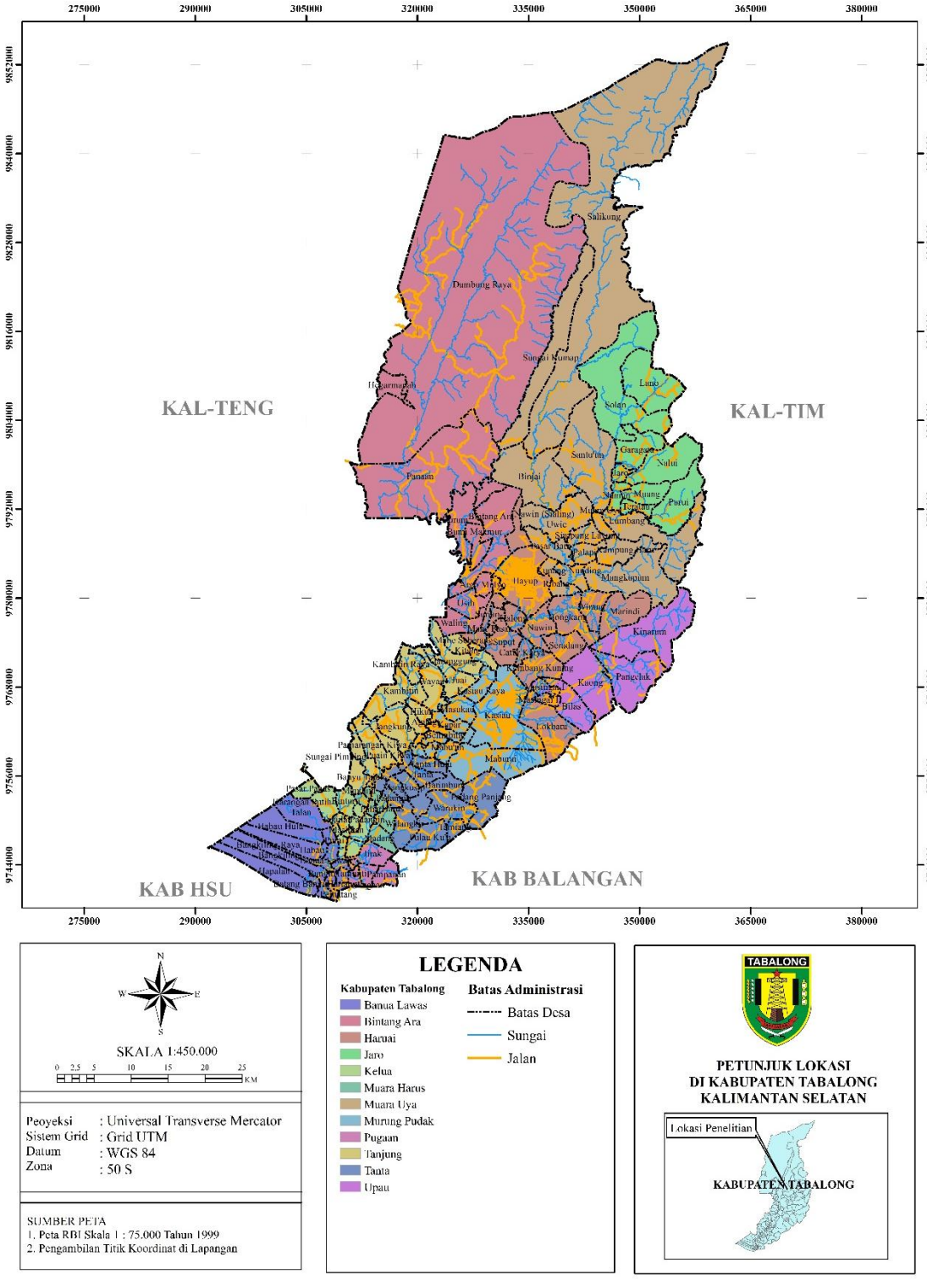
No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase thd luas kabupaten (%)	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1	Banua Lawas	16.596	4,56	-	15
2	Pugaan	3.572	0,98	-	7
3	Kelua	4.924	1,35	1	11
4	Muara Harus	2.895	0,79	-	7
5	Tanta	13.085	3,59	-	14
6	Tanjung	22.606	6,20	4	11
7	Murung Pudak	20.481	5,62	5	5
8	Haruai	31.948	8,76	-	13
9	Bintang Ara	34.210	9,38	-	9
10	Upau	15.519	4,26	-	6
11	Muara Uya	173.792	47,66	-	14
12	Jaro	25.024	6,86	-	9
	Jumlah	**364.652**	**100**	**10**	**121**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

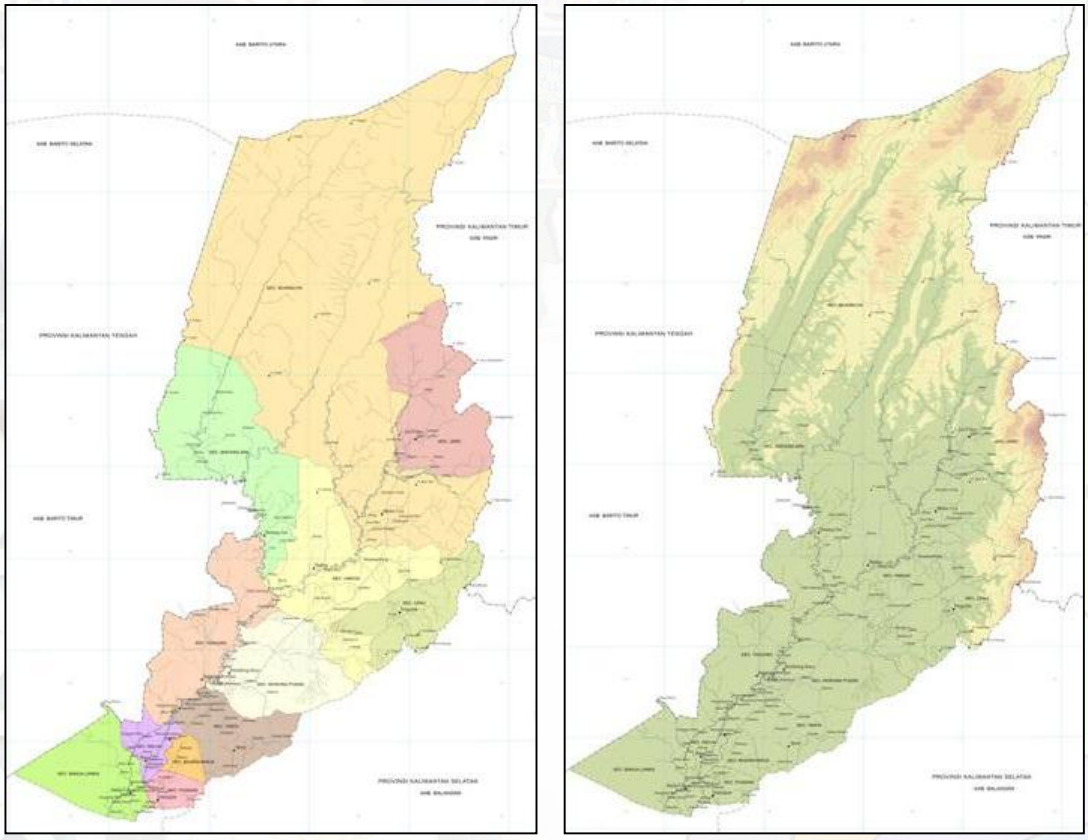
Kabupaten Tabalong secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.


KAL-TENG
KAL-TIM
KAB HSU
KAB BALANGAN
Salikung
Dumbung Raya
Sungai Kurnap
Haruai
Lano
Solan
Garagas
Sulu Un
Nuhi
Panatin
Binjai
Jaro
Muara Uya
Purui
Lumbang
Hayup
Ujah
Waling
Nawin
Marindi
Kinarum
Pangelak
Kaong
Kambitin
Kelaru Raya
Kasiau
Lokbarat
Maburai
Wirang Panjang
Warukin
Tanjung
Tanta
Upau
Batang Alai
Nawin (Saling)
Uwie
Mangkupum
Bilas
Sungai Pimping
Batang Tapin
Batu Mahmur
Kambitin Raya
Kambitin Baru
Tasuluk
Lokbarat
Pamarangan Kiwa
Pamarangan Kanan
Sungai Pimping Baru
Batu Hapu
Tanjung Raya
Tanjung Habang
Tanjung Habang Baru
Tanjung Habang Kiwa
Tanjung Habang Kanan
Tanjung Habang Tengah
Tanjung Habang Ilir
Tanjung Habang Ulu
Tanjung Habang Hilir
Tanjung Habang Hulu

2.1.1.3. Topografi

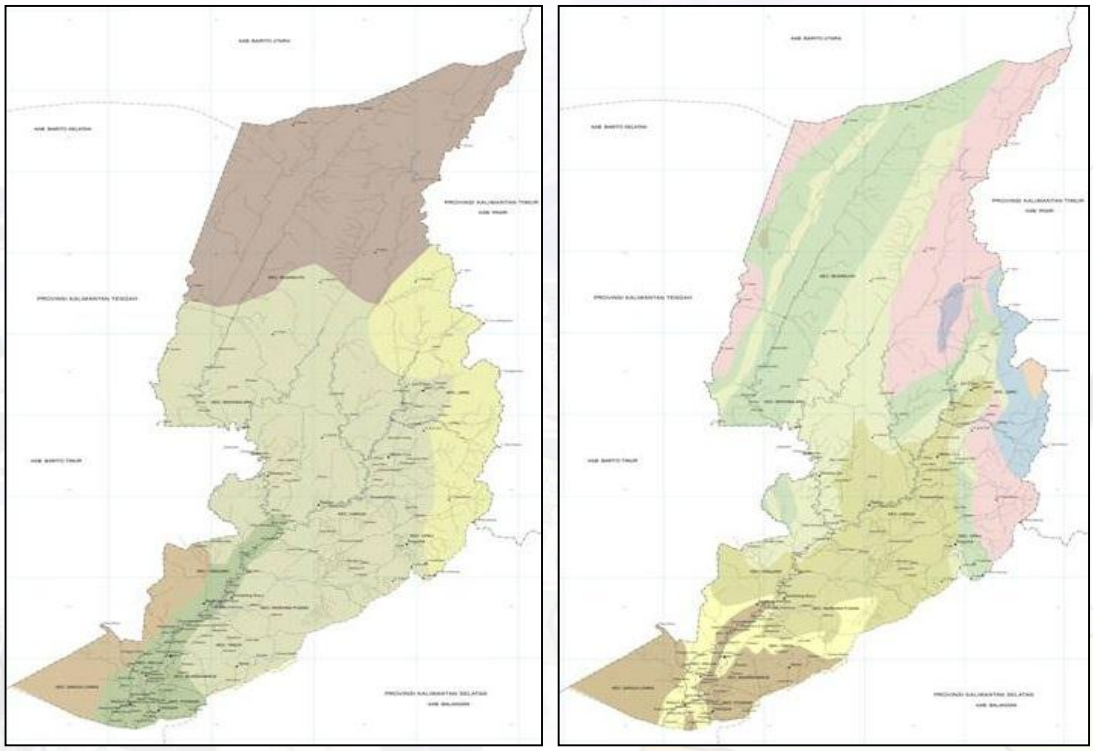
Ditinjau dari Topografinya, bagian utara Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari pegunungan Meratus yang terbentang dari arah utara ke selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan dataran dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan merupakan batas timur cekungan Barito didominasi oleh dataran rendah dan rawa.



Gambar 2.2
Peta Administrasi dan Topografi

2.1.1.4. Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Tabalong tersusun atas 14 formasi batuan. Formasi batuan terbanyak adalah formasi Tanjung seluas 23,56% dari seluruh wilayah. Sedangkan formasi yang paling kecil adalah formasi granit seluas 0,05% dari luas wilayah.



Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah dan Geologi

2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Kabupaten Tabalong sebagian besar dilalui oleh sungai, sekitar 89% desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong dilalui aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Tabalong sepanjang ± 75 Km dengan lebar 60 meter. Sungai ini merupakan gabungan dari Sungai Tabalong Kiwa dan Sungai Tabalong Kanan yang berhulu di Pegunungan Meratus. Debit air rata-rata sebesar 124,5 m^3/detik. Jika hujan turun berlebihan kapasitas sungai Tabalong tidak mencukupi dan akan terjadi banjir pada daerah rendah seperti Banua Lawas, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Tanta.

Berdasarkan pola aliran sungai terdapat 1 DAS yang terbagi atas dua sub DAS dan enam sub-sub DAS dengan luas catchment area masing-masing sebagai berikut :DAS Tabalong 73.581 Ha

- Sub DAS Tabalong Kiwa 26.110 Ha dan Tabalong Kanan 38.261 Ha

- Sub-Sub DAS Ayu 42.812 Ha, Uwi 39.504 Ha, Tutui 36.818 Ha, Misim 39.792 Ha, Kumap 40.470 Ha dan Jaing 22.647 Ha.

Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Misim. Sungai-sungai lain yang terdapat di Kabupaten Tabalong antara lain sungai Anyar, sungai Jaing, dan sungai Kinarum.

2.1.1.6. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Tabalong beriklim panas (tropis), Kelembaban udara maksimum pada tahun 2017 tidak dapat diketahui karena ketiadaan data dari instansi terkait.

Temperatur udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Temperatur udara rata-rata maksimum di Kabupaten Tabalong 29° C yang terjadi pada bulan Mei, sedangkan temperatur udara rata-rata minimum berkisar antara 23° C yang terjadi pada bulan Februari.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan maksimum pada tahun 2017 terjadi pada bulan Mei yaitu 265,60 mm sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan April yaitu 89,60 mm. Jumlah seluruh curah hujan selama tahun 2017 adalah 1.943,9 mm dan jumlah hari hujan adalah 219 hari.

Kecepatan angin di Kabupaten Tabalong tiap bulannya berkisar antara 15,00 – 20,28 km/jam. Data rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2017 tidak tersedia.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong sebagian besar masih berupa hutan sebesar 65,62% dari luas wilayah, lahan perkebunan

sebesar 21,47%, lahan pertanian sebesar 6,19%, permukiman 5,49%, dan yang lainnya berupa lahan perkantoran, perikanan, perairan dan lain-lain sebesar 1,22%. Penyebaran kawasan hutan terutama terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan.

Arah perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong masih tergantung pada sektor usaha pertanian dan usaha pertambangan dan penggalian. Hal itu dapat dilihat dari peranan sektor usaha tersebut dalam menyumbang pendapatan daerah yang sangat besar dan berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Sedangkan arah perkembangan penggunaan lahan untuk pemukiman/pedesaan mengarah pada pola aliran sungai, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah pedesaan yang dilalui oleh sungai dan banyaknya kegiatan dan pegerakan barang dan orang yang terjadi diatas sungai. Sungai telah menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Untuk itu sumber daya air ini harus di jaga termasuk volume air agar tetap dapat bertahan sepanjang masa dan tidak merupakan sebagai sumber bencana pada musim hujan dan hambatan pada musim kemarau. Pola Wilayah Tanah Usaha (WTU) berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang ada terbagi menjadi 6 (enam) WTU yaitu:

1. WTU terbatas dengan ketinggian kurang 7 m dpl, permukaan tanah datar sampai sangat datar dan kadang-kadang terkena banjir, wilayah ini untuk perikanan dan persawahan.
2. WTU utama Ia, Ib dengan ketinggian 7-25 m dpl, permukaan tanah datar sampai bergelombang ringan, sesuai untuk perikanan dan persawahan.
3. WTU utama Ic pada ketinggian 25-100 m dpl, permukaan tanah bergelombang, sesuai untuk perkebunan, agroforestri, pertanian tanah kering dan sawah.

4. WTU utama Id pada ketinggian 100-500 m dpl, permukaan tanah bergelombang sampai berbukit, sesuai untuk perkebunan, agroforestri dan pertanian tanah kering.
5. WTU utama II 500-100 m dpl, keadaan permukaan tanah berbukit dan bergunung, dimanfaatkan sebagai kawasan lindung.
6. WTU terbatas II, ketinggian lebih 1000 m dpl, peruntukan untuk kawasan lindung karena kelerengan lebih dari 40%.

Adapun komposisi jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Tabalong

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan	239.296	65,62
2.	Perkebunan	78.279	21,47
3.	Pertanian lahan basah	18.673	5,12
4.	Pertanian lahan kering dan hortikultura	3.914	1,07
5.	Pemukiman Perkotaan	2.784	0,76
6.	Pemukiman Perdesaan	17.250	4,73
7.	Industri	1.858	0,51
8.	Perdagangan dan Jasa	472	0,13
9.	Perkantoran	70	0,02
10.	Perikanan	526	0,14
11.	Perairan (sungai)	1.442	0,40
12.	Lain-lain	88	0,02
Jumlah		364.652	100

Sumber: Data diolah dari peta Pola Ruang RTRWK Tabalong Tahun 2013-2033

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi besar mengalami bencana meliputi :

a. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terdiri atas : kebakaran pada kawasan hutan, lahan kritis, padang

alang-alang, kawasan perkebunan dan kawasan pertanian lahan kering yang terjadi setiap musim kemarau di Kecamatan Jaro, Muara Uya, Haruai, Upau, Bintang Ara, Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Kelua, Muara Harus, Banua Lawas dan Pugaan; dan

b. kawasan rawan banjir yang terdapat di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak, Tanta, Haruai, Muara Uya, Upau dan Muara Harus.

2.1.3. Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 sebesar 247.106 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebesar 125.605 jiwa dan dan perempuan sebesar 121.501 jiwa. Penduduk terbanyak adalah pada Kecamatan Murung Pudak sebanyak 51.149 jiwa, disusul Kecamatan Tanjung sebanyak 36.753 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Muara Harus sebanyak 6.607 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2017 per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Banua Lawas	9.748	10.199	19.947
2.	Pugaan	3.528	3.699	7.227
3.	Kelua	12.664	12.833	25.497
4.	Muara Harus	3.287	3.320	6.607
5.	Tanta	9.902	9.574	19.476
6.	Tanjung	18.583	18.170	36.753
7.	Murung Pudak	27.192	23.957	51.149
8.	Haruai	11.497	11.259	22.756
`9.	Bintang Ara	4.583	4.416	8.999
10.	Upau	3.955	3.977	7.932

11.	Muara Uya	12.444	12.045	24.489
12.	Jaro	8.222	8.052	16.274
	Kab. Tabalong	**125.605**	**121.501**	**247.106**

Sumber : BPS Kab. Tabalong, 2018

Tabel 2.4
Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah Rmh Tangga	Kepadatan Org / km²	Laju Pertumbuhan (%)
		Laki2	Perempuan	Total			
1.	2013	117.711	114.007	231.718	63,238	59	1,61
2.	2014	119.767	116.010	235.777	66.480	59,72	1,75
3.	2015	121.661	117.932	239.593	68.537	67	1,62
4.	2016	123.806	119.671	243.477	70.664	68	1,62
5.	2017	125.605	121.501	247.106	72.865	69,11	1,49

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2018

Kepadatan penduduk selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 kepadatan penduduk Tabalong sebesar 59 orang/km², dan bertambah hingga mencapai 69,11 orang/km² pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan semakin bertambahnya penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)			
	2010	2014	2015	2016	2017	2010-2017	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Banua Lawas	17.997	19.080	19.359	19.687	19.947	1,48	1,46	1,69	1,32
Pugaan	6.479	6.903	7.016	7.131	7.227	1,57	1,64	1,64	1,35
Kelua	22.628	24.365	24.717	25.125	25.497	1,72	1,44	1,65	1,48
Muara Harus	5.901	6.341	6.438	6.535	6.607	1,63	1,53	1,51	1,10
Tanta	17.204	18.643	18.910	19.208	19.476	1,79	1,43	1,58	1,40
Tanjung	32.440	35.126	35.657	36.216	36.753	1,80	1,51	1,57	1,48
Murung Pudak	44.688	48.633	49.530	50.340	51.149	1,95	1,84	1,64	1,61
Haruai	20.416	21.799	22.118	22.443	22.756	1,56	1,46	1,47	1,39
Bintang Ara	7.935	8.525	8.700	8.843	8.999	1,81	2,05	1,64	1,76
Upau	7.046	7.575	7.698	7.826	7.932	1,71	1,62	1,66	1,35
Muara Uya	21.689	23.297	23.697	24.097	24.489	1,75	1,72	1,69	1,63
Jaro	14.197	15.490	15.753	16.026	16.274	1,97	1,70	1,73	1,55
Tabalong	**218.620**	**235.777**	**239.593**	**243.477**	**247.106**	**1,77**	**1,62**	**1,62**	**1,49**

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2018

Pada tahun 2017, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, daerah yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Murung Pudak yaitu 51.149 jiwa. Lalu disusul oleh Kecamatan Tanjung sebanyak 36.753 jiwa.

Berdasarkan struktur usia penduduk, penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 didominasi oleh kelompok usia 0-4 tahun yaitu sebanyak 24.611 jiwa. Sedangkan kelompok usia produktif 15-64 tahun didominasi oleh kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 21.026 jiwa.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tabalong Tahun 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			*Sex Ratio*
	Laki-laki	Perempuan	Total	
0-4	12.719	11.892	24.611	106,95
5-9	12.421	11.945	24.366	103,98
10-14	11.389	10.627	22.016	107,17
15-19	10.079	9.745	19.824	103,43
20-24	11.000	10.026	21.026	109,71
25-29	10.818	9.944	20.762	108,79
30-34	10.209	9.869	20.078	103,45
35-39	10.120	9.880	20.000	102,43
40-44	9.416	9.018	18.434	104,41
45-49	8.626	8.093	16.719	106,59
50-54	6.718	6.480	13.198	103,67
55-59	4.740	4.958	9.698	95,60
60-64	3.382	3.505	6.887	96,49
65-69	2.031	2.517	4.548	80,69
70-74	1.060	1.567	2.627	67,65
75+	877	1.435	2.312	61,11
Total	**125.605**	**121.501**	**247.106**	**103,38**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong

2.1.4. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Tabalong, potensi pengembangan wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel tersebut memuat kawasan strategis di Kabupaten Tabalong terdiri dari 5 (lima) kawasan dengan arah pengembangannya masing-masing.

Tabel 2.7
Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong

NO	KAWASAN	LOKASI	ARAH PENGEMBANGAN
1.	Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten	Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak	– Pengembangan perdagangan di Kelurahan Tanjung – Pembataan dan Mabuun, wisata buatan dan religi di Mabuun serta pengembangan perkantoran pemerintah dan pelayanan publik lainnya di Mabuun
2.	Kawasan Puri Mawar	Kecamatan Murung Pudak	– Pengembangan wisata buatan dan pendidikan kepramukaan di Tanjung Puri – Pengembangan perdagangan dan industri di Mabuun – Pengembangan transportasi udara di Warukin
3	Kawasan Perkebunan dan Peternakan Sapi	Kecamatan Muara Uya, Jaro dan Haruai	Pengembangan perkebunan dan peternakan
4	Kawasan Pertanian Lahan Basah	Kecamatan Kelua, dan Banua Lawas	– Pengembangan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian, kegiatan wisata agro secara terbatas – Pengembangan penganeka-ragaman pangan
5.	Kawasan Minapolitan	Desa Kambitin dan Kambitin Raya di Kecamatan Tanjung dan desa Jaro di Kecamatan Jaro	Budidaya pertanian lahan basah dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang

Sumber : RTRW Kabupaten Tabalong

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunaan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan dapat ditunjukkan oleh meningkatnya taraf hidup masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Pada bagian ini akan digambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Tabalong selama beberapa tahun terkahir, yaitu melalui Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat antara lain meliputi pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB Sektoral, struktur perekonomian, inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Angka Kemiskinan.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menununjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan perananan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan, dari 13,33 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 13,83 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini

menunjukkan selama tahun 2017 Kabupaten Tabalong mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,8 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Struktur perekonomian di Tabalong tahun 2017 didominasi oleh 3 (tiga) sektor besar yaitu Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Hal ini tercermin dari sumbangan ketiga sektor ini terhadap total PDRB ADHB yang cukup besar yaitu masing-masing 46,26 persen, 11,00 persen, dan 8,78 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan terendah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,09 persen. Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan pertumbuhan terbesar yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu 11,01 persen di 2017. Secara makro atau keseluruhan maka pertumbuhan ekonomi kabupaten Tabalong Tahun 2017 adalah 3,80 persen, naik dibanding tahun 2016 yang sebesar 3,11 persen.

Berdasarkan data pada tabel PDRB Menurut Sektoral ADHB selama tahun 2013 sampai dengan 2017, maka dapat diketahui terjadi penyusutan distribusi PDRB kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan perikanan, serta pertambangan dan penggalian secara konsisten. Penurunan jumlah kontribusi 2 (dua) sektor ini dari 68,97 persen pada tahun 2013 menjadi 57,26 persen pada tahun 2017. Penurunan pangsa pertanian tersebut diikuti oleh meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian dan pertambangan/penggalian di Kabupaten Tabalong dalam penciptaan nilai tambah.

Postur ekonomi (dilihat dari distribusi PDRB) Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten

Tabalong masih didominasi oleh sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Hal ini terlihat dari besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertambangan yang secara agregat menyumbang 46,26 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun 2017. Besarnya distribusi Kategori pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ini karena didukung oleh adanya wilayah produsen komoditas pertambangan batu bara dan minyak bumi yang ada di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.8
PDRB menurut Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017

(dalam juta rupiah)

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.212.977	10,00	1.275.646	10,11	1.301.669	10,07	1.353.676	10,16	1.418.552	10,25
B	Pertambangan dan Penggalian	7.247.188	59,74	7.439.010	58,94	7.340.720	56,79	7.344.076	55,11	7.350.597	53,14
C	Industri Pengolahan	752.925	6,21	772.868	6,12	888.450	6,87	950.536	7,13	1.050.631	7,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.927	0,02	3.603	0,03	4.851	0,04	5.064	0,04	5.081	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.468	0,21	27.309	0,22	28.874	0,22	30.864	0,23	33.200	0,24
F	Konstruksi	495.190	4,08	526.882	4,17	576.502	4,46	633.460	4,75	702.061	5,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	627.683	5,17	678.234	5,37	737.031	5,70	807.844	6,06	894.820	6,47
H	Transportasi dan Pergudangan	183.849	1,52	193.957	1,54	210.397	1,63	229.273	1,72	251.593	1,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125.281	1,03	134.186	1,06	146.841	1,14	160.917	1,21	178.639	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	367.992	3,03	403.687	3,20	440.674	3,41	483.986	3,63	536.512	3,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	154.454	1,27	165.491	1,31	173.853	1,35	195.043	1,46	213.660	1,54
L	Real Estate	111.748	0,92	118.162	0,94	127.090	0,98	138.439	1,04	151.085	1,09
M,N	Jasa Perusahaan	24.558	0,20	26.285	0,21	28.051	0,22	30.082	0,23	32.436	0,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368.677	3,04	389.989	3,09	423.947	3,28	432.569	3,25	442.480	3,20
P	Jasa Pendidikan	315.349	2,60	341.586	2,71	362.569	2,81	385.458	2,89	412.772	2,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	60.030	0,49	63.853	0,51	68.549	0,53	74.335	0,56	81.312	0,59

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
R,S,T,U	Jasa lainnya	55.882	0,46	60.453	0,48	65.268	0,50	71.103	0,53	77.840	0,56
PDRB dengan Minyak Bumi		**12.132.178**	**100,00**	**12.621.202**	**100,00**	**12.925.336**	**100,00**	**13.326.726**	**100,00**	**13.833.271**	**100,00**

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapngan Usaha 2013-2017

Tabel 2.9
PDRB Menurut Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017

(dalam juta rupiah)

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.375.798.00	9.96	1.533.230.00	10.40	1.611.781.00	10.86	1.684.156.00	11.02	1.808.062.00	11.00
B	Pertambangan dan Penggalian	8.150.113.00	59.01	8.384.708.00	56.90	7.643.615.00	51.48	7.367.633.00	48.23	7.605.527.00	46.26
C	Industri Pengolahan	890.782.00	6.45	973.551.00	6.61	1.166.391.00	7.86	1.256.906.00	8.23	1.443.778.00	8.78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.402.00	0.02	3.233.00	0.02	5.334.00	0.04	6.749.00	0.04	7.672.00	0.05
E	Pengadaan Air	29.032.00	0.21	33.410.00	0.23	37.277.00	0.25	40.474.00	0.26	44.641.00	0.27
F	Konstruksi	549.239.00	3.98	618.993.00	4.20	739.332.00	4.98	848.984.00	5.56	977.127.00	5.94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	737.771.00	5.34	847.200.00	5.75	975.283.00	6.57	1.121.418.00	7.34	1.284.890.00	7.82
H	Transportasi dan pergudangan	226.941.00	1.64	245.971.00	1.67	274.508.00	1.85	306.401.00	2.01	344.035.00	2.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142.348.00	1.03	165.120.00	1.12	188.410.00	1.27	211.152.00	1.38	240.920.00	1.47
J	Informasi dan Komunikasi	406.811.00	2.95	470.680.00	3.19	521.656.00	3.51	579.767.00	3.80	664.391.00	4.04
K	Jasa keuangan	187.641.00	1.36	209.319.00	1.42	236.802.00	1.60	271.402.00	1.78	304.738.00	1.85
L	Real Estate	124.135.00	0.90	141.762.00	0.96	158.393.00	1.07	176.341.00	1.15	197.157.00	1.20
M,N	Jasa Perusahaan	29.152.00	0.21	34.607.00	0.23	38.981.00	0.26	42.795.00	0.28	47.373.00	0.29
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	474.742.00	3.44	512.299.00	3.48	603.166.00	4.06	633.610.00	4.15	664.736.00	4.04
P	Jasa Pendidikan	353.795.00	2.56	411.369.00	2.79	466.748.00	3.14	526.054.00	3.44	577.338.00	3.51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67.629.00	0.49	77.276.00	0.52	91.739.00	0.62	103.288.00	0.68	115.858.00	0.70

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
R,S, T,U	Jasa lainnya	63.816.00	0.46	74.402.00	0.50	86.992.00	0.59	98.846.00	0.65	112.845.00	0.69
PDRB dengan Minyak Bumi		13.812.147,00	100,00	14.737.131,00	100,00	14.846.408,00	100,00	15.275.976,00	100,00	16.441.087,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Berdasarkan data pada tabel di atas, kategori pertambangan dan penggalian merupakan kategori yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tabalong selama lima tahun terakhir (2013-2017) dengan rata-rata mencapai 52,38 persen. Kategori tersebut sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Kabupaten Tabalong dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Kabupaten Tabalong mengalir melalui keran ekspor ke Cina, India dan Jepang.

Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Tabalong mengalami perlambatan ritme ekonomi akibat dari kondisi global yang turut membawa dampak penyebaran ke berbagai negara/wilayah. Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarut-larut. Perekonomian Tabalong tak luput dari krisis global, sektor perkebunan dalam hal ini karet sangat terpengaruh harga dunia yang cenderung menurun, harga minyak turun berdampak pada harga karet. Penerimaan dari sektor pertambangan batubara juga terganggu dengan harga batubara dunia yang juga ikut menurun.

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong melambat sejak tahun 2013. Perlambatan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2015 dimana mencapai titik terendah, yaitu 2,41 persen. Perlambatan tersebut diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Tabalong ini, yaitu pertambangan batubara. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong. Potret tersebut tergambar dari melemahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2015. Faktor

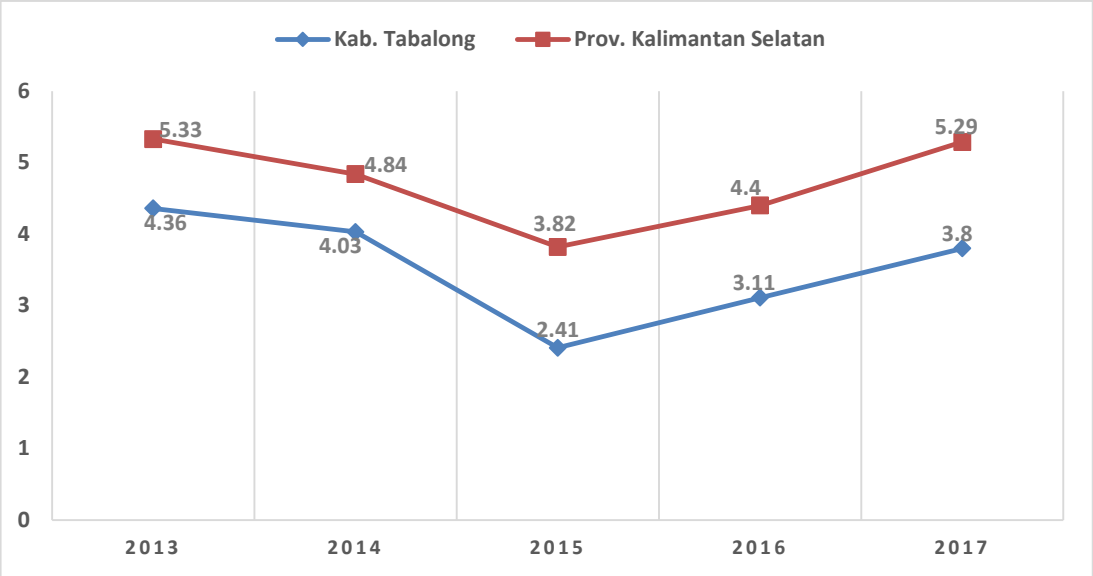
pemicu utama perlambatan ekonomi di dunia belakangan adalah krisis Eropa yang tidak kunjung reda. Dampak krisis tersebut tidak hanya menimpa kawasan Eropa, namun menyebar ke berbagai negara dan kawasan lain.

Berikut disajikan laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 3,8 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,11 persen.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Sektor	Pertumbuhan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	2,63	5,17	2,04	4	4,79
B	Pertambangan dan Penggalian	3,7	2,65	-1,32	0,05	0,09
C	Industri Pengolahan	2,39	2,65	14,95	6,99	10,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,83	23,09	34,62	4,39	0,35
E	Pengadaan Air	2,56	7,23	5,73	6,89	7,57
F	Konstruksi	6,36	6,4	9,42	9,88	10,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	8,02	8,05	8,67	9,61	10,77
H	Transportasi dan pergudangan	6,54	5,5	8,48	8,97	9,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,68	7,11	9,43	9,59	11,01
J	Informasi dan Komunikasi	6,99	9,7	9,16	9,83	10,85
K	Jasa keuangan	10,45	7,15	5,05	12,19	9,55
L	Real Estate	7,03	5,74	7,56	8,93	9,13
M,N	Jasa Perusahaan	7,8	7,03	6,72	7,24	7,82
O	Adm Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,32	5,78	8,71	2,03	2,29
P	Jasa Pendidikan	7,92	8,32	6,14	6,31	7,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9	6,37	7,35	8,44	9,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,94	8,18	7,97	8,94	9,47
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong		**4,36**	**4,03**	**2,41**	**3,11**	**3,8**

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong, 2018



Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017
Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong dan BPS RI, 2018

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong dari awal periode tahun 2013 sampai tahun 2015 sempat melemah yaitu dari angka 4,36 pada tahun 2013 menjadi 2,41 pada tahun 2015. Namun kondisi ini mulai membaik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tabalong mulai tahun 2016 dan berlanjur ke tahun 2017. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Tabalong berada di angka 3,8 persen. Sementara itu, pada tahun 2013 perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh 5,33 persen, dan terus melemah sampai tahun 2015 yaitu pada angka 3,82 persen. Sama dengan tren Kabupaten Tabalong, kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan kembali meningkat mulai tahun 2016 dan demikian pula di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 mencapai 5,29 persen.

2.2.2. Laju Inflasi

Indikator inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di level konsumen. Pada dasarnya inflasi di

suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua harga selama periode tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi tumbuhnya produksi masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya kegiatan perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun demikian, perlu juga diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi, akan mendorong kegiatan perekonomian menjadi tidak terkendali, sehingga besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu dikendalikan.

Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang mengalami kenaikan. Nilai inflasi rata-rata adalah ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya inflasi di Kabupaten Tabalong di antaranya adalah karena sebagian besar komoditas bahan makanan tidak diproduksi di Kabupaten Tabalong. Faktor lainnya adalah karena adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Tabel 2.11
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Inflasi	6,98	9,17	7,25	2,21	2,40	5,60

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong

Berdasarkan tabel di atas, nilai inflasi berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata inflasi 5,60 persen. Tahun 2013 inflasi sebesar 6,98 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 9,17 persen dan tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan

menjadi 7,25 persen dan 2,21 persen. Tahun 2017 inflasi kembali mengalami peningkatan menjadi 2,40 persen. Tahun 2016 – 2017 cenderung stabil dan dapat diatasi.

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 2.12. Selama tahun 2013- 2017, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabalong rata-rata semakin meningkat setiap tahunnya dari 59,61 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 66,54 juta rupiah pada tahun 2017, atau tumbuh rata-rata 3,3 persen setiap tahunnya. Meskipun sempat di tahun 2015 terjadi sedikit penurunan yang disebabkan oleh menurunnya permintaan dunia terhadap batubara, sehingga produksinya juga ikut menurun. Namun nilai ini kembali meningkat pada tahun 2016. Jika diukur dalam USD, PDRB perkapita Tabalong masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi PDRB per kapita konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong tumbuh melambat selama periode 2013-2015. Namun, di tahun 2016 dan 2017 pertumbuhannya semakin membaik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

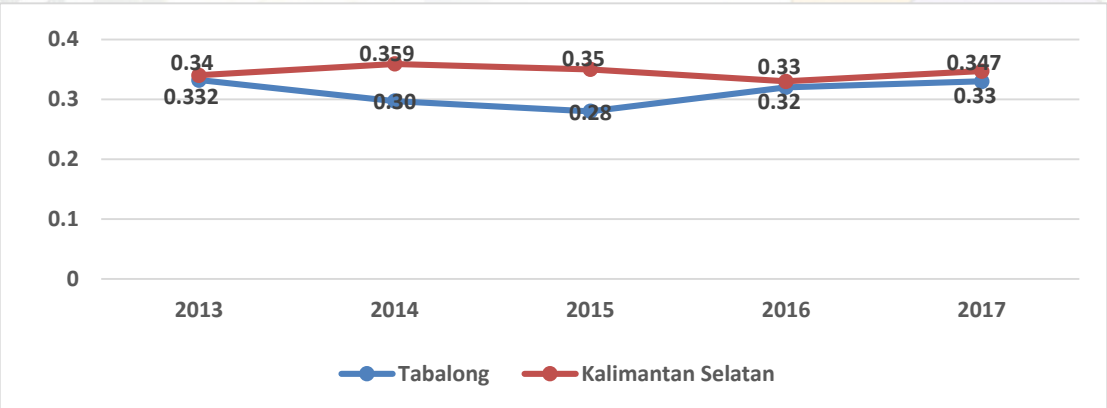
PDRB per Kapita	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)	59.608	62.505	61.965	62.741	66.535
Atas Dasar Harga Berlaku (%)	5,20	4,86	-0,86	1,25	6,05
Atas Dasar Harga Konstan (ribu rupiah)	52.358	53.530	53.947	54.735	55.981
Atas Dasar Harga Konstan (%)	2,56	2,24	0,78	1,46	2,28

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha 2013-2017.

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai indek gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai indek gininya makin mendekati satu.

Berikut ini disajikan statistik indeks gini Kabupaten Tabalong periode 2013-2017 yang dibandingkan dengan kondisi di Kalimantan Selatan.



Sumber: BPS Kab. Tabalong dan BPS Kalimantan Selatan

Gambar 2.5
Indeks Gini Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar di atas di atas, angka indeks gini Kabupaten Tabalong berfluktuasi dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2013 angka indeks gini sebesar 0,332, kemudian selama beberapa tahun kedepan mengalami kecenderungan menurun sampai menyentuh 0,28 di tahun 2015. Namun pada tahun 2016 dan 2017 cenderung meningkat hingga terakhir mencapai 0,33. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di masyarakat Tabalong cenderung meningkat selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bila dibandingkan indeks gini Kabupaten Tabalong dengan Provinsi Kalimamtan Selatan, maka posisi Tabalong selalu berada di bawah angka provinsi. Pada tahun 2017, indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 0,347, yang berarti kesenjangan pendapatannya lebih besar dibandingkan di Kabupaten Tabalong.

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan penduduk tidak hanya dapat dilihat dari angka koefisien gini, tetapi dapat diamati dengan pendekatan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia merupakan pemerataan pendapatan yang diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Pendekataan ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Tabel 2.13
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
40 Persen Terendah	22,29	20,60	20,62
Makanan	27,34	23,10	24,12
Bukan Makanan	16,87	16,27	16,12
40 Persen Menengah	39,90	39,23	37,69
Makanan	40,94	40,84	41,39
Bukan Makanan	38,77	35,26	32,91
20 Persen Teratas	37,82	40,17	41,69
Makanan	31,72	36,06	34,49
Bukan Makanan	44,35	48,47	50,97

Sumber: BPS Kab. Tabalong

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2017 menurut pengelompokkan bank dunia yaitu 40 persen terendah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas, maka konsumsi rata-rata perkapita sebulan masyarakat Tabalong terpusat di 20 persen teratas sebesar 41,69 persen. Akan tetapi perhatian bisa lebih dipusatkan di 40 persen terendah yang mendapatkan proporsi konsumsi 20,62 persen. 20,62 persen dapat diartikan ketimpangan pendapatan di Tabalong pada level ketimpangan rendah (batas ketimpangan level sedang 12–17 persen, dan ketimpangan tinggi jika di bawah 12 persen). Begitu juga yang terjadi di tahun 2016 dan 2015 ketimpangan pendapatan masuk dalam level ketimpangan rendah karena ada pada angka 20,60 persen dan 22,29 persen.

2.2.6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Perkembangan pembangunan suatu daerah pada dasarnya merupakan akumulasi dari perkembangan pembangunan wilayah-wilayah yang menjadi cakupannya. Perkembangan pembangunan Kabupaten Tabalong merupakan akumulasi dari perkembangan

pembangunan 12 Kecamatan yang ada. Dengan demikian salah satu faktor penentu perkembangan pembangunan adalah sejauhmana perkembangan wilayah-wilayah cakupannya dan seberapa besar kesenjangan/ketimpangan antar wilayah yang ada.

Ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Tabalong dapat ditinjau dengan menggunakan indeks ketimpangan regional, yaitu indeks Williamson yang dihitung dengan menggunakan komponen utama yaitu PDRB per kapita serta jumlah penduduk masing-masing untuk tiap kecamatan. Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Tabel 2.14
Ketimpangan Wilayah
Berdasarkan Indeks Williamson

No	Kecamatan	Nilai IW					
		2014	2015	2016	2017	Rata-rata	Ket.
1	Banua Lawas	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	Merata
2	Pugaan	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	Merata
3	Kelua	0.18	0.16	0.15	0.15	0.16	Merata
4	Muara Harus	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	Merata
5	Tanta	1.01	0.89	0.82	0.77	0.87	Sangat Timpang
6	Tanjung	0.19	0.17	0.15	0.14	0.16	Merata
7	Murung Pudak	0.48	0.43	0.40	0.40	0.43	Agak Timpang
8	Haruai	0.12	0.09	0.08	0.07	0.09	Merata
9	Bintang Ara	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	Merata
10	Upau	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	Merata
11	Muara Uya	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12	Merata
12	Jaro	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	Merata
Tabalong		0.23	0.20	0.19	0.18	0.20	Merata

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan analisis tersebut, ketimpangan wilayah terbesar terjadi justru di perkotaan, yaitu Kecamatan Tanta (0,87) dan Kecamatan Murung Pudak (0,43). Sedangkan ketimpangan wilayah terkecil terjadi di Kecamatan Bintang Ara (0,04) dan Muara Harus (0.06).

Kesenjangan antar wilayah kecamatan terjadi karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan per kapitanya. Kondisi diduga disebabkan oleh perbedaan penyerapan investasi serta kesenjangan infrastruktur yang ada. Sedangkan dilihat dari data per tahun, ketimpangan wilayah tidak terlampau besar yang berkisar antara 0,18-0,23, dengan kondisi terakhir tahun 2017 sebesar 0,18. Kondisi tahun 2017 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian kecenderungan ketimpangan wilayah semakin mengecil.

Sedangkan apabila dipetakan dengan menggunakan tipologi Klassen yang menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, tahun 2017, maka akan tampak tipologi suatu wilayah dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) atau disebut juga sebagai daerah maju dan tumbuh cepat (*rapid growth region*), merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata. Kecamatan yang masuk dalam kuadran ini adalah : Kecamatan Tanta.
2. Daerah yang berkembang cepat (*growing region*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata. Kecamatan yang masuk dalam kuadran ini adalah : Kecamatan Murung Pudak.
3. Daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*), merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tetapi pendapatan perkapitanya lebih tinggi dibanding rata-rata. Kecamatan yang

masuk dalam kuadran ini adalah : Kecamatan Tanjung, Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya dan Jaro.

4. Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata. Berdasarkan tipologi ini, tidak ada kecamatan di Kabupaten Tabalong yang masuk dalam kategori ini.

2.2.7. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Beberapa indikator dapat disajikan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan sebuah daerah. Indikator yang disajikan meliputi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalamam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Apabila dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabalong selama periode 2013-2017 relatif berfluktuasi dengan garis kemiskinan yang semakin meningkat. Berdasarkan statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabalong mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 15.710 jiwa dan menurun sampai berada pada jumlah 15.000 jiwa pada tahun 2017. Ini menunjukkan semakin baiknya penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Tabalong.

Penurunan jumlah penduduk miskin juga dibarengi oleh penurunan persentase penduduk miskin di Tabalong pada periode 2015 sampai dengan 2017. Kondisi menggembirakan ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Tabalong berdasarkan data 2017 berada pada angka 6,09 yang berarti turun dari 6,35 pada tahun 2016.

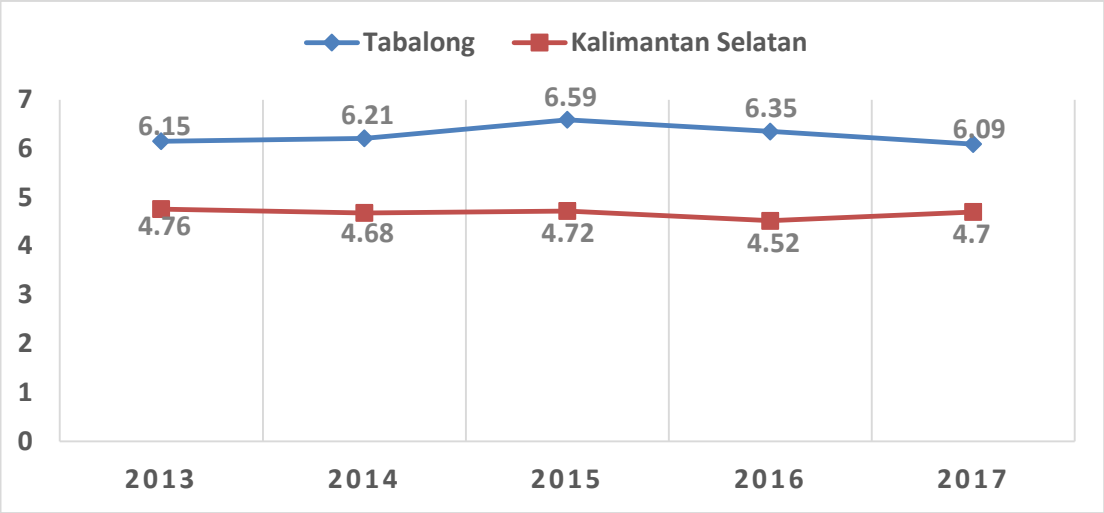
Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabalong sebesar 0,95, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 0,92. Peningkatan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Tabalong menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar.

Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2017, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tabalong sebesar 0,23, turun dari tahun 2016 yang sebesar 0,24. Penurunan nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin rendah.

Tabel 2.15
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Indikator (Keterangan)	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	330.764	350.737	368.924	406.669	430.129
Penduduk Miskin (jiwa)	14.300	14.710	15.710	15.400	15.000
Persentase Penduduk Miskin (P_0)	6,15	6,21	6,59	6,35	6,09
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	0,61	0,65	0,79	0,92	0,95
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,09	0,12	0,13	024	0,23

Sumber : Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2018



Sumber: Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2018

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013–2017

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong berfluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2013 persentase penduduk miskin sebesar 6,15 persen, kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 menjadi 6,59 persen. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, sebab mulai tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan. Posisi penduduk miskin di Tabalong pada tahun 2017 adalah 6,09 persen. Sedangkan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, persentase penduduk miskin sedikit fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan gambar di atas. Posisi persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 4,52 persen mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sehingga menjadi 4,7 persen. Dengan demikian, persentase penduduk miskin di Tabalong lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

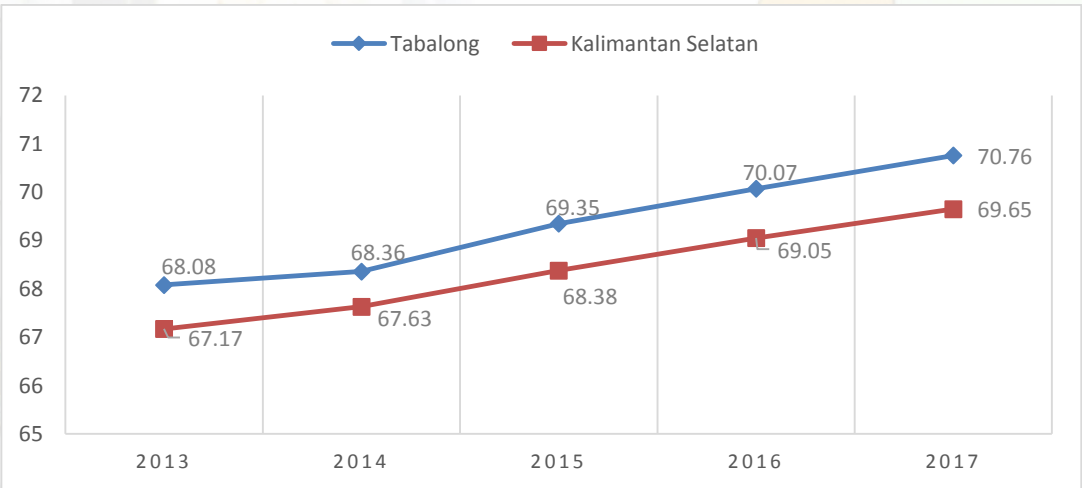
2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau

IPM. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka harapan hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), pencapaian IPM Kabupaten Tabalong memperlihatkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. IPM Tabalong pada tahun 2013 sebesar 68,08 meningkat terus dan mencapai 70,76 pada tahun 2017. Capaian angka IPM Tabalong sebesar 70,76 menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia tinggi, yaitu di kisaran angka 70 ≤ IPM < 80.

Tren pertumbuhan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tabalong hampir sama, yaitu meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh data periode 2013 sampai dengan 2017. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tabalong lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 yang sebesar 69,65. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan.



Sumber: BPS Kabupaten Tabalong dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 2.7
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2013-2017

2.2.9. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Melek Huruf adalah 100 persen.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	97,82	98,71	98,41	98,93	99,35

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan. Di mana Angka Melek Huruf pada tahun 2013 sebesar 97,82 persen, meningkat terus dan mencapai 99,35 persen pada tahun 2017. Ini berarti penduduk Tabalong hampir seluruhnya telah bebas buta huruf atau aksara.

Adapun informasi mengenai pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Tabalong dalam rangka meningkatkan Angka Melek Huruf dapat dilihat pada tabel berikut :

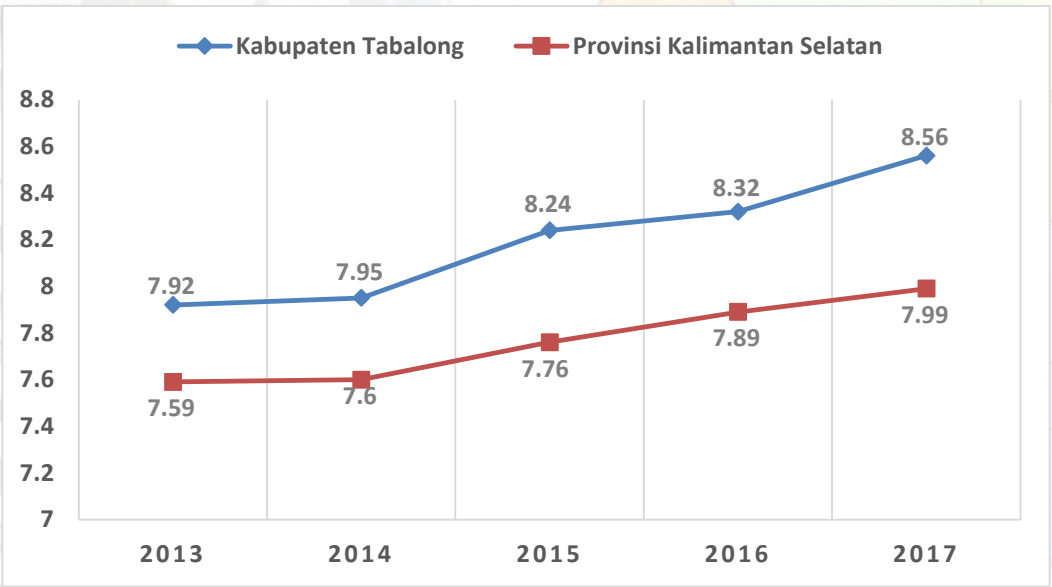
Tabel 2.17
Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
Tahun 2013-2017

Program	Tahun					Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	
Paket A	-	-	60	60	130	330
Paket B	-	300	180	200	225	1.384
Paket C	-	520	520	580	540	2.720
Jumlah	-	820	760	840	895	4.434

2.2.10. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong dari tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan, seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini. Peningkatan dari tahun ke tahun membawa rata-rata lama sekolah Kabupaten Tabalong berada di angka 8,56 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa penduduk Tabalong rata-rata menyelesaikan pendidikan kelas VIII SMP pada semester I.



Sumber: BPS RI

Gambar 2.8
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, persentase angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu berada di atas Kalimantan Selatan. Pada saat

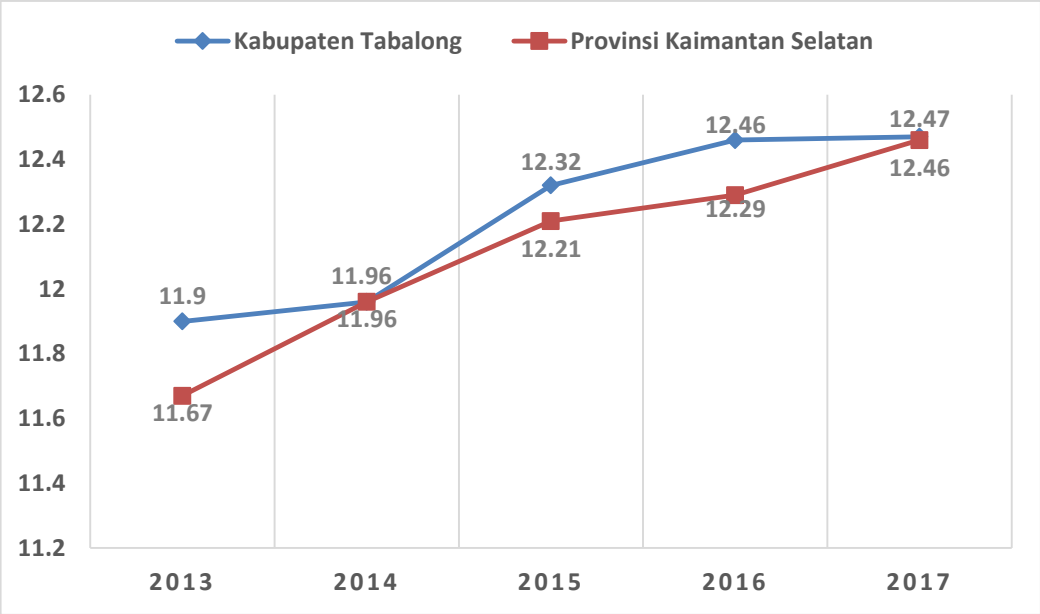
rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong berada pada 8,56 tahun pada tahun 2017, maka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Selatan berada di 7,99 tahun. Ini berarti penduduk Kalimantan Selatan rata-rata menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP pada semester II.

2.2.11. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data, dari tahun ke tahun perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan. Di mana Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2013 sebesar 11,9 tahun, meningkat terus sampai kondisi akhir yaitu tahun 2017 menjadi 12,47 tahun. Ini berarti bahwa kebijakan di bidang pendidikan yang terkait dengan Angka Harapan Lama Sekolah sudah mencapai sasaran yang diinginkan.

Bila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kabupaten Tabalong berada di atas. Data tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan angka harapan lama sekolah Kabupaten Tabalong pada umumnya lebih tinggi dibanding Kalimantan Selatan, kecuali pada tahun 2014 berada` pada angka yang sama yaitu 11,96 tahun.

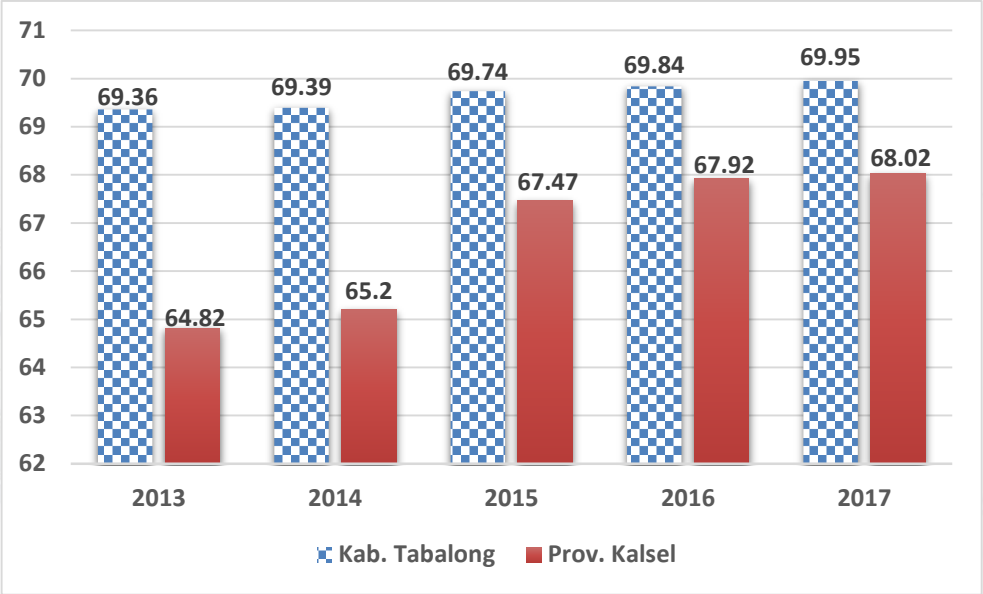


Sumber: BPS RI

Gambar 2.9
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2013-2017

2.2.12. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum AHH adalah 85 tahun. Sementara itu target Kementerian Kesehatan di tahun 2014 adalah 72 tahun.



Sumber: BPS RI

Gambar 2.10
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017

Dari gambar di atas diketahui bahwa Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Tabalong pada periode tahun 2013–2017 terus mengalami peningkatan. AHH pada tahun 2013 sebesar 69,36 mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sampai kondisi akhir tahun 2017 mencapai 69,95 tahun. Ini berarti bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2017 di Kabupaten Tabalong diperkirakan akan dapat hidup selama 69 tahun 9 hari dengan syarat besarnya kematian dan kondisi kesehatan tidak akan berubah.

Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan, AHH dari tahun 2013 sampai 2017 juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 angka AHH sebesar 64,82 tahun dan meningkat sampai mencapai 68,02 tahun pada tahun 2017. Kondisi ini berarti bahwa bayi yang lahir tahun 2017 di Kalimantan Selatan diperkirakan akan dapat hidup selama 68 tahun.

Bila dibandingkan AHH antara Kabupaten Tabalong dengan Provinsi Kalimantan Selatan, maka gambar di atas menunjukkan bahwa posisi AHH Tabalong selalu lebih tinggi dari Kalimantan Selatan.

Ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Tabalong yang diwakili indikator AHH lebih tinggi dari rata-rata masyarakat Kalimantan Selatan.

2.2.13. Persentase Balita Gizi Buruk

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Persentase balita gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten Tabalong menurut BB/U dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Persentase Balita Dengan Gizi Kurang dan Buruk
Di Kabupaten Tabalong
Menurut BB/U Tahun 2013 – 2017

No	Kondisi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Balita	21.532	22.561	22.445	23.186	24.391
2	Jumlah Balita Gizi Kurang	901	539	329	317	426
	% Balita Gizi Kurang	4,18	2,39	1,47	1,37	1,75
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	2	3	1	2	16
	% Balita Gizi Buruk	0,01	0,01	0,004	0,01	0,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

Dari tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan indikator BB/U persentase balita gizi kurang pada tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi. Persentase bayi dengan gizi kurang pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami penurunan yaitu dari 4,18 persen menjadi 1,37 persen, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1,75 persen tetapi tidak melampaui angka tahun 2013, maka perlu digalakkan operasi timbang/sweeping/kunjungan

rumah untuk balita yang tidak dibawa ke posyandu dengan harapan persentase balita gizi kurang terus mengalami penurunan. Kegiatan tersebut sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan di desa. Sampai tahun 2017, di Kabupaten Tabalong masih ditemukan balita gizi buruk, namun angkanya sangat rendah yaitu di bawah 1 persen (berdasarkan WHO dibawah 10 persen = rendah).

Untuk menurunkan angka persentase balita gizi kurang dan gizi buruk tersebut telah dilakukan upaya perbaikan gizi balita antara lain melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian multivitamin A mineral, pendampingan balita gizi buruk yang dirawat, konseling, kunjungan rumah, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

2.2.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sebelum membahas mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang biasa disingkat dengan TPAK, maka berikut ini disajikan terlebih dahulu data mengenai data penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utamanya. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Tabel 2.19
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013 – 2017

Kegiatan Utama	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja					
- Bekerja	73,20	74,18	71,84	70,10	71,74
- Pengangguran	1,65	4,12	2,34	3,05	2.90
Bukan Angkatan Kerja					
- Sekolah	7,79	8,02	8,70	9,29	8,85
- Mengurus RT	14,03	12,05	14,28	14,47	14,76

Kegiatan Utama	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
- Lainnya	3,34	1,63	2,84	3,09	1,74
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Kesempatan kerja di Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi untuk persentase penduduk yang bekerja. Demikian juga dengan angka pengangguran yang persentasenya ikut berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan persentase penduduk yang bekerja, berbanding lurus dengan meningkatnya persentase angka pengangguran, demikian juga sebaliknya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase angka angkatan kerja yang bekerja sebesar 73,20 persen di tahun 2013 dan meningkat menjadi 74,18 persen pada tahun berikutnya. Namun di tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menjadi 71,84 persen dan 70,10 persen. Di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 71,74 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf ”U” terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tabalong disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

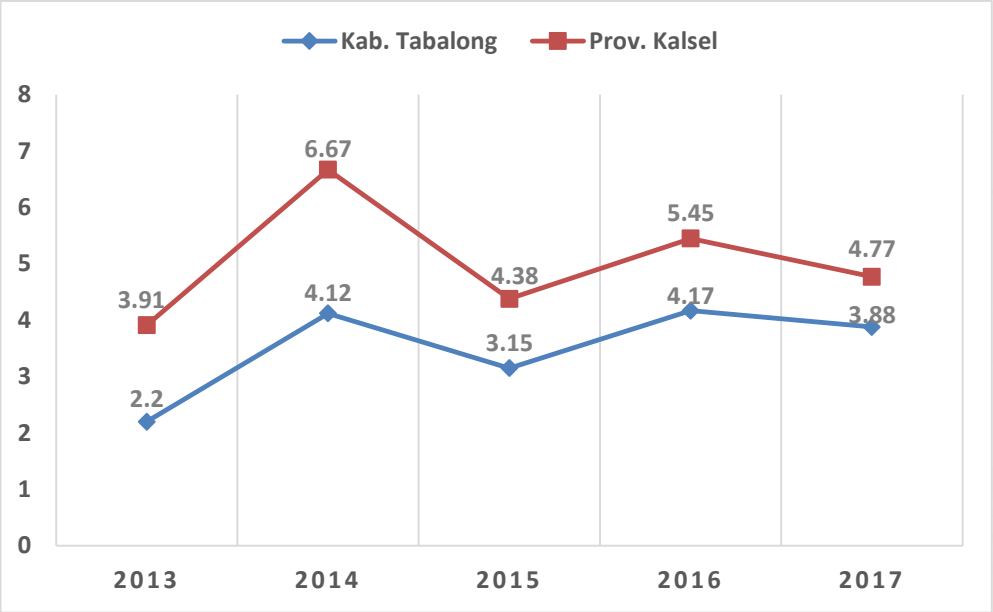
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	74,99	72,93	74,18	73,15	74,64

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami fluktuasi bila ditinjau pada kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2013 sebesar 74,99 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2014 mencapai angka 72.93 persen. Di tahun 2015 meningkat menjadi 74,18 persen, di tahun 2016 menurun kembali menjadi 73,15 persen. Kondisi terakhir pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hingga menjadi 74,64 persen.

2.2.15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Gambaran mengenai kondisi tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2018

Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2017

Angka pengangguran di Kabupaten Tabalong cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, angka pengggangguran di Kabupaten Tabalong mencapai 4,17 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 3,88 persen. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka pada angka 5,45 persen, namun kondisi ini membaik dengan turunnya TPT Kalsel pada tahun 2017 ke angka 4,77 persen.

2.2.16. Opini BPK tehadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator yang memberikan gambaran pertanggungjawaban keuangan daerah secara tarnsparan dan akuntabel adalaha Opini BPK tehadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Hal ini dilihat

dari opini WDP yang diperoleh pada tahun 2013 meningkat menjadi WTP mulai tahun 2014 sampai dengan saat ini

Tabel 2.21
Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tabalong, 2018

2.2.17. Kontribusi Sektor Tanaman Pertanian

Sektor Pertanian didukung oleh 3 (tiga) sub kategori lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan (3) Perikanan.

Pada tahun 2017 Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11 persen. Sekitar 87,33 persen kategori ini disumbang oleh sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Kemudian diikuti oleh sub kategori Perikanan sekitar 10,76 persen dan sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sekitar 1,91 persen. Selama periode tahun 2013-2017 terlihat bahwa peranan sub kategori Pertanian cenderung menurun, sedangkan perikanan memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam periode lima tahun terakhir ini, sub kategori Perikanan meningkat sebesar 1,95 persen dari tahun 2013.

Jika dilihat lebih dalam, ternyata penurunan peranan sub kategori Pertanian cenderung disebabkan oleh penurunan peranan sub kategori Perkebunan. Peranan sub kategori Perkebunan ini turun dari 54,77 persen di tahun 2013 menjadi 47,87 persen di tahun 2017. Pertumbuhan nilai tambah bruto sub kategori perkebunan mengalami perlambatan sekitar 0,78 persen dari tahun 2013. Perlambatan kinerja lapangan usaha perkebunan selama kurun waktu tersebut disebabkan

oleh perlambatan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet. Namun, pertumbuhan produksi dan nilai tambah bruto produk tersebut semakin membaik di tahun 2016 dan 2017. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu dari tanaman karet melalui Program Gemas Mekar supaya harga karet dapat meningkat.

Kinerja sub kategori usaha pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah perkebunan. Subkategori ini sebagian besar ditopang oleh produksi tanaman padi sawah. Padi sawah memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi ladang. Secara umum, kinerja produksi tanaman pangan masih terpengaruh oleh iklim. Pertumbuhan produksi tanaman pangan menunjukkan nilai positif atau tumbuh sebesar 8,20 persen pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan program cetak sawah yang dilaksanakan di berbagi tempat di kabupaten Tabalong. Selain itu adanya peningkatan produktivitas padi dikarenakan adanya area yang bisa ditanami padi dua kali dalam setahun.

Selain subkategori perkebunan dan tanaman pangan, kinerja pertanian

Kabupaten Tabalong juga ditopang oleh subkategori peternakan dengan pertumbuhan rata-rata tahun 2013-2017 adalah sebesar 6,59 persen. Hal ini menjadi keuntungan bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Tabalong, terutama dari aspek keberlanjutan. Kinerja peternakan disokong oleh produksi ternak yang cukup besar.

Sub kategori perikanan juga memberikan peranan terhadap pertanian kabupaten Tabalong sebesar 10,76 persen. Sepanjang periode 2013-2017, subkategori Perikanan rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,09 persen. Kinerja perikanan terkait erat dengan dukungan produksi perikanan tangkap

dan budidaya.

Tabel 2.22
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017

Uraian		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Konstribusi Pertanian terhadap PDRB		8,86	9,27	9,55	9,65	11,29
Peranan sektor :						
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, Jasa Pertanian	88,98	89,14	88,27	87,53	87,33
	a. Tanaman Pangan	25,77	25,65	26,30	28,50	29,25
	b. Tanaman Hortikultura	0,33	0,35	0,40	0,44	0,43
	c. Tanaman Perkebunan	54,77	54,74	52,36	48,97	47,87
	d. Peternakan	5,70	5,76	6,39	6,76	6,91
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,64	1,87	2,03	2,07	2,12
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,21	2,12	2,13	2,07	1,91
3	Perikanan	8,81	8,75	9,59	10,40	10,76

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 dan Lakip 2017

2.2.18. Kontribusi Sektor Pertambangan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong mencakup komoditas yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian, yang dikelompokkan dalam empat sub kategori yaitu, pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor pertambangan merupakan sektor utama dalam pemberian kontribusi perekonomian di Kabupaten Tabalong, yang ternyata selama lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada awal periode tahun 2013 mencapai angka 59,01 persen dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sampai mencapai 46,26 persen pada tahun 2017. Penyebab penurunan sektor ini telah dijelaskan pada sub bab Pertumbuhan PDRB di bagian atas.

Tabel 2.23
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Pertambangan Terhadap PDRB	59,01	56,90	51,48	48,23	46,26

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.2.19. Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Tabel 2.24
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	5,34	5,75	6,57	7,34	7,82

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong memiliki perkembangan yang menggembirakan dari tahun ke tahun pada periode 2013 sampai dengan 2017. Pada awal periode tahun 2013 mencapai angka 5,34 persen, meningkat terus sampai mencapai 7,82 persen pada tahun 2017.

2.2.20. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen.

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor perindustrian sebesar 6,45 persen lalu meningkat terus dan mencapai 8,78 pada tahun 2017.

Tabel 2.25
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017

Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Perindustrian	6,45	6,61	7,86	8,23	8,78

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 110,65, meningkat sampai tahun 2015 menjadi 112,52, namun menurun pada tahun 2016 di angka 108,20. Terakhir, posisi APK SD/MI berada di angka 109,45. Perkembangan APK SD/MI di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI	110,65	112,52	112,52	108,20	109,45

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 102,39 persen. Namun angka ini mengalami penurunan selama 2 tahun berikutnya dan mencapai 87,18 pada tahun 2015. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga menjadi 96,17 persen. Terakhir posisi APK SMP/MTs berada di angka 83,98. Perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APK SMP/MTs	102,39	87,18	87,18	96,17	83,98

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

3) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 83,10 persen menurun menjadi 76,75 persen pada tahun 2015. Angka ini kemudian mengalami peningkatan mulai tahun 2016 sampai 2017. Posisi APK SMA/MA/SMK tahun 2017 adalah 84,82. Perkembangan APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APK SMA/MA/SMK	83,10	76,75	76,75	84,66	84,82

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

b. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, persentase lulusan SD/setara relatif lebih besar dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2013-2016 cenderung meningkat, namun mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 24,95 persen. Di tingkat SMP/setara dan tingkat SMA, persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung meningkat sampai 2017.

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	24,17	24,35	24,08	25,14	24,95
2	SMP	15,10	15,37	15,25	16,29	16,31
3	SMA	16,72	16,88	16,67	18,17	18,26
4	Perguruan Tinggi	4,83	4,96	4,93	5,44	5,42

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

1) Angka Partisipasi Murni SD/MI

Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 94,20 persen, angka ini meningkat di tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 99,98 persen. Pada tahun 2016, APM SD/MI menurun menjadi 98,52 persen, dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang menggembirakan dan berada di angka 99,62.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, perkembangan APM SD/MI tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APM SD/MI	94,20	99,98	99,98	98,52	99,62

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

2) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Tabalong pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 87,03 persen dan sempat mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sampai dengan tahun 2017 APM SMP/MTs berada di angka 75,75.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APM SMP/MTs	87,03	78,45	78,45	79,01	75,75

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

3) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 58,11 persen, meningkat di tahun 2014 menjadi 69,60 persen. Namun di tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan menjadi 62,32 dan 60,84. Penurunan ini tidak bertahan lama, sebab pada tahun 2017 meningkat menjadi 64,18. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, perkembangan APM SMA/MA/SMK tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APM SMA/MA/SMK	58,11	69,60	62,32	60,84	64,18

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

d. Angka Partisipasi Sekolah

1) Angka Partisipasi Sekolah Dasar

Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap pendidikan dasar terhadap penduduk usia sekolah dasar. Angka partisipasi sekolah dasar memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia 7 sampai 12 tahun. Angka partisipasi sekolah dasar di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Sekolah Dasar Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APS SD/MI	98,98	121,50	99,98	99,98	99,62

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa APS sekolah dasar di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2013-2014 meningkat sampai dengan 121,50 persen. Akan tetapi di mulai tahun tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan menjadi 99,62 persen.

2) Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama

Angka partisipasi sekolah menengah pertama merupakan ukuran daya serap pendidikan menengah pertama terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama. Angka partisipasi sekolah menengah pertama memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama 13

sampai dengan 15 tahun. Angka partisipasi sekolah menengah pertama di Kabupaten Tabalong tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APS SMP/MTs	95,78	96,05	92,04	93,93	94,55

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa APS SMP/MTs di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2013-2014 meningkat dari 95,78 persen sampai 96,05 persen. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 92,04 persen. Tahun 2016 sampai 2017 kembali mengalami peningkatan di mana posisi terakhir di tahun 2017 berada di angka 94,55.

3) Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas

Angka partisipasi sekolah menengah atas merupakan ukuran daya serap pendidikan menengah atas terhadap penduduk usia sekolah menengah atas. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama 16 sampai dengan 18 tahun. Angka partisipasi sekolah menengah atas di Kabupaten Tabalong tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APS SMA/MA/SMK	81,68	83,09	72,25	74,60	79,17

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu dari 81,68 persen menjadi 83,09 persen. Namun di tahun berikutnya mengalami penurunan menjad 72,25 persen. Kondisi ini berubah pada tahun-tahun berikutnya yaitu meningkat sampai ke angka 79,17 persen pada tahun 2017.

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Sedangkan Angka melanjutkan (AM) sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Angka Kelulusan (AL) yang ada di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

1) Angka Kelulusan SD/MI

Indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SD/MI di Tabalong pada tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 100 persen. Prestasi tersebut menurun di tahun 2016 menjadi 96,71 persen, dan di tahun 2017 meningkat kembali menjadi 98,15 persen.

Tabel 2.36
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SD/MI
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan (APS) SD/MI (%)	100	100	100	96,71	98,15

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

2) Angka Kelulusan SMP/MTs

Indikator Angka Kelulusan untuk SMP/MTs di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2016 dari 93,80 menjadi 99,53. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 98,87.

Tabel 2.37
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMP/MTs
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan (APS) SMP/MTs (%)	99,50	93,80	98,10	99,53	98,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

3) Angka Kelulusan SMA/SMK

Indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tabalong mengalami fluktuatif dari tahun 2013 sampai 2017. Di tahun 2017 angka kelulusan meningkat dari tahun 2016, dari sebesar 96,35 menjadi 99,26 persen di tahun 2017.

Tabel 2.38
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMA/SMK
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan (APS) SMA/SMK (%)	98,75	99,41	94,14	96,35	99,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

f. Rasio Guru

1) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar

Rasio guru terhadap murid sekolah dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu

juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.39
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sekolah Dasar (SD/MI)					
1.1.	Jumlah Guru	2.674	2.808	2.706	2.671	2.405
1.2.	Jumlah Murid	29.396	28.916	28.882	28.838	30.916
1.3.	Rasio	10,99	10,30	10,67	10,80	12,85

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid sekolah dasar pada tahun 2013 sebesar 10,99, mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 10,30, namun sejak 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan di mana pada tahun 2015 sebesar 10,67, meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 10,80 dan terakhir di tahun 2017 berada pada 12,85.

2) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama

Rasio guru terhadap murid sekolah menengah pertama adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah pertama. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.40
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SMP/MTs					
1.1.	Jumlah Guru	1.030	1.066	1.193	1.208	1.220
1.2.	Jumlah Murid	11.317	11.797	12.714	12.792	13.123

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.3.	Rasio	8,99	11,11	10,80	10,64	10,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid sekolah dasar pada tahun 2013 sebesar 8,99, mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 11,11 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 10,80 persen, menurun kembali di tahun 2015 dan 2016 menjadi 10,80 dan 10,64 dan pada tahun 2017 menjadi 10,75.

3) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah atas per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah atas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.41
Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Menengah Atas
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah Guru	854	877	763	819	825
1.2.	Jumlah Murid	9.534	9.936	9.671	10.639	11.912
1.3.	Rasio	11,16	11,32	12,67	12,99	14,43

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio guru terhadap murid Sekolah Menengah Atas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu dari 11,16 menjadi 11,32 dan 12,67, di tahun 2015 mengalami peningkatan atau 12,67 dan terus mengalami kenaikan di tahun 2017 yaitu menjadi 14,43.

g. Rasio Ketersediaan Sekolah

1) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah dasar, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah dasar. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah dasar semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Tabel 2.42
Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Dasar
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar (SD/MI)	98,9	98,53	98,15	97,77	97,39

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio sekolah terhadap murid sekolah dasar di Kabupaten Tabalong 2013-2017 masih cukup tinggi. Namun demikian rasio tersebut memiliki kecenderungan menurun pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Seperti diketahui, semakin rendah rasio berarti semakin baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah daerah.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama

Rasio ketersediaan sekolah menengah pertama adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan menengah pertama. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah pertama.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah menengah pertama, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah menengah pertama. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah dasar semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Tabel 2.43
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	61,18	61,18	61,93	61,93	61,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio sekolah terhadap murid sekolah menengah pertama di Kabupaten Tabalong 2013-2017 masih cukup tinggi. Rasio tersebut memiliki kecenderungan meningkat hingga tahun 2017 menjadi 61,92 persen. Kecenderungan peningkatan rasio sekolah-murid ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tabalong penambahan jumlah murid diikuti dengan penambahan jumlah sekolah. Seperti diketahui, semakin rendah rasio berarti semakin baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah daerah.

3) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah atas per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah atas. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah atas.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menengah atas di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/ SMK)
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas(SMA/MA/ SMK)	28,81	27,03	27,69	30,27	27,59

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio sekolah terhadap murid tahun 2013 sebesar 28,81 persen, menurun menjadi 27,03 persen pada tahun 2014, dan meningkat kembali hingga tahun 2016 menjadi 30,27 persen. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 27,59 persen.

h. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan dibidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Semakin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitupun sebaliknya, jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APS 16-18 = 1% berarti bahwa secara rata-rata dari 10.000 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 100 anak yang putus sekolah.

1) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan pada awal periode tahun 2013 sampai akhir periode 2017. Pada tahun 2013 angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,04 persen, menurun 0,02 persen di tahun 2014 menjadi 0,02 persen, meningkat kembali 0,02 persen di tahun 2015 menjadi 0,04 persen, meningkat di tahun 2016 menjadi 1,2 persen dan menurun di tahun 2017 menjadi 1,1 persen.

Tabel 2.45
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SD/MI
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,04	0,02	0,04	1,2	1,1

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

2) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan pada awal periode tahun 2013 sampai akhir periode 2017. Pada tahun 2013 angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 0,12 persen, meningkat 0,01 persen di tahun 2014 menjadi 0,13 persen, menurun 0,02 persen di tahun 2015 menjadi 0,11 persen, di tahun 2016 meningkat menjadi 1,25 persen dan menurun di tahun 2017 menjadi 1,19 persen.

Tabel 2.46
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMP/MTs
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,12	0,13	0,11	1,25	1,19

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

3) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Tabalong masing-masing mengalami peningkatan pada awal periode tahun 2013 sampai akhir periode 2017. Pada tahun 2013 angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,09 persen, meningkat 0,02 persen di tahun 2014 menjadi 0,11 persen, meningkat kembali 0,01 persen di tahun 2015 menjadi 0,12 persen, meningkat 0,26 persen di tahun 2016 menjadi 0,38 persen dan menurun 0,11 persen di tahun 2017 menjadi 0,27 persen.

Tabel 2.47
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Tabalong 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,09	0,11	0,12	0,38	0,27

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Tabalong, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara

lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = 1 – angka kematian bayi. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah bayi mati usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Perkembangan angka kelangsungan hidup bayi tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB/1000 Kelahiran Hidup)	12,2	9,5	9,2	4	4
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	987,8	990,5	990,8	996	996

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 8,4 persen, di tahun 2013 meningkat menjadi 12,2 persen, di tahun 2014 menurun menjadi 9,5 persen, di tahun 2015 menurun menjadi 9,2 persen dan di tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 4 persen. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi di tahun 2013- 2017 mengalami peningkatan dari 987,8 menjadi 996.

b. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan

pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KN mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Jumlah posyandu dan Balita di Kabupaten Tabalong tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Posyandu	271	273	273	274	277
2.	Jumlah Balita	21.532	22.561	22.445	23.186	24.391
3.	Rasio	12,59	12,10	12,16	11,82	11,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

Dari data rasio posyandu terhadap jumlah bayi seperti di atas dapat dikatakan bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Tabalong sudah melampaui rasio yang ditetapkan yaitu 1 (satu) posyandu untuk 100 (seratus) balita. Sedangkan jumlah posyandu dan balita tahun 2017 secara kewilayahan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	Banua Lawas	26	1.457	17,84
2.	Bintang Ara	18	681	26,43
3.	Haruai	28	1.779	15,73
4.	Jaro	9	1.156	7,79
5.	Kelua	29	3.009	9,64
6.	Muara Harus	10	459	21,79

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
7.	Muara Uya	38	1.791	21,22
8.	Murung Pudak	27	3.263	8,27
9.	Pugaan	17	461	36,88
10.	Tanjung	33	3.201	10,31
11.	Tanta	33	711	46,41
12.	Upau	9	6.450	1,40
Jumlah		**277**	**24.391**	**11,35**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

c. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Ratio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2013- 2017
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Puskesmas	16	16	18	18	18
2.	Jumlah Poliklinik	4	4	9	9	9
3.	Jumlah Pustu	33	33	34	34	34
4.	Jumlah Penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2013–2017 bertambah 2 (dua) buah dari 16 buah menjadi 18 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2017, maka 1 (satu) buah Puskesmas dapat melayani 13.728 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu secara kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Banua Lawas	19.947	1	0,05	0	0	3	0,15
2.	Bintang Ara	8.999	2	0,22	0	0	1	0,11
3.	Haruai	22.756	2	0,09	0	0	3	0,13
4.	Jaro	16.274	1	0,06	0	0	0	0
5.	Kelua	25.497	2	0,08	0	0	0	0
6.	Muara Harus	6.607	1	0,15	0	0	2	0,30
7.	Muara Uya	24.489	2	0,08	0	0	5	0,08
8.	Murung Pudak	52.149	2	0,04	8	0,15	4	0,20
9.	Pugaan	7.227	1	0,14	0	0	3	0,41
10.	Tanjung	36.753	2	0,05	1	0,02	7	0,19
11.	Tanta	19.476	1	0,05	0	0	5	0,25
12.	Upau	7.932	1	0,13	0	0	1	0,12
Jumlah		**247.106**	**18**	**0,07**	**9**	**0,03**	**34**	**0,14**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

d. Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Ratio rumah sakit per satuan penduduk menggambarkan ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyakarat. Di Kabupaten Tabalong hingga tahun 2017 terdapat 2 (dua) buah rumah sakit yang melayani penduduk dengan ratio 0,01.

Hal ini terjadi karena jumlah rumah sakit yang merupakan rumah sakit milik pemerintah type C dan rumah sakit milik PT. Pertamina tidak bertambah, sedangkan jumlah penduduk meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
7.	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

e. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, atau dengan kata lain 40 orang per 100.000 orang penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah tenaga dokter dan tenaga medis serta rasionya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Dokter Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Dokter (Umum)	42	48	48	49	58
2.	Jumlah Penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
3.	Rasio	0,18	0,20	0,20	0,20	0, 23

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

Sedangkan jumlah dokter yang melayani masyarakat secara kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kabupaten Tabalong

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1.	Banua Lawas	19.947	2	0,10
2.	Bintang Ara	8.999	2	0,11
3.	Haruai	22.756	6	0,26
4.	Jaro	16.274	2	0,12
5.	Kelua	25.497	6	0,24
6.	Muara Harus	6.607	2	0,30
7.	Muara Uya	24.489	4	0,16
8.	Murung Pudak	52.149	5	0,09
9.	Pugaan	7.227	1	0,14
10.	Tanjung	36.753	25	0,68
11.	Tanta	19.476	2	0,10
12.	Upau	7.932	2	0,25
Jumlah		**247.106**	**58**	**0,23**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

Rasio dokter umum yang disyaratkan adalah 40 per 100.000 orang penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 247.106 orang, seharusnya minimal ada dokter sebanyak 99 orang. Jadi dengan jumlah dokter umum pada tahun 2017 yang hanya 58 orang, maka Kabupaten Tabalong masih kekurangan tenaga dokter umum sebanyak 41 orang. Secara umum sebaran dokter umum di Kabupaten Tabalong sudah merata, dan terbanyak di Kecamatan

Tanjung dimana 20 orang di RSUD H. Badaruddin Kasim, 3 orang di Puskesmas Tanjung dan 2 Orang di Puskesmas Hikun.

f. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari: Tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker), tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, entomology kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga keterapian fisik (fisioterapi, okupasiterapis, terapis wicara), tenaga keteknisan medis (radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten tabalong mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah penduduk diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk. Berikut adalah tabel perkenbangan jumlah tenaga medis di Kabupaten Tabalong dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.56
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tenaga Medis	42	48	55	50	77
2.	Jumlah Penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
3.	Rasio	0,181	0,203	0,233	0,209	0,311

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

g. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dari tahun 2013-2017 tergolong baik, dimana pada tahun 2013 melebihi target sebesar 102,9 persen. Berikut disajikan tabel Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut ini disajikan tabel cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Tabel 2.57
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (persen)	109,5	89,2	96,3	136,6	111,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

h. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dari tahun 2013-2017 tergolong baik, dimana pada tahun 2013 melebihi target sebesar 102,9 persen. Berikut disajikan tabel Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.58
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	102,9	97	94,6	91,3	96,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

i. Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2013- 2017 mengalami fluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 81,7 persen dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 87,6 persen, di tahun 2015 menurun menjadi 86,3 persen, di tahun 2016 meningkat menjadi 90,8 persen dan di tahun 2017 menurun menjadi 80,8 persen. Data Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) per tahun disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.59
Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization (persen)	81,7	87,6	86,3	90,8	80,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

j. Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Tabalong mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 mencapai 100 persen.

Tabel 2.60
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kasus yang ditemukan	2	3	1	2	16

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kasus yang ditangani	2	3	1	2	16
Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Tabalong mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 mencapai 100 persen. Berikut ini disajikan Tabel Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 2.61
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kasus yang ditemukan	128	155	120	145	221
Kasus yang ditangani	128	155	120	145	221
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

l. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani pada awal periode tahun 2013 sampai dengan akhir periode tahun 2017 mencapai 100 persen. Berikut disajikan Tabel Cakupan Penemuan dan PenanganPenderita Penyakit DBD tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.62
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kasus yang ditemukan	150	190	674	484	146
Kasus yang ditangani	150	190	674	484	146
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

m. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Tabalong mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 mencapai 100 persen. Berikut ini disajikan tabel cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2013–2017

Tabel 2.63
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017 (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

n. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi pada awal periode tahun 2013- 2017 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 sebesar 90,8 persen, di tahun 2014

mengalami peningkatan menjadi 95,4 persen dan 2015 dan 2016 mengalami penurunan menjadi 94,2 persen dan 92,7 persen persen dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 95,3 persen di tahun 2016. Berikut disajikan tabel cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Tabalongtahun 2013-2017.

Tabel 2.64
Cakupan Kunjungan Bayi
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kunjungan bayi (persen)	90,8	95,4	94,2	92,7	95,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Tabalong juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan. Semakin meningkatnya usaha pembangunan dan berkembangnya suatu wilayah, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Persentase jalan negara dan jalan provinsi dari tahun 2013 sampai 2017 yang dalam kondisi baik sudah sangat bagus, sedangkan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih sangat rendah, yaitu pada tahun 2017 sebesar 62,84% dari panjang jalan kabupaten sepanjang 904,13 km. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5)

Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

Tabel di bawah ini merupakan data proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Tabel 2.65
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong

Status	Jalan Kondisi Baik (Km)					Panjang Jalan Di Kab. Tabalong (Km)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Jalan Negara	118,26	118,26	118,26	-	-	118,26	118,26	118,26	121,61	121,61
Jalan Provinsi	63,50	58,10	58,10	-	-	65,29	58,10	58,10	65,29	65,29
Jalan Kabupaten	521,69	489,78	507,16	533,09	568,12	904,42	904,12	904,12	904,13	904,13
Total	**703,45**	**666,14**	**683,52**	**533,09**	**568,12**	**1.087,96**	**1.080,48**	**1.080,48**	**1.091,03**	**1.091,30**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong

Tabel 2.66
Jenis dan Panjang Jalang di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

Keadaan Jalan	2013			2014			2015			2016			2017		
	Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)		
	Nas	Prov	Kab	Nas	Prov	Kab	Nas	Prov	Kab	Nas	Prov	Kab	Nas	Prov	Kab
Jenis Permukaan															
Aspal	118,26	58,1	519,71	118,26	58,1	532,28	118,26	58,10	544,52	-	-	549,21	-	-	519,70
Kerikil	-	-	277,59	-	-	267,35	-	-	257,88	-	-	248,02	-	-	43,82
Tanah	-	-	107,11	-	-	104,48	-	-	101,73	-	-	104,93	-	-	177,22
Tidak Diperinci	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kondisi Jalan															
Baik / Mantap	118,06	52,4	514,39	-	-	489,78	118,26	58,10	507,16	-	-	533,09	-	-	568,26
Sedang	-	2,5	114,33	-	-	126,07	-	-	145,75	-	-	136,82	-	-	137,82
Rusak Ringan	-	3,2	155,36	-	-	148,32	-	-	121,40	-	-	104,40	-	-	73,85
Rusak Berat	0,2	-	114,68	-	-	139,95	-	-	129,81	-	-	128,81	-	-	124,19

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong

b. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Sedangkan rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Dari tabel di bawah diketahui bahwa panjang seluruh saluran adalah 71.316 meter, sedangkan luas lahan budidaya pertanian menurut RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 adalah 55.587 Ha, maka rasio jaringan irigasi adalah 4,60. Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.

Tabel 2.67
Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jaringan primer	190	190	190	190	190
2.	Jaringan sekunder	40.821	45.016	48.221	55.480	63.570
3.	Jaringan tersier	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556
4.	Persentase sarana dan prasarana pengairan dalam kondisi baik	34	40	61,91	65,74	68,03

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2018

Tabel 2.68
Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Jenis Sarana Irigasi	2013			2014			2015			2016			2017		
	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak
Saluran Pasangan Batu (m)	34,04	2,05	4,62	31,96	12,62	8,19	39,75	13,22	8,19	48,73	12,62	8.20	58,62	12,62	8,20
Bendung (unit)	12	6	4	12	6	4	12	6	4	13	6	3	13	6	3
Pintu Air (unit)	16	12	3	60	39	4	70	39	4	77	39	4	82	39	3
Jalan Inspeksi (m)	94,71	2,05	132	116,52	2,05	1,25	123,46	2,05	1,25	130,26	1,95	1,25	133,52	1,95	1,25
Saluran Pembuang (m)	21,62	2,18	9,10	34,20	24,71	16,35	42,77	24,71	8,70	47,77	24,71	16,35	47,77	24,71	16,35
Box Pembagi (unit)	37	41	4	37	41	4	37	41	4	37	41	4	37	41	4
Polder (m)	16,87	2,42	2,30	17,09	6,47	4,65	17,09	6,47	4,65	17,09	6,47	4,65	22,63	3,19	2,39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, 2018

Sedangkan rasio jaringan irigasi secara perwilayahan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.69
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Banua Lawas	0	0	0	0	4.865	0
2	Bintang Ara	0	0	0	0	193	0
3	Haruai	0	5.949	300	6.249	950	6,58
4	Jaro	50	30.484	1.856	32.390	1.256	25,79
5	Kelua	0	0	0	0	1.999	0
6	Muara Harus	0	0	0	0	749	0
7	Muara Uya	0	5.128	550	5.678	865	6,56
8	Murung Pudak	0	2.047	0	2.047	264	0
9	Pugaan	0	0	0	0	1.269	0
10	Tanjung	0	10.293	4.850	15.143	1.008	15,02
11	Tanta	100	2.206	0	2.306	1.547	1,49
12	Upau	40	7.463	0	7.503	543	13,82
Jumlah		**190**	**45.016**	**7.556**	**71.316**	**15.511**	**4,60**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, 2018

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang terbuat bukan dari tanah. Jumlah rumah layak huni dari tahun 2013 hingga tahun 2017 meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana sanitasi dan air bersih yang baik. Pada tahun 2013 jumlah rumah layak huni sebesar 32.622 rumah, tahun 2014 bertambah menjadi sebesar

33.679 rumah, kemudian cukup meningkat drastis di tahun 2017 menjadi sebesar 40.067 buah rumah.

Tabel 2.70
Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Rumah (buah)	Jumlah Rumah Layak Huni/Rumah Kategori Sehat (buah)
1	2013	64.720	32.622
2	2014	65.768	33.679
3	2015	66.500	35.236
4	2016	67.445	37.379
5	2017	68.397	40.067

Sumber: Data diolah

b. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Tabalong masih sangatlah penting dalam rangka mendukung program masyarakat yang sehat. Khususnya di pedesaan, masyarakat masih rendah kesadarannya terhadap air bersih serta masih rendahnya pula sarana dan prasarana air bersih yang dibangun di pedesaaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong. Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (persen)	-	97,36	97,4	97,47	97,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel di atas, rumah tangga pengguna air di Kabupaten Tabalong pada tahun 2014 sebesar 97,36 persen, di tahun 2015 meningkat 0,04 persen menjadi 97,4 persen dan di tahun 2016 meningkat 0,07 persen menjadi 97,47 persen kemudian di tahun 2017 menjadi 97,73 persen atau meningkat sebanyak 0,26 persen.

c. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya. Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (persen)	97,05	95,65	95,48	98,75	99,98

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 sebesar 97,05 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 menjadi 95,48 persen, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga menjadi 98,75 persen dan di tahun 2017 semakin meningkat hampir 100 persen yaitu 99,98 persen.

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan dikalikan 100%. Rumah tangga beersanitasi di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Rumah Tangga Bersanitasi
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Bersanitasi (persen)	92,90	92,56	93,10	95,71	96,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel di atas, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 sebesar 92,90 persen, di tahun 2014

mengalami penurunan menjadi 92,56 persen dan tahun 2015 sampai 2017 selalu meningkat hingga sebesar 96,01 persen di tahun 2017.

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/mata air, dan Pemakaman) dan RTH privat (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; taman atap bangunan).

Berdasarkan aspek pelayanan umum, indikator kinerja pembangunan daerah untuk penataan ruang dilihat dari rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dimana untuk Kabupaten Tabalong ruang terbuka hijaunya terdiri atas:

1. Kawasan hutan kota seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang berada di Bataman Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak.
2. Kawasan taman kota, taman lingkungan kantor Pemerintah Daerah dan gedung Sarabakawa seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Kelurahan Tanjung.
3. Kawasan taman kota seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar yang berada di komplek Pertamina Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak.
4. Lapangan golf Murung Pudak seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar di Kecamatan Murung Pudak.
5. Pembangunan Tanjung City Centre (TCC) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak.

6. Taman terminal regional seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
7. Taman lingkungan Islamic Centre di Maburai Kecamatan Murung Pudak seluas 6 (enam) Hektar.
8. Kawasan tempat wisata Danau Tanjung Puri seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Murung Pudak.
9. Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di Kelurahan Tanjung dan Jangkung Kecamatan Tanjung dan Kelurahan Belimbing, Belimbing Raya, Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
10. Taman di lingkungan rumah jabatan bupati, GOR dan stadion Pembataan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.
11. Penanaman pohon-pohon yang diwajibkan pada komplek-komplek perumahan dengan luas total kuang lebih 7 (tujuh) hektar.

Tabel 2.74
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong
Tahun 2017

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	121,097
2	Luas wilayah Perkotaan	4.814
3	Rasio	1:39,75

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Jadi ruang terbuka hijau yang harus ada di luas wilayah perkotaan Kabupaten Tabalong adalah 962,8 hektar sedangkan rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Tabalong yaitu 1:39,75.

2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Indikator urusan wajib ini diantaranya adalah jumlah polisi pamong praja, jumlah linmas, dan pos kamling. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

a. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk diharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah Sumber Daya Aparatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Kabupaten Tabalong merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengedalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas. Berikut ini merupakan tabel informasi rasio jumlah Linmas

per 10.000 penduduk di Kabupaten Tabalong dalam rentang tahun 2013 hingga 2017. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Rasio Jumlah Linmas
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Linmas	1.430	2.638	2.638	2.638	2.638
2	Jumlah penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
3	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	61,7	111,9	110,1	108,3	106,8

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabalong, 2018

Adapun kegiatan perlindungan terhadap masyarakat oleh Linmas pada tahun 2013 sebesar 61,7 persen, di tahun 2014-2017 mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sedang jumlah linmas tidak bertambah dimana ring rasio linmas dari 110,1 persen menjadi menjadi 106,8 persen. Ini menandakan tidak adanya penambahan linmasnya. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Pol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Pol PP pada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat dari rasio Pol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikan kepastian tentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan trantibum dan penegakan Perda, dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Rasio polisi pamong praja dari tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan terutama pada tahun 2017. Hal ini dapat dikatakan bahwa kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah polisi pamong praja	73	73	75	75	86
2	Jumlah penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
3	Rasio jumlah polisi	3,15	3,10	3,13	3,08	3,48

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	pamong praja per 10.000 penduduk					

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Berdasarkan tabel di atas, rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 sebear 3,15 persen, di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3,10 persen, tahun 2015 naik menjadi 3,13 persen, di tahun 2016 menurun menjadi 3,08 persen dan 2017 meningkat kembali menjadi 3,48 persen.

c. Rasio Pos Kamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling digunakan untuk melihat perkembangan sejumlah pusat pengamanan sosial masyarakat. Pos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalah kelembagaan sosial terbawah yang lahir dari inisiatif masyarakat untuk menciptakan keamanan lingkungan secara bottom up. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan di Kabupaten Tabalong. Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Rasio Pos Kamling Per Jumlah
Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Poskamling	585	585	585	585	590
2	Jumlah Desa/Kelurahan	131	131	131	131	131

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Rasio Pos Kamling per jumlah Desa/Kelurahan	4,47	4,47	4,47	4,47	4,50

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Berdasarkan tabel di atas, rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 -2017 sebesar 4,47 – 4,50 artinya setiap desa/kelurahan memiliki Poskamling antara 4 sampai dengan 5 Poskamling.

d. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah yang mendukung kegiatan perizinan yang ada di Kabupaten Tabalong berstatus “Ada”.

2.3.1.6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

a. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan

Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari masalah PMKS. Masalah kesejahteraan sosial sendiri bisa diartikan sebagai kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Tabalong yaitu fakir miskin, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2017 jumlahnya mencapai 19.125 orang. PMKS yang terbanyak ditemukan antara lain keluarga fakir miskin yaitu sebanyak 15.000 orang dan lanjut usia terlantar yaitu sebanyak 1.134 orang. Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Berbagai jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Balita Terlantar (0-4 th)	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar (5-18 th)	618	618	448	442	401
3	Anak Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah	-	-	-	7	8
4	Anak Nakal	-	-	-	14	14
5	Anak Jalanan	-	-	-	-	-
6	Anak Cacat (0-18 tahun)	20	20	50	55	70
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.008	1.008	992	972	815
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
9	Lanjut Usia Terlantar (60 th ke atas)	375	375	506	506	1.134
10	Lanjut Usia Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-
11	Penyandang Cacat (19 th keatas)	1.067	1.067	1064	1062	1.001
12	Penyandang Cacat Eks. Penderita Kronis (19 th ke atas)	62	62	25	25	50
13	Tuna Susila	-	-	-	-	-
14	Pengemis	-	-	-	-	-
15	Gelandangan	-	-	-	-	-
16	Bekas Narapidana	301	311	296	250	60
17	Korban Penyalahgunaan Napza/HIV Aids	43	43	15	13	14
19	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	595	590	566	554	283
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-
21	Komunitas Adat Terpencil	110	110	45	30	45
22	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	131	131	131	131	131
23	Korban Bencana Alam	30	25	40	663	24
24	Korban Bencana Sosial/ Pengungsi	72	70	64	36	75
25	Pekerja Migran Terlantar	-	-	-	-	_
26	Keluarga Rentan	-	-	-	-	_
27	Keluarga Fakir Miskin	14.305	14.710	15.710	15.400	15.000
JUMLAH TOTAL		**18.737**	**19.140**	**19.952**	**20.160**	**19.125**

b. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dihitung dari Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dibagi dengan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dikalikan 100. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	40	40	50	60	85

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 40 persen, di tahun 2015 meningkat menjadi 50 persen, tahun 2016 meningkat menjadi 60 persen dan tahun 2017 meningkat tajam menjadi 85 persen.

c. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap

sesama. Terdapat berbagai macam sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Persentase Sarana Sosial di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi	3	3	12	12	10

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan tabel di atas, sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 3 buah, tahun 2015 dan 2016 sebanyak 12 buah dan tahun 2017 sebanyak 10.

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

a. Persentase Keselamatan dan Perlindungan

Aspek keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek ini juga merupakan jaminan untuk meningkatan produktivitas

kerja. Maksud dari memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan kepada tenaga kerja adalah tidak lain untuk memberikan kenyamanan dalam lingkungan kerja dan kewajiban peruasahaan untuk memenuhi hak-hak pekerjanya. Jaminan keselamatan dan perlindungan tertuang di dalam instrumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Instrument ini melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakan kerja.

b. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Analisis peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan terhadap tingkat kelulusan pada S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang berusia produktif.

Tabel 2.81
Rasio Lulusan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	281	309	317	348	359

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka (data diolah), Tahun 2015

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2017 sebanyak 2.448 orang dari 4.672 jumlah PNS di Tabalong. Sebagian besar perempuan yang bekerja di Pemerintah Daerah adalah sebagai guru dan PNS Struktural dan Staf. Pada tahun tahun 2013 sebesar 50,58, dan 2017 menjadi 52,40 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS)
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017

No	Instansi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PNS Struktural dan Staf	536	531	589	566	593
2	Medis dan Paramedis	433	451	445	430	428
3	PPL dan PPS	18	18	15	15	15
4	Instruktur BPK, Auditor, Funsional Kehutanan, Penyuluh KB dan Fungsional lainnya	62	60	50	50	46

No	Instansi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Guru TK	175	172	170	168	168
6	Guru SD	840	828	924	889	862
7	Guru SLTP	356	351	331	324	318
8	Guru SLTA	245	254	260	0	0
9	Penjaga Sekolah	0	0	0	0	0
10	Tata Usaha SLTP	18	19	19	19	18
11	Tata Usaha SLTA	6	6	6	0	0
Jumlah		**2.727**	**2.689**	**2.809**	**2.461**	**2.448**
Jumlah PNS Seluruhnya		**5.473**	**5.316**	**5.446**	**4.779**	**4.672**
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		**50,58**	**50,89**	**51,58**	**51,50**	**52,40**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong, Tahun 2017

b. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.83
Rasio KDRT di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KDRT	9	8	7	2	2
2	Jumlah Rumah Tangga	63.238	66.480	68.537	70.664	71.534
3	Rasio KDRT	0,014	0,012	0.010	0.009	0,002

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Rasio KDRT di Kabupeten Tabalong mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana di tahun 2013 sebesar 0,014 persen, dan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,002 persen.

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tabalong menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tabalong. Pada tabel dibawah dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun awal periode sampai akhir periode mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Kabupaten Tabalong yang bekerja atau aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.84
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	63,85	64,00	65,00	65,50	61,35

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupeten Tabalong mengalami peningkatan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dimana tahun 2013 sebesar 63,85 persen, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 menjadi 65,50 persen, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan hingga menjadi 61,35 persen.

d. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Beberapa indikator yang digunakan untuk memberi gambaran perkembangan gender di Tabalong antara lain Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya berupa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Status menuju Kabupaten Layak Anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Sementara, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Data tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 65,89. Angka ini lebih rendah dari IDG Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 64,35 pada tahun yang sama. Sementara itu, IPG Kabupaten Tabalong pada tahun 2017

sebesar 85,15. Angka ini lebih rendah dari IPG Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 88,60 pada tahun yang sama.

Tabel 2.85
IDG, IPG dan Status Kota Layak Anak
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	- Kab. Tabalong	65,89	67,54	71,62	69,03	70,77
	- Prov. Kalsel	64,35	68,40	66,22	70,05	69,33
2	Indeks Pembangunan gender (IPG)					
	- Kab. Tabalong	83,27	84,49	84,76	84,80	85,15
	- Prov. Kalsel	88,33	88,33	88,46	88,55	88,60
3	Status Kota Layak Anak	N/A	N/A	Rintisan	Rintisan	Pratama

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong, 2017

Indikator status kota layak anak merupakan kota dengan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kabupaten Tabalong pada tahun 2014 menyandang sebagai status kota layak anak Rintisan, artinya Kabupaten Tabalong masih harus berkomitmen menuju kota layak anak.

2.3.1.9. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi isu penting dalam setiap pembangunan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus bisa diwujudkan. Beberapa indikator yang menjadi acuannya adalah rasio ketersediaan pangan, skor pola pangan harapan dan penguatan cadangan pangan. Berikut adalah data perkembangan indikator pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017.

Tabel 2.86
Perkembangan Indikator Pangan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan energi (orang/hari)					
	- energi (kkl)	n/a	n/a	3.496	4.487	3.840
	- Protein (gr)	n/a	n/a	153,55	574,71	108,24
2	Ketersediaan Pangan utama (ton)	n/a	n/a	51.924,6	73.331,0	87.975,6
3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	n/a	5.00	6.25	7.50	8.50
4	Skor Pola Pangan Harapan	n/a	85.1	86.9	87.6	89.1
5	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	n/a	9.16	6.87	5.34
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	n/a	n/a	n/a	15	13.5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong

Ketersediaan energi yang ada di Kabupaten Tabalong sudah memenuhi standar kecukupan, dimana kebutuhan per hari sebesar 2.250 kilo kalori/orang, sedangkan ketersediaan energi Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 sebanyak 3.840 kilo kalori/orang/per hari. Disamping itu, kebutuhan protein pun telah memenuhi kebutuhan minimal (56 gr/hari), sehingga skor pola pangan harapan Kabupaten Tabalong tahun 2017 mencapai 89.1%.

Meskipun secara jumlah ketersediaan pangan mengalami surplus, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menangani 5.34% desa yang rentan pangan. Desa rentan pangan tersebut diindikasikan dengan penduduk dengan status kesejahteraan yang rendah, yaitu desa-desa di Kecamatan Banua Lawas, Pugaan dan Muara Uya.

2.3.1.10. Pertanahan

Kepemilikan lahan dapat berupa: Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Indikator terkait pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Informasi mengenai indikator pertanahan yang dapat disajikan meliputi luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian ijin lokasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Perkembangan Indikator Pertanahan
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepemilikan Lahan (Ha)					
	a. Hak Milik	456	152,86	517,77	139,37	548,82
	b. Hak Guna Usaha	-	-	-	-	22,14
	c. Hak Guna Bangunan	17	60,57	14,53	6,76	8,71
	d. Hak Pakai	10	10,23	39,07	25,46	8,26
	e. Hak Pengelolaan Lahan	-	-	-	-	-
	f. Hak Wakaf	2	-	-	-	0,04
2	Luas Lahan Bersertifikat	484	223,66	587,86	177,94	579,71
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	14	36,95	28,71	12,64	13,3

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, 2017

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan/rencana/program harus mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalamnya. Beberapa hal yang biasanya terkait dengan masalah lingkungan hidup adalah penanganan sampah, ketersediaan untuk mengakses air minum, tingkat kualitas air, tingkat kualitas udara dan tutupan lahan.

a. Persentase Penanganan Sampah

Pelayanan pengelolaan persampahan saat ini sebagian besar baru wilayah perkotaan yang terlayani secara kontinue yang meliputi kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, dengan sumber dari sampah pemukiman, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah perkantoran dan sampah hasil penyapuan jalan.

Penangangan sampah di wilayah utara dan selatan yang baru ditangani adalah sampah pasar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, dana dan armada angkutan yang sangat minim dibandingkan volume timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari yang jumlahnya begitu besar. Disamping itu masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sedangkan jumlah volume sampah dan produksi sampah di Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Persentase Penanganan Sampah
Tahun 2013-2017 Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m^3/hari)	179,6	179,6	179,6	179,5	179,5
2.	Jumlah volume produksi sampah (m^3/hari)	579	589	551	520	539
3.	Persentase penanganan sampah	31	30,5	32,5	34,5	44,49

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong

Penanganan sampah di Kabupaten Tabalong menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari sampah yang tertangani pada tahun 2013 sebanyak 31 persen, meningkat terus mencapai 44,49 persen pada tahun 2017. Perihal penanganan sampah masih sangat rendah, yaitu pada kisaran dibawah 45 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Rasio fasilitas tempat pembuangan sampah per satuan penduduk dan secara kewilayahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.89
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah TPS	57	57	57	56	60
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	179,60	179,60	179,60	179,50	187,50
3.	Jumlah Penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah Penduduk	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong

Bila ditinjau menurut kecamatan, maka data tahun 2017 menunjukkan bahwa Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki TPS. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk di kedua kecamatan tersebut.

Tabel 2.90
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Daya Tampung (Ton)	
1.	Banua Lawas	19.947	1	4	0,02
2.	Bintang Ara	8.999	0	0	0
3.	Haruai	22.756	3	10	0,04
4.	Jaro	16.274	4	21	0,12
5.	Kelua	25.497	4	30	0,11
6.	Muara Harus	6.607	0	0	0
7.	Muara Uya	24.489	5	21,5	0,08
8.	Murung Pudak	51.149	19	38,5	0,08
9.	Pugaan	7.227	0	0	0
10.	Tanjung	36.753	23	61	0,16
11.	Tanta	19.476	0	0	0
12.	Upau	7.932	1	1,5	0,02
Jumlah		**247.106**	**60**	**187,5**	**0,08**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Akses air minum merupakan kebutuhan primer masyarakat. Semakin tinggi akses penduduk terhadap air minum maka semakin baik tingkat pelayanan daerah terhadap kebutuhan primer masyarakat. Berikut adalah data persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.91
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2013-2017 di Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	161.021	164.289	96.546	112.956	132.161
2.	Jumlah penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	69,49	69,67	40,29	46,39	53,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan website Kabupaten Tabalong

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2013 sebesar 69,49 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 40,29 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 46,39 persen dan 53,48 persen. Meskipun meningkat, akses penduduk terhadap air minum ini harus terus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.92
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Sumber Air Minum	Persentase				
	2013	2014	2015	2016	2017
Air kemasan / Isi Ulang	22,93	24,00	22,75	30,12	28,25
Leding	28,72	23,70	24,69	21,48	23,90
Pompa	4,76	6,87	6,16	2,13	4,62
Sumur terlindung	11,00	10,48	8,81	11,98	15,63
Sumur tak terlindung	16,54	17,06	26,49	23,63	15,82
Mata air	2,08	4,63	3,31	3,17	3,83
Air sungai dan lainnya	13,97	13,24	7,78	7,49	7,95
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

c. Kualitas/Mutu Air Sungai

Indeks pencemaran air sungai adalah salah satu parameter dalam pengukuran indikator kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang merupakan alat untuk mengukur kualitas atau kondisi lingkungan hidup disuatu daerah. Berdasarkan Hasil perhitungan menggunakan metode IP (Indeks Pencemaran) dan metode STORET, maka dapat di rekapitulasikan status mutu sungai di Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

Tabel 2.93
Status Mutu Sungai Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 menurut metode Indeks Pencemaran (IP)

Titik Pantau	Peruntukkan	Periode I		Periode 2		Periode 3	
	Kelas	PI	Status	PI	Status	PI	Status
Sungai Tabalong Bagian Hulu Titik 1	ii	3,0	ringan	3,0	ringan	3,1	ringan
Sungai Tabalong Bagian Hulu Titik 2	ii	5,3	sedang	3,0	ringan	3,0	ringan
Sungai Tabalong Bagian Tengah	ii	7,8	sedang	8,5	sedang	3,7	ringan
Sungai Tabalong Bagian Hilir Titik 1	ii	3,1	ringan	3,1	ringan	3,0	ringan
Sungai Tabalong Bagian Hilir Titik 2	ii	3,0	ringan	3,0	ringan	3,1	ringan
Sungai Mangkusip Bagian Hulu	ii	3,7	ringan	3,7	ringan	3,7	ringan
Sungai Mangkusip Bagian Tengah	ii	3,1	ringan	3,1	ringan	3,0	ringan
Sungai Mangkusip Bagian Hilir	ii	3,1	ringan	3,0	ringan	3,0	ringan
Sungai Jaing Bagian Hulu	ii	3,0	ringan	3,0	ringan	3,0	ringan
Sungai Jaing Bagian Tengah	ii	7,8	sedang	3,0	ringan	3,0	ringan
Sungai Jaing Bagian Hilir	ii	3,0	ringan	0,0	memenuhi	3,0	ringan
Sungai Tab. Kanan Bag. Hulu	ii	3,0	ringan	3,0	ringan	3,0	ringan
Sungai Tab. Kanan Bag. Tengah I	ii	3,1	ringan	4,2	ringan	12,1	berat
Sungai Tab. Kanan Bag.	ii	3,1	ringan	4,2	ringan	11,4	berat

Titik Pantau	Peruntukkan	Periode I		Periode 2		Periode 3	
	Kelas	PI	Status	PI	Status	PI	Status
Tengah II							
Sungai Tab. Kanan Bag. Hilir	ii	3,2	ringan	7,7	sedang	9,5	sedang
Sungai Tab. Kiwa Bag. Hulu	ii	7,1	sedang	11,0	berat	9,5	sedang
Sungai Tab. Kiwa Bag. Tengah	ii	6,4	sedang	4,2	ringan	12,9	berat
Sungai Tab. Kiwa Bag. Hilir	ii	3,4	ringan	10,2	berat	13,1	berat
Sungai Jangkung	ii	7,5	sedang	7,8	sedang	7,8	sedang
Sungai Hanyar	ii	3,1	ringan	8,9	sedang	7,8	sedang

Sumber data : diolah, 2018

Pemantauan kualitas air sungai di Tahun 2018 dilakukan terhadap 7 (tujuh) sungai yang dianggap prioritas di Kabupaten Tabalong, pemantauan dilaksanakan dengan frekuensi 3 (tiga) kali dalam satu tahun dengan jumlah titik lokasi pemantauan sungai sebanyak 20 (dua puluh) titik yaitu Sungai Tabalong (Hulu, Tengah dan Hilir), Sungai Mangkusip (Hulu, Tengah dan Hilir), Sungai Jaing (Hulu, Tengah dan Hilir), Sungai Tabalong Kanan (Hulu, Tengah dan Hilir), Sungai Tabalong Kiwa (Hulu, Tengah dan Hilir), Sungai Hanyar dan Sungai Jangkung. Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat direkapitulasikan nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut.

Tabel 2.94
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

No.	Status Mutu Air	Jumlah Titik Sampel Memenuhi Mutu	Persentase Pemenuhan Mutu	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Permutu Air
1.	Memenuhi BM	39	0,68	70	47,89
2.	Ringan	18	0,3157894	50	15,7894736
3.	Sedang	0	0,00	30	0,00
4.	Berat	0	0,00	10	0
	TOTAL	57			**63,68**

Sumber data : diolah, 2018

Atas hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) seperti diatas maka didapat nilai Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) sebesar 63,68, dengan melakukan normalisasi dari rentang nilai 0 % - 100 % (terbaik – terburuk) jumlah sampel dengan nilai 5 < PI ≤ 10 dari nilai Indeks dalam skala 0 – 100 (terburuk – terbaik) sehingga nilai 63,68 menggambarkan kondisi cemar ringan.

Tabel 2.95
Klasifiksi Indeks Kualitas Air

Rentang Nilai	Kategori
X >= 70	Baik
50<X<70	Cemar Ringan
30<X<50	Cemar Sedang
10<X<30	Cemar Berat

Sumber data : Kementerian Lingkungan Hidup, 2017

2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

a. Penduduk yang Memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat

digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia >17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus formula jumlah penduduk usia>17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah. Status kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96
Status Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penduduk ber-KTP yang telah mempunyai NIK (persen)	79,08	83,27	92,18	85,11	94,66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Persentase penduduk ber-KTP yang telah mempunyai NIK pada tahun 2013 sebesar 79,08 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 92,18 persen. Meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2016, namun meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 94,66 persen.

b. Penduduk Berakte Kelahiran

Pentingnya akta kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

Akta kelahiran mempunyai manfaat yang besar serta kegunaan dari sebuah akte kelahiran ini di kemudian hari. Hasil kinerja Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat mengenai data kepemilikan akta kelahiran yang diterbitkan sebagai berikut:

Tabel 2.97
Status Kepemilikan Akte Kelahiran
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	0,887	0,862	0,848	0,800	0,871

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2013 sebanyak 0,887 persen, tahun 2017 menurun menjadi 0,871 persen.

c. Pasangan Berakte Nikah

Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang diakui sah oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah juga dapat memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Indikator ini dihitung dengan rumus formula jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Status Kepemilikan Akta Nikah
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase kepemilikan akta perkawinan	96,38	96,32	90,51	96,27	96,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persentase kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 sebesar 96,38

persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi 90,51 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2016, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 96,22 persen.

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Database merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan database akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari atau menganalisis data kependudukan. Selama ini banyak pemerintah daerah belum mempunyai database kependudukan yang baik sehingga mengalami kesulitan apabila ingin melakukan analisis. Ketersediaan database kependudukan di Kabupaten Tabalong berstatus "Ada" mulai awal periode 2013 sampai tahun 2017.

Tabel 2.99
Ketersediaan Database
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pengolahan data sistem administrasi kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2018

e. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku

sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan diketahui telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK, sehingga hal ini diharapkan akan memudahkan dalam proses administrasi kependudukan secara nasional. Untuk penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun berstatus "Sudah".

Tabel 2.100
Status Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pengangguran. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten

Tabalong mulai awal periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berjumlah 131 kelompok.

Tabel 2.101
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok Binaan LPM	131	131	131	131	131

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong, 2018

b. Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan Lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma atau sejenis lainnya. Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Untuk menghitung jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi,

golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK. Jumlah kelompok binaan PKK yang ada di Kabupaten Tabalong dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 6.810 kelompok.

Tabel 2.102
Jumlah Kelompok Binaan PKK
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok Binaan PKK	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong, 2018

c. Jumlah LSM Yang Aktif

Jumlah LSM yang aktif di Kabupaten Tabalong sampai tahun 2017 berjumlah 33 LSM.

Tabel 2.103
Jumlah LSM Yang Aktif
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LSM Yang Aktif	35	35	34	34	33

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong, 2018

d. Jumlah PKK

Jumlah PKK yang ada di Kabupaten Tabalong mulai awal periode tahun 2013 sampai dengan akhir periode tahun 2017 berjumlah 155 PKK.

Tabel 2.104
Jumlah PKK Aktif
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK (%)	155	155	155	155	155

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong, 2018

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu program keluarga bertujuan utuk mem- bangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik. Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena realisasi capaian belum mencapai target.

a. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta

KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

Tabel 2.105
Cakupan Peserta KB Aktf
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pasangan Usia Subur	46.480	48.204	49.008	47.479	47.478
Jumlah Peserta KB aktif	38,778	41.305	39.856	38.264	37.875
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	82,79	85,69	81,33	80,59	79,77

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2014 mengalami peningkatan dari 82,79 persen meningkat menjadi 85,69 persen pada tahun 2015 -2017 mengalami penurunan dari 81,33 persen menjadi 79,77 persen.

2.3.1.15. Perhubungan

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastuktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Tabalong saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten.

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal

barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya.

Dari sisi transportasi jalan raya, Akses dari dan ke wilayah Kabupaten Tabalong dengan menggunakan jaringan transportasi darat dapat dilalui dari tiga arah yaitu; (1) dari arah selatan yang merupakan lalu-lintas dari Kota Banjarmasin dan wilayah sekitarnya; (2) dari arah Barat yang merupakan lalu-lintas dari Kota Amuntai dan Kota Tamiyang Provinsi Kalimantan Timur; (3) dari arah utara yang merupakan lalu-lintas dari Kota Balikpapan dan Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur.

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Tabalong meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek.

Tabel 2.106
Pelayanan dan Fasilitas Perhubungan Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Terminal yang Dioperasikan	3	3	3	3	3
2.	Jumlah Bengkel Umum yang Berstandar	2	14	15	15	16

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Cakupan Pelayanan Perparkiran	6 Lokasi / 55%	6 Lokasi / 55%	6 Lokasi / 55%	6 Lokasi / 55%	6 Lokasi / 55%
4.	Jumlah Angkutan Umum	431	381	245	209	173
	a. AKBD	275	223	178	143	118
	b. Angkutan Kota	3	8	13	18	23
	c. Angkutan Perbatasan	0	0	0	0	0
	d. AKAP	75	78	54	48	32
	e. Angkutan Desa	78	72	0	0	0
5.	Jumlah Rambu yang Terpasang	619 Buah	859 Buah	1189 Buah	1369 Buah	1383 Buah
6.	Cakupan Marka dan Zebracross	7.913 m^2	9.688 m^2	12.273, 16 m^2	2.198 m^2	3.263 m^2
7.	Jumlah Pagar Pengaman Jalan	0 Buah	0 Buah	10 Buah	10 Buah	18 Buah
8.	Jumlah Unit Satuan Pengawasan	1 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit
9.	Rasio Jumlah Kendaraan Layak Jalan terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	15/4336	14/4698	14/4761	14/6952

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tabalong

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah armada di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sampai 2017 semakin menurun dari 431 armada menjadi 173 armada, dikarenakan banyaknya jumlah angkutan yang berubah klasifikasinya menjadi angkutan sewa atau carter. Di samping itu kurang disiplinnya para pemilik armada untuk mengurus ijin trayeknya.

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Penduduk Menggunakan Alat Telekomunikasi

Jumlah penduduk yang menggunakan handphone selama lima tahun terakhir di Tabalong mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penduduk yang menggunakan handphone sebanyak 53,78 persen dan meningkat menjadi 70,41 persen pada Tahun 2017. Hal ini terjadi

dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alat komunikasi tersebut.

Tabel 2.107
Jumlah Penduduk Menggunakan Handphone
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk menggunakan handphone	53.78	51.56	62.55	64.01	70.41

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2017

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Berikut perkembangan jumlah koperasi dan persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.108
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi Aktif (unit)	60	60	73	77	78
2	Jumlah koperasi (unit)	80	87	97	99	99
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	75	68,96	69,02	69,54	78,00

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong, 2018

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tabalong cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan persentase koperasi aktif (koperasi yang sudah melaksanakan RAT) mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 juga mengalami tren peningkatan. Hal tersebut menunjukan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan persentase koperasi aktif.

b. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UKM sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tabalong berperan besar dalam menopang pondasi perekonomian daerah sehingga UKM perlu dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan UKM di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Jumlah UKM non BPR/LKM
Kabupaten Tabalong Tahun 2013- 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah seluruh UKM	55.079	55.194	56.794	53.481	53.476
2.	Jumlah BPR/LKM	3/1	3/1	3/-	3/-	3/-
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	53.615	53.482	53.490	53.512	53.476
4.	Pertumbuhan UKM	2.37	0.21	2.90	-5.83	-0.01

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong, 2018

Jumlah UKM sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yaitu dari 55.079 unit menjadi 53.476 unit. Hal ini disebabkan oleh kekurangan modal dan keterbatasan akses pemasaran. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah UKM non BPR/LKM. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 jumlah BPR berjumlah 3 unit dan jumlah LKM berjumlah 1 unit sehingga jumlah BPR dan LKM sebanyak 4 unit.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang

dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Di Kabupaten Tabalong hanya ada 3 (tiga) investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sudah beroperasi yaitu industri crumb rubber, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Berikut jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.110
Jumlah Investor Berskala Nasional
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	252	465	437	571	308
2	Jumlah investor berskala nasional PMA	1	2	2	1	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong, Tahun 2018

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolok ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian

daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Berikut besaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.111
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (Rp.)	245.264.474.202	548.990.817.891	302.473.032.545	247.622.605.458	1.126.911.437.843
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA (U$)	1.100.000	203.814.944	323.195.000	560.000.000	469.614.898

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong, Tahun 2018

Semakin banyaknya nilai investasi maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberikan fasilitas penunjang bagi investor untuk memberikan investasi yang telah direncanakan. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama tahun 2013 sebesar

Rp. 245.264.474.202 dan Penanaman Modal Asing sebesar U$ 1.100.000. Di tahun-tahun berikutnya investasi semakin meningkat, di mana pada tahun 2017 nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah Rp 1.126.911.437.843 dan Penanaman Modal Asing sebesar U$ 469.614.898.

Investasi yang diperlukan berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Investasi sektor pemerintah dilakukan dan dibiayai melalui APBD, sedangkan investasi sektor swasta bisa berupa Penanaman Modal Asing maupun penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Dalam perkembangannya investasi lebih banyak dipenuhi dari sektor swasta sedangkan sektor Pemerintah bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi swasta tersebut. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi suatu daerah maka diperlukan adanya investasi memadai dan berkelanjutan dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun.

Adapun untuk rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2014 sampai tahun 2016 tetap, yaitu sebesar 1 dibanding 2,5 orang. Rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN Dan PMA
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMDN dan PMA	23.411	27.329	27.576	24.694	23.551
2	Jumlah Seluruh PMDN dan PMA	229	267	293	309	295
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja(Rumus : Jumlah TK yang Bekerja Pada PMDN & PMA/Jumlah Seluruh PMDN & PMA)	102,23	102,36	94,12	79,92	79,83

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong, 2018

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan. Banyaknya organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan mencakup kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, fasilitasi kegiatan kepemudaan, bakti sosial bagi pemuda, penyuluhan pencegahan tentang bahaya narkoba dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

Pada tahun 2014 jumlah organisasi olah raga di Kabupaten Tabalong meningkat sangat tajam, yaitu menjadi 75 buah dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 buah. Demikian juga dengan kegiatan olah raganya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menggambarkan adanya kapasitas pemerintah

daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Tabel 2.113
Perkembangan Organisasi Olah Raga
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017

No	Kecamatan	Jumlah Organisasi Olah Raga				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jaro	2	2	2	2	2
2	Muara Uya	2	2	2	2	2
3	Haruai	2	2	2	2	2
4	Upau	2	2	2	2	2
5	Bintang Ara	2	2	2	2	2
6	Tanjung	24	24	24	24	24
7	Murung Pudak	24	24	24	25	25
8	Tanta	4	4	4	4	4
9	Muara Harus	3	3	3	3	3
10	Kelua	5	5	5	5	5
11	Banua Lawas	3	3	3	3	3
12	Pugaan	2	2	2	2	2
JUMLAH		**75**	**75**	**75**	**76**	**76**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong, 2018

2.3.1.20. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali

buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date.

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Tabalong. Output yang dihasilkan dan menjadi rutinitas setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Tabalong Dalam Angka (KDA) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) serta dokumen Indikator Makro Pembangunan serta Kecamatan Dalam Angka. Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

a. Buku Kabupaten Dalam Angka

Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan bahwa pengelolaan database wilayah berjalan dengan baik. Database dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana pengembangan wilayah dari berbagai sektor seperti misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya. Berikut ketersediaan dokumen buku kabupaten dalam angka di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.114
Ketersediaan Dokumen Perencanaan
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

b. Buku PDRB Kabupaten

Dokumen PDRB skala daerah, yaitu PDRB menurut lapangan usaha. Dokumen PDRB menurut lapangan usaha berisi data PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi (jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit-unit produksi). Karena publikasi PDRB tidak hanya satu tahun data, maka penghitungan publikasi dalam laporan ini didasarkan pada ketersediaan data yang ada, bukan pada tahun publikasinya. Berikut ketersediaan buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.115
Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

2.3.1.21. Kebudayaan

a. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong dimanfaatkan oleh kalangan seniman yang terdapat di Kabupaten Tabalong untuk memelihara budaya yang ada. Para pekerja seni yang ada di Kabupaten Tabalong umumnya mendirikan sanggar–sanggar seni sebagai wadah mengasah kemampuan seninya. Untuk menampung para pekerja seni tersebut, pemda Kabupaten Tabalong melaksanakan dan ikut serta sejumlah pagelaran seni. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	3	3	5	5	5

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong, 2018

Dari tabel diatas berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sampai 2014 berjumlah 3 kali, sedangkan di tahun 2015 sampai 2017 meningkat menjadi 5 kali.

b. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan	0	0	1	1	2

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong, 2018

Dari tabel diatas berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Tabalong tahun 2014 berjumlah 0 kali, sedangkan di tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 1 kali, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 2 kali.

2.3.1.22. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

a. Jumlah Perpustakaan

Di Kabupaten Tabalong jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah pada tahun 2013 sebanyak satu buah, baru pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 2 buah, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi 4 buah. Sedangkan jumlah perpustakaan milik swasta selalu meningkat setiap tahunnya di tahun 2012 berjumlah 33 buah, tahun 2013 berjumlah 47 buah, tahun 2014 dan 2015 berjumlah 89 buah, tahun 2016 berjumlah 91 buah, dan tahun 2017 berjumlah 139 buah. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Jumlah Perpustakaan Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	1	2	3	4	4
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	46	87	86	87	135
3	Total Perpustakaan (1+2)	47	89	89	91	139

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, 2018

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Banyaknya jumlah pengunjung perlu diiringi dengan banyaknya jumlah perpustakaan yang akan membantu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.

Data dibawah ini menunjukkan bahwa minat baca di Kabupaten Tabalong sudah semakin bagus, apalagi dilihat pada pengunjung perpustakaan swasta yang selalu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan jumlah perpustakaan dan pengunjungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	19.774	58.749	69.742	42.365	62.808
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik non Pemda	1.730	1.775	1.817	1.754	1.847
3	Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)	21.504	60.524	71.559	44.119	73.412

Sumber: Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Tabalong dari awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2013 berjumlah 21.504 pengunjung sedangkan di tahun 2015 meningkat menjadi 71.559 pengunjung. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 73,412 pengunjung.

2.3.1.23. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan arsip, baik dari segi tenaga maupun teknologi peralatannya. Cakupan pengelolaan arsip meliputi seluruh instansi pemerintah dan lembaga legislatif.

a. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di perangkat daerah. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Tabel 2.120
Jumlah SKPD yang telah dilakukan Penataan Arsip Dinamis
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SKPD yang telah dilakukan Penataan Arsip Dinamis	0	0	0	0	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tabalong, 2018

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Tabalong. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Peran sektor perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Tabalong sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya untuk mendukug pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapanga kerja serta mengurangi pengangguran.

Produksi perikanan di Kabupaten Tabalong hingga tahun 2017 meningkat dengan capaian produksi sebesar 106 %. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten surplus terhadap produksi perikanan, sehingga dapat menyuplai kebutuhan kabupaten di sekitarnya. Namun dilihati dari sisi angka konsumsi ikan (AKI) Kabupaten Tabalong yang terus meningkat, pencapaian ini belum menunjukkan peringkat yang baik. Angka konsumsi ikan Kabupaten Tabalong masih berada di bawah angka konsumsi ikan provinsi Kalimantan Selatan (AKI Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 sebesar 48.96).

Dalam produksi perikanan, Kabupaten Tabalong juga mengembangkan usaha budidaya sampingan dari usaha utama bercocok tanam padi di sawah atau yang dikenal dengan istilah minapadi. Eksistensi budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Seluruh kegiatan minapadi ada di Kecamatan Jaro sehingga produktivitas minapadi ini seluruhnya berasal dari Kecamatan Jaro.

Selanjutnya, dalam rangka pelestarian habitat lokal, Kabupaten Tabalong juga telah mengembangkan pembenihan ikan lokal, seperti gabus, betook, sepat siam, sepat rawa, toman, seluang, baung, biawan, kapar dan ikan bancir.

Disamping itu, untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor perikanan, Kabupaten Tabalong juga melakukan pengolahan hasil perikanan. Terdapat 8 kelompok pengolah yang menggunakan bahan

baku ikan. Realisasi sektor perikanan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Perkembangan Sektor Perikanan Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi perikanan (%)	154.9	132.1	113.6	98.6	106.0
2.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
3.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	62,84	62,85	64,70	70,50	70,79
4.	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	16.53	14.85	11.16	11.58	10.59
6.	Nilai tukar nelayan	107.8	108.16	110.1	109.39	109.39
7.	Produksi budidaya minapadi (ton)	28.6	32.58	49.35	52.9	69.4
8.	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan	5	6	9	9	8
9.	Jumlah ikan lokal yang dibudidaya	7	8	8	10	10
10.	Produksi ikan gabus (Ton)	251.3	251.9	236.5	173	179
11	Angka Konsumsi Ikan	41,21	42,41	44,12	44,27	45,23

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Tabalong, 2018

2.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarian seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabalong, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan rekreasi budaya.

Obyek wisata alam seperti air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Banua Lawas, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya, sampai sekarang belum dikelola secara profesional, sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Obyek wisata buatan seperti Tanjung Puri, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalang jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro serta tempat hiburan atau rekreasi budaya/religi

seperti Mesjid Pusaka Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas, Makam Syech Nafis di Kecamatan Kelua, Mesjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai, dan Pemukiman Suku Dayak di Kecamatan Tanta, juga mengalami nasib yang sama dengan obyek wisata alam.

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan Wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Tabalong sepanjang tahun 2017 diperkirakan sebanyak 180.148 wisatawan. Jumlah ini terdiri dari 215 wisatawan mancanegara dan 179.933 wisatawan domestik. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebaliknya terjadi peningkatan kunjungan dari wisatawan domestik. Secara keseluruhan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dari 138.868 wisatawan menjadi 180.148 wisatawan.

Tabel 2.122
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
Tahun 2013-2017

No.	Jumlah Wisatawan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Wisatawan Mancanegara	n/a	n/a	1.478	84	215
2.	Wisatawan Domestik	n/a	n/a	46.443	138.784	179.933
Jumlah		**n/a**	**47.328**	**47.921**	**138.868**	**180.148**

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tabalong

2.3.2.3. Pertanian

a. Peranan Sektor Pertanian terhadap PDRB

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat kontribusi sektor pertanian dari PDRB.

Pada tahun 2017 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11 persen. Sekitar 87,33 persen kategori ini disumbang oleh subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Kemudian diikuti oleh subkategori Perikanan sekitar 0,76 persen dan sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sekitar 1,91 persen.

Tabel 2.123
Peranan Pertanian terhadap PDRB Tahun 2013 – 2017

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa pertanian :					
	- tanaman pangan	88.98	89.14	88.27	87.53	87.33
	- tanaman hortikultura	25.77	25.65	26.3	28.5	29.25
	- perkebunan	0.33	0.35	0.4	0.44	0.43
	- peternakan	54.77	54.74	52.36	48.97	47.87
	- jasa pertanian	5.7	5.76	6.39	6.76	6.91
2	Kehutanan	1.64	1.87	2.03	2.07	2.12
3	Perikanan	2.21	2.12	2.13	2.07	1.91

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Selama periode tahun 2013-2017 terlihat bahwa peranan subkategori Pertanian cenderung menurun, sedangkan Perikanan memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam

periode lima tahun terakhir ini, dalam periode lima tahun terakhir ini, sub kategori Perikanan diperkirakan meningkat sebesar 1,95 persen dari tahun 2013.

b. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar adalah membandingkan antara produksi tanaman padi/bahan utama lokal lainnya (ton) dengan luas areal tanaman padi bahan pangan utama lokal lainnya (ha) dikalikan 100.

Tabel 2.124
Perkembangan Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya PerHektar Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Padi**					
	Produksi	152.773	152.773	89.336	124.267	131.638
	Luas Areal	32.997	32.997	22.627	25.718	28.617
	Produktivitas	4,63	4,63	4,00	4,83	4,60
2	**Jagung**					
	Produksi	1.199	1.199	582	319	4.694
	Luas Areal	403	403	194	119	1.341
	Produktivitas	2,97	2,97	3,00	2,68	3,50
3	**Ubi kayu**					
	Produksi	6.027	6.027	2030	402	158
	Luas Areal	420	420	140	28	11
	Produktivitas	14,35	14,35	14,50	14,36	14,35
4	**Ubi Jalar**					
	Produksi	1.002	1.002	525	10	31
	Luas Areal	96	96	50	1	3
	Produktivitas	10,44	10,44	10,50	10,00	10,45
5	**Kacang Tanah**					
	Produksi	373	373	350	5	9
	Luas Areal	369	369	280	4	6
	Produktivitas	1,01	1,01	1,25	1,25	1,25
6	**Kedelai**					
	Produksi	219	219	840	324	1.957
	Luas Areal	176	176	746	259	1.812
	Produktivitas	1,24	1,24	1,10	1,25	1,08
7	**Kacang Hijau**					
	Produksi	146	146	22	4	2
	Luas Areal	135	135	20	4	2
	Produktivitas	1,08	1,08	1,10	1,00	1,00

Sumber: Dinas Pertanian Kab Tabalong dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2013-2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas panen padi dari tahun 2013 sampai 2017 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luasan panen padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian. Tanaman palawija yang terdiri dari kacang tanah, jagung, Ubi jalar, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau pada umumnya ditanam setelah musim panen padi atau saat air sawah kering, sehingga tanah dapat menunjang sistem perakaran yang tidak tahan genangan. Luas panen tanaman palawija secara umum fluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen terbesar setelah padi adalah jagung, ubi kayu dan kacang tanah.

Untuk produksi tertinggi didominasi oleh padi sebesar 152.773 ton pada tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 89.336 ton dan di tahun 2016 menjadi sebesar 124.267 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan terjadi banjir pada lahan-lahan pertanian sehingga terjadi gagal tanam dan gagal panen, terutama di daerah selatan Kabupaten Tabalong. Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan karena terjadi iklim yang ekstrim, sehingga pada musim kemarau masih terjadi hujan terutama pada lahan lebak, yang berakibat tidak bisanya penanaman bibit padi. Tahun 2017 produksi padi meningkat menjadi 131.638 ton. Selain tanaman padi, produksi tanaman lain yang cukup tinggi produksinya adalah ubi kayu dan ubi jalar. Ketersediaan produksi tanaman pangan didaerah berkaitan erat dengan ketahanan pangan disuatu daerah/wilayah. Dari data produksi padi tersebut Kabupaten Tabalong dinyatakan surplus, artinya ketahanan pangan di daerah terjaga.

Sedangkan produktivitas padi pada tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan itu disebabkan

oleh antara lain karena adanya anomali iklim, infrastruktur yang belum memadai, alih fungsi lahan pertanian dan perubahan kebijakan pemerintah dari Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) menjadi subsidi benih.

Produktivitas jagung dari tahun 2013-2017 juga mengalami kenaikan dan penurunan. Secara umum tanaman jagung di Kabupaten Tabalong ditanam pada lahan sekitar persawahan maupun lahan persawahan (setelah dilakukan pemanenan padi) serta pada lahan karet yang baru dibuka. Kenaikan produktivitas tanaman jagung ini disebabkan karena belum optimalnya produksi padi di sawah akibat musim kemarau dan anomali iklim. Para petani padi sering memanfaatkan lahan sawah mereka dengan menanam jagung dalam menghadapi musim kemarau dan anomali iklim tersebut. Semakin panjang musim kemarau atau anomali iklim tersebut maka semakin banyak produksi tanaman jagung karena semakin panjang pula masa bertanam jagung.

Untuk tanaman ubi kayu dan ubi jalar pola tanamnya sama seperti tanaman jagung, tetapi produktivitasnya tidak terlalu signifikan untuk kenaikan maupun penurunannya. Hal ini disebabkan kebutuhan pasar terhadap ubi kayu dan ubi jalar cenderung tetap setiap tahunnya.

Tanaman kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau secara umum ditanam masyarakat pada areal persawahan saat pra tanam dan pasca panen, pada lahan untuk perkebunan karet yang baru di buka dan di lokasi pinggiran sungai. Ketiga tanaman kacang-kacangan ini selain diambil hasilnya juga bermanfaat untuk menyuburkan lahan. Produktivitas ketiga tanaman ini selama tahun 2013-2017 tidak terlalu signifikan kenaikan maupun penurunannya, hal ini disebabkan oleh kebutuhan pasar yang cenderung tetap dari tahun ke tahun.

Semua komoditas pertanian di atas ketersediaannya selain oleh produksi dalam Kabupaten Tabalong sendiri juga berasal dari luar

Kabupaten. Hal ini disebabkan karena semua komoditas di atas (selain padi) bukan tanaman pokok di Kabupaten Tabalong.

c. Perkebunan

Peranan subkategori Perkebunan ini turun dari 54,77 persen di tahun 2013 menjadi 47,87 persen di tahun 2017. Pertumbuhan nilai tambah bruto subkategori perkebunan mengalami perlambatan sekitar 0,78 persen dari tahun 2013. Perlambatan kinerja lapangan usaha perkebunan selama kurun waktu tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet. Namun, pertumbuhan produksi dan nilai tambah bruto produk tersebut semakin membaik di tahun 2016 dan 2017. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu dari tanaman karet melalui Program Gemas Mekar supaya harga karet dapat meningkat.

Realisasi produksi dan produktivitas perkebunan di Kabupaten Tabalong tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.125
Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2013 – 2017

No	Komoditas	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Karet					
	Produksi (ton)	61,235	50,982	64,459	64,323	63,831
	Luas Areal (Ha)	47,103	47,306	48,977	49,116	49,028
	Produktivitas	1.30	1.08	1.32	1.31	1.30
2	Kelapa Sawit					
	Produksi	4,640	4,640	628	613	614
	Luas Areal	259	259	264	265	265
	Produktivitas	17.9	17.9	2.4	2.3	2.3
3	Lada					
	Produksi	1	1	2	3	2.73
	Luas Areal	36	36	62	77	77
	Produktivitas	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04

d. Peternakan

Kinerja pertanian Kabupaten Tabalong juga ditopang oleh subkategori Peternakan dengan pertumbuhan rata-rata tahun 2013 - 2017 adalah sebesar 6,59 persen. Kinerja peternakan disokong oleh produksi ternak yang cukup besar dengan produksi peternakan sebagai berikut :

Tabel 2.126
Produksi dan Produktivitas Peternakan Tahun 2013 – 2017

No	Komoditas	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Populasi ternak :					
	sapi	4,281	3,985	3,211	3,658	3,320
	kambing	1,247	1,210	936	1,235	1,412
	babi	137	94	130	90	357
	itik	89,334	84,195	73,205	62,012	52,361
	ayam ras petelur	0	0	2,000	2,465,600	9,298
	ayam ras pedaging	1,109,800	3,487,912	264,500	149,195	4,621,877
	ayam kampung	163,023	164,383	136,634	28,000	133,362
2	Produksi ternak yang dipotong :					
	sapi	2,267	1,896	1,543	2,480	2,990
	kambing	1,859	1,120	488	1,089	119
	babi	37	810	-	78	50
3	Produksi telor :					
	itik	0	0	491,895	425,225	415,125
	ayam ras petelur	0	0	300,000	29,400	109,200
	ayam kampung	0	0	365,180	122,069	119,721

Kebutuhan daging Kabupaten Tabalong belum bisa dipenuhi dari produksi lokal. Kebutuhan daging sapi sebesar 3.600 ekor/tahun sementara populasi sapi pada tahun 2017 sebesar 3.320 ekor. Sedangkan kebutuhan telor sebesar 28.800.000 butir/tahun. Kebutuhan daging dan telor masih harus mendatangkan dari daerah lain.

2.3.2.4. Kehutanan

Sumberdaya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Tabel 2.127
Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Tabalong (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009)

No.	Nama Kecamatan	Kawasan Hutan Menurut Fungsi (ha.)			
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi (HPK)
1.	Banua Lawas	-	-	-	-
2.	Haruai	1.420	-	6.810	-
3.	Jaro	8.621	8.066	5.470	-
4.	Kelua	-	-	-	32
5.	Muara Harus	-	-	-	-
6.	Muara Uya	66.905	44.793	47.847	-
7.	Murung Pudak	-	-	4.390	-
8.	Pugaan	-	-	-	-
9.	Tanjung	-	-	-	2.332
10.	Tanta	-	-	-	-
11.	Upau	5.938	-	6.670	-
12.	Bintang Ara	3.785	1.124	25.060	33
Jumlah		**86.669**	**53.983**	**96.247**	**2.397**

Sumber: RTRW Kab. Tabalong

Hutan mempunyai peranan penting untuk stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, kurang lebih 65% dari luas Kabupaten

Tabalong ditunjuk sebagai kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis adalah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dibandingkan dengan luas total hutan dan lahan kritis. Lahan krittis di Kabupaten Tabalong baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, selama 5 (lima) tahun terakhir sudah menurun. Hal ini merupakan usaha konservasi pada lahan kritis yang dilaksanakan setiap tahun. Data lahan kritis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Luas dan Sebaran Lahan Kritis Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2012 – 2016

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Dalam Kawasan Hutan	20.376,00	20.326,00	20.076,003		
2	Luar Kawasan Hutan	16.242,18	16.167,18	16.092,179		
JUMLAH		**37.846,00**	**36.618,18**	**36.493,18**	**36.118,18**	**36.085,22**

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka, BPS, Tahun 2013

Sebaran lahan kritis yang ada di Kabupaten Tabalong masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada awal periode tahun 2012 mencapai angka 37.846,00 Ha, menurun 1.227,82 Ha pada tahun 2013 menjadi 36.618,18 Ha, menurun kembali 125 Ha di tahun 2014 menjadi 36.493,18 Ha.

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

2.3.2.6. Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Peningkatan usaha perdagangan yang legal dapat tergambar dari penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan golongan usaha. Perkembangan usaha perdagangan ditinjau dari penerbitan ijin usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129
Perkembangan Penerbitan SIUP Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013- 2017

No.	Golongan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perusahaan Kecil	281	259	363	286	145
2.	Perusahaan Menengah	70	57	72	52	31
3.	Perusahaan Besar	1	6	6	3	2
Jumlah		**352**	**322**	**441**	**341**	**178**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, 2018

Salah satu kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan adalah dengan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Peningkatan penerbitan TDP di Kabupaten Tabalong terjadi pada perusahaan berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dengan rata-rata peningkatan sebesar 24%. Demikian juga penerbitan TDP terhadap perusahaan dalam PO rata-rata meningkat sebesar 9,6%. Data perkembangan penerbitan TDP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Perkembangan Penerbitan TDP Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2013 – 2017

No.	Bentuk Perusahaan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PT	41	55	68	62	38
2.	Koperasi	1	2	6	2	1
3.	CV	203	147	113	134	98
4.	FA	0	0	0	0	0
5.	PO	141	151	-	96	62
6.	BUL	0	1	-	1	1
Jumlah		**386**	**356**	**187**	**295**	**200**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, 2018

2.3.2.7. Perindustrian

Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan ekspor guna menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta mengembangkan kemampuan teknologi.

Bila dilihat dari unit usaha menurut kelompok industri pada tahun 2017, maka industri pangan merupakan kelompok industri terbesar dengan jumlah mencapai 2.345 unit. Kelompok industri terbesar berikutnya adalah industri kerajinan sebanyak 1.912 unit dan industri

kimia bahan bangunan sebanyak 1.890 unit. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Tabalong adalah industri pangan, industri kerajinan, dan industri kimia bahan bangunan. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Tabel 2.131
Jumlah Unit Usaha Menurut Kelompok Industri
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017

No	Kelompok Industri	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri Pangan	1.583	1.970	2.022	2.249	2.345
2	Industri Sandang	751	899	900	967	987
3	Industri Kimia Bahan Bangunan	832	1.089	1.118	1.115	1.890
4	Industri Logam dan Elektro	799	1.100	1.115	1.166	1.199
5	Industri Kerajinan	1.677	1.810	1.890	1.903	1.912

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, Tahun 2018

Tabel 2.132
Pendataan Industri Kecil, Menengah, dan Besar
Kabupaten Tabalong Tahun 2018

No.	Jenis	Satuan	Tahun 2018	Keterangan
JENIS INDUSTRI KECIL				
1	Industri Pengolahan Pangan			Jumlah produksi tidak dapat dijumlahkan karena satuan berbeda
	- Jumlah Unit Industri	Unit	369	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	778	
	- Jumlah Produksi	Ton		
	- Nilai Produksi	Rp.	10,518,809	
2	Industri Tekstil			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	165	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	259	
	- Jumlah Produksi	Buah	66,880	
	- Nilai Produksi	Rp.	3,517,280,000	
3	Industri Pengolahan Kayu			

No.	Jenis	Satuan	Tahun 2018	Keterangan
	- Jumlah Unit Industri	Unit	52	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	148	
	- Jumlah Produksi	Buah	44,497	
	- Nilai Produksi	Rp.	3,975,548,000	
4	Industri Kimia			Jumlah produksi tidak dapat dijumlahkan karena satuan berbeda
	- Jumlah Unit Industri	Unit	11	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	26	
	- Jumlah Produksi	Ton		
	- Nilai Produksi	Rp.	251,020,000	
5	Industri Pengolahan Baja/Logam			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	56	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	111	
	- Jumlah Produksi	Buah	22,282	
	- Nilai Produksi	Rp.	3,574,092,000	
6	Industri Percetakan			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	18	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	26	
	- Jumlah Produksi	Lembar	163,040	
	- Nilai Produksi	Rp.	442,590,000	
7	Industri Barang dari Semen			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	15	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	55	
	- Jumlah Produksi	Buah	257,784	
	- Nilai Produksi	Rp.	1,210,632,000	
8	Industri Kerajinan			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	109	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	131	
	- Jumlah Produksi	Buah	154,992	
	- Nilai Produksi	Rp.	254,714,400	
9	Industri Lainnya			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	114	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	165	
	- Jumlah Produksi	Unit	363,764	
	- Nilai Produksi	Rp.	1,553,960,000	
JENIS INDUSTRI MENENGAH				
1	Industri Pengolahan Pangan			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	1	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	20	
	- Jumlah Produksi	Unit	648,000	
	- Nilai Produksi	Rp.	1,387,824,000	
2	Industri Karet			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	1	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	24	
	- Jumlah Produksi	Unit	409	

No.	Jenis	Satuan	Tahun 2018	Keterangan
	- Nilai Produksi	Rp.	208,590,000	
JENIS INDUSTRI BESAR				
1	Industri Pertambangan			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	1	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	22,150	
	- Jumlah Produksi	Ton	47,681,437	
	- Nilai Produksi	USD	1,366,645,309	
2	Industri Karet			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	1	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	257	
	- Jumlah Produksi	Unit	20,343	
	- Nilai Produksi	Rp.	731,528,000,000	
3	Industri Pengolahan Kayu			
	- Jumlah Unit Industri	Unit	1	
	- Jumlah Tenaga Kerja	Orang	270	
	- Jumlah Produksi	m3	53,644,888.18	
	- Nilai Produksi	Rp.		

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, Tahun 2018

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana

pembangunan tahunan yang biasa disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025.

Tabel 2.133
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Tabalong, 2018

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih subtansial. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan.

Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yang menjadi dasar selanjutnya dalam penyusunan RKPD. Jaminan keberlanjutan program akan sangat terdukung oleh adanya dokumen RPJMD. Adapun RPJMD Kabupaten Tabalong 2015-2019 telah ditetapkan dengan Perda, demikian juga dengan RPJDM pada periode sebelumnya.

Tabel 2.134
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Tabalong, 2018

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap perangkat daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

Tabel 2.135
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Tabalong, 2018

d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam bentuk program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk terbaru dari sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD. Dengan menghitung penjabaran program RPJMD kedalam RKPD maka akan diketahui capaian RKPD terhadap RPJMD. Menggunakan kesimpulan yang dibangun, maka Kabupaten Tabalong memiliki cakupan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang baik. Hal ini adalah sebuah prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

Tabel 2.136
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kab. Tabalong, 2018

2.3.3.2. Keuangan

Salah satu indikator penilaian untuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah untuk keuangan, adalah ketepatan waktu penetapan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Sesuai Pasal 312 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Setelah itu, akan dievaluasi oleh Gubernur sebelum dilakukan penetapan Perda APBD.

Pemerintah Kabupaten Tabalong selalu menetapkan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai wujud tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2.3.3.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tabalong pada periode 2013 sampai dengan 2017 berbeda-beda, sebagaimana ditunjukkan pda tabel di bawah. Pada tahun 2017, data BPS menunjukkan jumlah PNS Tabalong sebanyak 4.672 orang yang terdiri dari 2.224 PNS laki-laki dan 2.448 PNS Perempuan. Perkembangan jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin dan jenis pendidikan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PNS:	5.316	5.285	5.446	4.779	4.672
	- Laki-laki	2.627	2.595	2.637	2.318	2.224
	- Perempuan	2.689	2.690	2.809	2.461	2.448

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Pendidikan PNS:					
	- SD	92	88	90	77	70
	- SMP	114	101	106	97	89
	- SMA	990	945	957	843	773
	- DI, DII, DIII	61	43	1.244	1.108	1.022
	- Sarjana	1.470	1.334	3.049	2.654	2.718

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong, 2018

2.3.3.4. Sekretariat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Setiap pemerintah daerah di Indonesia wajib untuk menerapkan SAKIP, dengan menyerahkan laporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ke KemenPAN dan RB. Selanjutnya, KemenPAN dan RB akan melakukan penilaian atas SAKIP pemda.

Nilai SAKIP Pemda Kabupaten Tabalong pada periode 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan nyata. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai SAKIP sampai pada peringkat B (61,09) pada tahun 2017. Peningkat B ini diperoleh setelah 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya memperoleh nilai CC.

Selain nilai SAKIP, indikator penyelenggaran pemerintah daerah juga dapat digambarkan dengan nilai LPPD. Kementerian Dalam Nageri setiap tahun melaksanakan penilaian peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Peringkat dan

status kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahun yang diserahkan pemda (provinsi/kabupaten/kota) se Indonesia ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil penilaian LPPD Pemda Kabupaten Tabalong menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sebab terus meningkat. Nilai LPPD Tabalong pada tahun 2016 adalah 3,1835 dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Di tahun 2017, nilai LPPD Tabalong menurun menjadi 3,0240, namun masih dalam kategori Sangat Tinggi.

Tabel 2.138
Nilai SAKIP dan Nilai LPPD Pemda Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai SAKIP	C (45,15)	C (44,67)	CC	CC (52,05)	B (61,09)
2	Nilai LPPD	1,8485 (Sedang)	2,8436 (Tinggi)	2,8639 (Tinggi)	3,1835 (Sangat Tinggi)	3,0240 (Sangat Tinggi)

Sumber : Setda Kabupaten Tabalong, 2018

2.3.3.5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tabalong dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Beberapa hasil penelitian yang telah dihasilkan sejak tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Analisa Kebijakan APBD Kabupaten Tabalong dalam mengatasi Kemiskinan
2. Analisa Kompensasi dan Kualifikasi Akademik Guru Satuan Pendidikan Kabupaten Tabalong dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas

3. Kajian PAD Kabupaten Tabalong
4. Kajian Budidaya Aren Di Kabupaten Tabalong

Implementasi hasil penelitian tersebut dari tahun 2012-2014 dari rata-rata 100 persen.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

a. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Tabalong selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 mencapai 10.977.000/orang/tahun. Hal ini seiring dengan peningkatan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.139
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten Tabalong	9.918	10.088	10.171	10.620	10.977
2	Provinsi Kalimantan Selatan	10.655	10.748	10.891	11.307	11.600

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tabalong, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tabalong maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Pada periode tahun 2013–2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.140
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013-2017
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT	2.731,57	2.858,56	2.996,10	3.134,18	3.290,78
2	Jumlah RT	63.238	66.480	68.537	70.664	72.865
3	Jumlah Penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
4	Pertumbuhan :					
	a. Konsumsi RT	4.34	4.65	4.67	4.75	5.00
	b. Per Rumah Tangga	1.93	-0.45	1.53	1.60	1.82
	c. Perkapita	2.53	2.85	3.00	3.08	3.45

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013–2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2013–2017 perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selalu meningkat. Hal ini terjadi karena semakin melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani melalui perhitungan

kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel 2.141
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2017 Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	NTP	107	100.44	98.47	99.03	97.84	96.35
2	Tanaman Pangan	106.01	95.56	98.97	102.66	97.23	94.3
3	Hortikultura	126.04	100.79	99.51	102.25	106.45	105.22
4	Perkebunan	95.34	98.92	88.56	81.75	83.87	83.29
5	Peternakan	104.9	108.93	107.32	109.06	108.84	108.84
6	Perikanan	88.17	107.8	108.16	110.1	109.39	109.39

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tabalong masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada awal periode tahun 2012 mencapai angka 107 persen dan terus menurun hingga angka 96.35 pada tahun 2017. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2017 adalah sebesar 96,69 persen. Hal ini berarti pada tahun 2017, rata-rata laju kenaikan harga barang-barang konsumsi dan rata-rata laju kenaikan harga barang-barang yang digunakan sebagai biaya produksi lebih cepat dibandingkan rata-rata laju kenaikan harga hasil produksi pertanian para petani.

Perkembangan NTP dari bulan Januari hingga Desember cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan dengan tahun dasar 2012, maka terjadi penurunan Nilai Tukar Petani sebesar 3,31 persen.

d. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tabel 2.142
Produktivitas per Sektor di Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

NO	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian.Kehutanan. dan Perikanan	11.18	12.57	12.74	12.87	13.66
2	Pertambangan dan Penggalian	66.24	68.75	61.30	57.04	57.82
3	Industri Pengolahan	7.24	7.98	8.70	8.94	9.77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
5	Pengadaan Air	0.24	0.27	0.29	0.31	0.34
6	Konstruksi	4.46	5.08	5.67	6.20	7.12
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	6.00	6.95	7.72	8.56	9.74
8	Transportasi dan pergudangan	1.84	2.02	2.17	2.34	2.63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.16	1.35	1.49	1.61	1.91
10	Informasi dan Komunikasi	3.31	3.86	4.19	4.50	5.00
11	Jasa keuangan	1.52	1.72	1.84	2.00	2.21
12	Real Estate	1.01	1.16	1.26	1.35	1.50
13	Jasa Perusahaan	0.24	0.28	0.31	0.33	0.36
14	Adm Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.86	4.20	4.78	4.85	4.89
15	Jasa Pendidikan	2.88	3.37	3.87	4.35	4.97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.55	0.63	0.73	0.79	0.89
17	Jasa lainnya	0.52	0.61	0.69	0.76	0.87
Jumlah Angkatan Kerja		123,044	121,965	126,403	130,833	131,890
Produktivitas Total Daerah		6.60	7.11	6.93	6.87	7.28

e. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Adapun angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.143
Angka Kriminalitas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2013–2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kriminalitas	309	207	233	365	345
Jumlah Penduduk	231.718	235.777	239.593	243.477	247.106
Angka Kriminalitas (JK/JP x 10.000)	0,00133	0,00087	0,00097	0,00149	0,00139

Sumber: Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, Tahun 2018

Angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong tahun 2013 sebesar 0,00133, menurun di tahun 2014 menjadi 0,00087. Angka ini meningkat kembali di tahun 2015 dan 2016, masing-masing menjadi

0,00097 dan 0,00149. Kondisi ini berubah pada tahun 2017 yaitu menurun menjadi 0,00139.

f. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Kasus kriminalitas yang terjadi tetap harus ditangani. Meskipun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi dengan instansi lain dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasi kasus kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.144
Kasus kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Tabalong

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus Kriminalitas	309	207	233	365	427
Jumlah Kasus yang tertangani	211	160	227	310	367
Persentase kasus tertangani	68	77	97,43	84,93	85,75

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan kasus kriminalitas semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari penanganan kasus di tahun 2013 yang hanya mencapai 68 persen meningkat menjadi 85,75 persen di tahun 2017.

Meskipun secara penanganan mengalami peningkatan, yang berarti kinerja pemerintah semakin baik, karena banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dikurangi dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk

mendapatkan kehidupan yang lebih baik tetapi tetap mengedepankan norma-norma negara maupun norma agama.

g. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun).

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berikut data rasio ketergantungan di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.145
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Ketergantungan (%)	50	50	50,94	42,76	41,44

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka (data diolah), Tahun 2013-2017

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 50,00 persen. Namun meningkat sedikit menjadi 50,94 pada tahun 2015. Kondisi ini membaik pada tahun 2016 menjadi 42,76 persen dan pada tahun 2017 menjadi 41,44 persen. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja), mempunyai

beban tanggungan sebanyak 41 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.146
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tabalong

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,08	68,36	69,35	70,07	70,76	
	Pertumbuhan PDRB (ADHB) juta	Rp	13.812.147	14.737.131	14.846.408	15.275.976	164.410.86	
	Pertumbuhan PDRB (ADHK) juta	Rp	12.132.178	12.621.202	12.925.336	13.326.726	13.833.271	
	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	4,03	2,41	3,11	3,8	
	Laju Inflasi	%	6,98	9,17	7,25	2,21	2.40	
	PDRB per kapita (ADHB)	%	59.608	62.505	61.965	62.741	66.535	
	PDRB per kapita (ADHK)	%	52.358	53.530	53.947	54.735	55.981	
	Indeks Gini	Koef	0,34	0,359	0,35	0.33	0,347	
	Kemiskinan	%	6,15	6,21	6,59	6,35	6,09	
	Pengeluaran per kapita (ribu)	Rp	9.918	10.088	10.171	10.620	10.977	
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Angka Melek Huruf	%	97,82	98,71	98,41	98,93	99,35	
	Rata-rata Lama Sekolah	%	7,92	7,95	8,24	8,32	8,56	
	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	- SD/MI	%	94,20	99,98	99,98	98,52	99,62	
	- SMP/MTs	%	87,03	78,45	78,45	79,01	75,75	
	- SMA/MA/SMK	%	58,11	69,60	62,32	60,84	64,18	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	- SD/MI	%	110,65	112,52	112,52	108,20	109,45	
	- SMP/MTs	%	102,39	87,18	87,18	96,17	83,98	
	- SMA/MA/SMK	%	83,10	76,75	76,75	84,66	84,82	
	Pendidikan yg ditamatkan							
	- SD/MI	orang		56.250	56.533	59.553	59.661	
	- SMP/MTs	orang		35500	35500	35804	38587	
	- SMA/MA/SMK	orang		38750	39000	39131	43042	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,9	11,96	12,32	12,46	12,47	
1.2.2	Kesehatan							
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	Angka	987,8	990,5	990,8	996	996	
	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,36	69,39	69,74	69,84	69,95	
	Balita Gizi Kurang	%	4,18	2,39	1,47	1,37	1,75	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Balita Gizi Buruk	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	
1.2.3	Tenaga Kerja							
	Penduduk yang Bekerja	%	73,20	74,18	71,84	71,10	71,74	
	Pengangguran	%	1,65	4,12	2,34	3,05	2,90	
1.2.4	Seni Budaya							
	Jumlah grup kesenian	buah		39	39	40	30	
	Jumlah gedung kesenian	buah		0	1	1	1	
	Jumlah klub olahraga	buah		74	74	76	15	
	Jumlah gedung olahraga	buah		23	25	27	4	
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
2.1.1	Pendidikan							
	Rasio Ketersediaan Sekolah							
	- SD/MI	%	98,9	98,53	98,15	97,70	97,39	
	- SMP/MTs	%	61,18	61,18	61,93	61,93	61,92	
	- SMA/MA/SMK	%	28,81	27,03	27,69	30,27	27,59	
	Rasio Guru dan Murid							
	- SD/MI	%	10,99	10,3	10,67	10,80	12,85	
	- SMP/MTs	%	8,99	11,11	10,80	10,64	10,75	
	- SMA/MA/SMK	%	11,16	11,32	12,67	12,99	14,43	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0,04	0,02	0,04	1,2	1,1	
	- SMP/MTs	%	0,12	0,13	0,11	1,25	1,19	
	- SMA/MA/SMK	%	0,09	0,11	0,12	0,38	0,27	
2.1.2	Kesehatan							
	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita	%	12,59	12,10	12,16	11,82	11,36	
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	%	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	
	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	
	Rasio Pustu per satuan penduduk	%	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	%	0,18	0,20	0,20	0,20	0,23	
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	%	0,181	0,203	0,233	0,209	0,311	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	109,5	89,2	96,3	136,6	111,71	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	109,5	89,2	96,3	136,6	111,71	
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	81,7	87,6	86,3	90,8	80,8	
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita	%	100	100	27	32,5	34,68	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	penyakit TBC BTA							
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	19,2	63,3	44,81	
	Cakupan kunjungan bayi	%	90,8	95,4	94,2	92,7	95,3	
	Cakupan pelayanan puskesmas	/1000		88,3	46,8	48,5	98,4	
	Cakupan pelayanan puskesmas pembantu/pustu	/1000		5,9	5,1	5,3	5,5	
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%		67,41	67,41	74,09	77,09	
	Jembatan dalam kondisi baik	%		62,41	66,77	70,82	76,39	
	Tempat Ibadah per Satuan Penduduk:							
	- Masjid	unit		206	222	234	228	
	- Gereja	unit		30	30	30	27	
	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah berkondisi baik	%		80	82	83	Tidak ada data	
	Rasio Tempat Pem-buangan Sampah per Satuan Penduduk	rasio	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	
	Luas Lahan Pertanian yg terlayani jaringan irigasi	%		40	55	65	Tidak ada data	
	Persentase sarana dan prasarana pengairan dalam kondisi baik	%		60,72	61,91	65,74	68,03	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Persentase Permukiman Layak Huni	%		46,19	46,2	46,3	58,58	
	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	92,90	92,56	93,10	95,71	96,01	
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	3,15	3,10	3,13	3,08	3,48	
	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	%	61,7	111,9	110,1	108,3	106,8	
	Rasio jumlah Siskamling per 10.000 penduduk	%	4,47	4,47	4,47	4,47	4,50	
	Penegakan PERDA dan PERKADA	%		89	72	75	76	
	Persentase jumlah konflik bernuansa SARA yang berhasil diselesaikan	%		100	100	100	100	
2.1.6	Sosial							
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah	3	3	12	12	10	
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	orang	18.737	19.140	19.952	20.160	19.125	
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg mandiri	%		40	50	60	85	
2.2	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.2.1.	Tenaga Kerja							
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	74,99	72,93	74,18	73,15	74,64	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,2	4,12	3,15	4,17	3,88	
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	50,58	50,89	51,58	51,50	52,40	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	63,85	64,00	65,00	65,50	61,35	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,89	67,54	71,62	69,03	70,77	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,27	84,49	84,76	84,80	85,15	
	Status Menuju Kabupaten Layak Anak	Rangking	N/A	N/A	Rintisan	Rintisan	Pratama	
	Rasio KDRT	Ratio	0,014	0,012	0.010	0.009	0,002	
2.2.3	Lingkungan Hidup							
	Presentase Penanganan Sampah	%	31	30,5	32,5	34,5	44,49	
	Presentase Penduduk Berakses Air Bersih	%	69,49	69,67	40,29	46,39	53,48	
	Tingkat kualitas air	%		44	52	52,5	57	
	Tingkat kualitas udara	%		88,35	81	81,5	84	
	Tutupan Lahan	%		44,51	59	59,5	70	
2.2.4	Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Jumlah Penduduk	Jiwa		235.777	239.593	243.477	247.106	
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%		1,77	1,62	1,62	1,49	
	Kepemilikan KTP	orang		180.224	140,520	153,667	158,556	
	Kepemilikan Akta Kelahiran	orang		180.224	131,804	141,598	156,818	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya/ Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
2.2.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Jumlah Kelompok Binaan PKK	klmpk	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810	
	PKK aktif	unit	155	155	155	155	155	
	Posyandu aktif	unit		271	264	272	408	
	Persentase desa yang diakses dengan mudah	%		95	95,87	96,69	99,91	
2.2.6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Jumlah Keluarga Berencana	Kk	38,778	41.305	39.856	38.264	37.875	
2.2.7	Pangan							
	Persentase ketersediaan pangan utama	gr/org/ hari	N/A	N/A				
	Rasio Ketersediaan Pangan (FCR)	Ratio						
	Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan	%						
2.2.8	Pertanahan							
	Luas Lahan Bersertifikat	Ha	484	223,66	587,86	177,94	579,71	
	Penyelesaian Ijin Lokasi	%	14	36,95	28,71	12,64	13,3	
2.2.9	Perhubungan							
	Angkutan Kota	buah	3	8	13	18	23	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Cakupan Wilayah yang terlayani angkutan umum	%	0	0	16	25	33,33	
2.2.10	Komunikasi dan Informatika							
	Penyiaran TV Lokal	buah		1	1	1	1	
	Media Massa Lokal	buah		10	10	10	10	
	Penyiaran Radio Lokal	buah		3	3	3	4	
	Cakupan wilayah yg ter-layani penyiaran TV Lokal	%		10	20	30	70,23	
	Cakupan wilayah terlayani penyiaran Radio Lokal	%		25	35	45	100	
2.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Persentase Koperasi Aktif	%	75	68,96	69,02	69,54	78,00	
	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM	unit	53.615	53.482	53.490	53.512	53.476	
	Tingkat Pertumbuhan jumlah UMKM	%		33	35	40	Tidak ada data	
2.2.12	Penanaman Modal							
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (milyar)	Rp		7527	8214	8522	1264,03	
	Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	102,23	102,36	94,12	79,92	79,83	
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga							
	Jumlah pemuda berprestasi minimal tingkat Provinsi	orang		10	11	25	25	
	Jumlah Cabang Olahrga yang mendapat Penghargaan	buah		10	11	12	3	
2.2.14	Statisik							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Produksi Data Pembangunan							
	- Kabupaten Dalam Angka	ada/tdk	ada	ada	ada	Ada	ada	
	- Kecamatan Dalam Angka	ada/tdk	ada	ada	ada	Ada	ada	
	- PDRB	ada/tdk	ada	ada	ada	Ada	ada	
	- Profil Kabupaten	ada/tdk	ada	ada	ada	Ada	ada	
	- Monografi	ada/tdk	ada	ada	ada	Ada	ada	
2.2.15	Persandian							
	Persentase jumlah peralatan komunikasi	%	0	0	0	0	20	
2.2.16	Kebudayaan							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	3	3	5	5	5	
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	keg	0	0	1	1	2	
2.2.17	Perpustakaan							
	Jumlah Perpustakaan	Buah	47	89	89	91	139	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	21.504	60.524	71.559	44.119	73.412	
2.2.18	Kearsipan							
	Tingkat pemenuhan sarpras pengolahan dan penyimpanan arsip	%		20	30	35	20	
	Jumlah aparatur pengelola arsip yang terampil	Orang		-	-	-	30	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Terlaksananya akuisisi arsip statis dan arsip inaktif	Buah		-	-	-	2	
	Jumlah desa yang dibimbing dalam pengelolaan arsip	Desa	-	-	-	-	0	
	Terlaksananya sosialisasi Perda Kearsipan bagi SKPD	Orang	-	-	-	-	0	
	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip	%	-	-	-	-	30	
	Tersedianya pedoman pengolahan kearsipan	Pedoman	-	-	-	-	1	
2.3	Fokus Urusan Wajib Pilihan							
2.3.1	Kelautan dan Perikanan							
	Produksi Perikanan Budidaya							
	- Kolam	ton		2.806,8	2.891,00	2.977,73	6534,3	
	- Keramba	ton		3.273,2	3.371,40	3.472,54	6043,8	
	- Minapadi	ton		28,6	29,46	30,34	69,5	
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	41,21	42,41	44,12	44,27	45,23	
	Cakupan bina kelompok Perikanan	Kelompok		16	30	30	36	
2.3.2	Pariwisata							
	Kunjungan wisata	orang		47,328	47,921	138,868	180.148	
2.3.	Pertanian							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
3								
	Produksi padi	Ton	152.773	152.773	89.336	124.267	131.638	
	Produktivitas Padi/ produksi	Ton/ha	4,63	4,63	4,00	4,83	4,60	
	Kontribusi Sektor Pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	8,86	9,27	9,55	9,65	11,29	
	Produksi Daging Sapi	Kg		3.849.450	3969,94	4015,66	698,196.00	
	Produktivitas Daging Sapi	Kg/ekor		92	94	95	210.30	
	Cakupan bina kel. Petani							
	- Kelompok tani	Klmpk		382	417	453	786.00	
	- Gapoktan	Klmpk		62	70	78	82.00	
	Produksi Karet	ton	61,235	50,982	64,459	64,323	63,831	
	Produktivitas Karet	ton/ha	1.30	1.08	1.32	1.31	1.30	
	Nilai Tukar Petani	Nilai		107,12	107,72	108,5	Tidak ada data	
2.3.4	Kehutanan							
	Luas Lahan Kritis	Ha		36.118,18	36.118,18	36.085,22	34,152.12	
2.3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral							
	Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB	%	59,01	56,90	51,48	48,23	46,26	
2.3.6	Perdagangan							
	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	5,34	5,75	6,57	7,34	7,82	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
2.3.7	Perindustrian							
	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	6,45	6,61	7,86	8,23	8,78	
	Pertumbuhan Industri	%		15,01	2,43	-4,73		
2.4	Fokus Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan							
2.4.1	Perencanaan Pembangunan							
	Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	Ada	ada	
	Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA.	ada/tidak ada	ada	ada	ada	Ada	ada	
	Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	Ada	ada	
	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir dalam Perencanaan Tahunan	%		35	40	45	Tidak ada data	
2.4.2	Keuangan							
	Persentase Belanja terhadap Pendapatan	%		100,89	99,48	92,62	110,06	
	Opini BPK	opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.4.3	Pemerintahan							
	Persentase Pelaksanaan e-Government	%		20	30	35	30	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks		0	0	0	Tidak ada data	
	Nilai LKjIP	Nilai	C	C	C	CC	B	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Nilai LPPD	Nilai	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	
	Predikat APN	Peringkat	N/A	N/A	1 (Provinsi)	1 (Provinsi)	Nominasi Nasional	
2.4.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%		15.2	24.33	28.12	128.76	
2.4.5	Penelitian dan Pengembangan							
	Persentase Impementasi Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fokus Fasilitas Wilayah							
3.1.1	Penataan Ruang							
	Ketaatan terhadap RTRW	%		75	80	82	100	
3.1.2	Lingkungan Hidup							
	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	%		97,36	97,4	97,47	70,8	
3.1.3	Penanaman Modal							
	Perda mendukung Iklim usaha			1	1	1	1	
	Perda Perijinan	Buah		3	3	3	3	
	Perda lalu Lintas Barang/Jasa	Buah		1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Perda Ketenagakerjaan	Buah		1	1	1	1	
	Lama Proses Perijinan	Buah		7	7	7	55	
3.1.4	Kriminalitas							
	Angka Kriminalitas	%	0,00133	0,00087	0,00097	0,00149	0,00139	
	Demonstrasi	Kali		3	0	0	0	
3.1.5	Listrik dan Telekomunikasi							
	Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	RT		53,342	55,151	59,045	94.52	
	Cakupan Layanan BTS	%		30	40	50	46.56	
3.2	Fokus Sumber Daya Manusia							
	Ratio Lulusan S1/S2/S3	Rasio			317	348	6.12	
	Ratio Ketergantungan	Rasio			50,94	42,76	45.34	

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Gambaran Keuangan Daerah Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari

pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong di mana tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2013-2017

TAHUN	OPINI BPK
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tabalong, 2018

Target kedepan pada periode tahun 2019-2024, Kabupaten Tabalong mengharapkan akan mempertahankan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan fokus memantapkan pengelolaan aset daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya terdiri

dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. sementara itu, komponen belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. selanjutnya, pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini.

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lainlain

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2013-2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	**PENDAPATAN**	**1.011.979.247.226**	**1.053.741.136.620**	**1.244.291.477.443**	**1.617.988.407.431**	**1.308.522.644.349**	**8.28**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**71.095.755.680**	**125.445.851.681**	**123.177.869.325**	**144.964.679.795**	**180.405.275.377**	**29.19**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	25.954.297.650	47.932.235.654	40.387.158.162	49.103.160.372	56.081.956.553	26.18
1.1.2	hasil Retribusi Daerah	8.535.728.067	10.547.572.259	9.493.470.324	7.545.427.556	6.292.894.035	(5.89)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.165.222.260	7.913.172.061	9.275.028.616	9.211.451.132	11.222.052.851	22.89
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.440.507.703	59.052.871.707	64.022.212.223	79.104.640.735	106.808.371.938	38.70
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**785.918.297.954**	**768.056.696.761**	**908.297.131.192**	**1.294.740.136.950**	**916.281.486.462**	**7.33**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	380.836.268.954	322.558.816.761	393.988.771.192	520.286.296.442	256.074.346.184	(2.97)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	405.082.029.000	444.103.855.000	431.954.810.000	502.944.980.000	494.109.854.000	5.39
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	1.394.025.000	82.353.550.000	271.508.860.508	166.097.286.278	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**154.965.193.592**	**160.238.588.178**	**212.816.476.927**	**178.283.590.686**	**211.835.882.510**	**9.70**

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.170.825.971	4.171.470.246	4.293.872.351	5.194.601.873	5.102.096.457	(2.57)
	Dana Darurat	-	-	-			0,0%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77.621.113.621	84.730.414.444	77.573.307.576	93.292.848.813	104.679.712.053	8.30
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi	70.000.804.000	70.785.456.000	130.949.297.000	79.796.140.000	102.054.074.000	18.74
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain	1.172.450.000	-	-	-	-	-
1.3.5	Pendapatan Lainnya		551.247.488	-	-	-	-
1.3.6	Dana Penyeimbang Ad Hoc		-	-	-	-	-
1.3.7	Dana Penyesuaian Kependidikan		-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kabupaten Tabalong 2013-2017

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran Perkembangan pendapatan daerah Kabuputen Tabalong cukup baik dan mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 8,28%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun cenderung meningkat dari periode tahun 2013-2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,19%, Dana Perimbangan Kabupaten Tabalong pada periode 2013-2017 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,33 %. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 5,39%. Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan 9,70%,

b) Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2013-2017, disajikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	**BELANJA DAERAH**	**809.762.231.830**	**1.063.136.437.435**	**1.238.160.101.966**	**1.499.005.805.906**	**1.440.255.308.416**	**16.23**
2 .1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**452.863.241.423**	**508.395.832.971**	**623.361.358.401**	**658.325.877.422**	**655.694.536.084**	**10.02**
2.1.1	Belanja Pegawai	385.233.436.583	461.133.472.315	484.366.097.324	446.438.355.047	406.811.199.271	2.01
2.1.4	Belanja Hibah	37.959.269.083	12.008.155.000	38.898.325.971	26.078.973.150	53.220.084.453	56.67
2.1.5	Belanja Subsidi	-	-	-	2.894.400.000	4.481.604.600	-
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.302.954.700	4.141.588.000	6.248.298.000	4.805.100.000	8.289.075.000	31.42
2.1.7	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.659.897.200	3.286.269.000	5.475.698.000	5.802.715.000	6.065.142.800	6.62
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.163.611.357	27.355.227.656	88.372.939.106	172.305.079.240	176.827.429.960	90.85
2.1.10	Belanja Tidak Terduga	544.072.500	471.121.000	-	125.498.500	-	-
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**356.898.990.407**	**554.740.604.464**	**648.798.743.565**	**840.555.684.969**	**784.560.772.332**	**23.82**
2.2.1	Belanja Pegawai	65.309.844.555	65.421.519.525	72.800.894.380	54.692.541.777	52.435.401.093	(4.39)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.469.927.559	177.335.895.452	181.092.803.255	314.346.665.355	332.916.601.168	29.64
2.2.3	Belanja Modal	162.119.218.293	311.983.189.487	360.905.045.930	471.516.477.837	399.208.770.071	30.86

Sumber: LRA, Kabupaten Tabalong 2013-2017

Berdasarkan Tabel 3.3 diperoleh gambaran periode tahun 2013-2017 bahwa Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,02%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 2,01%. Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 23,82%. Komponen Belanja Langsung terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 30,86%.

Tabel 3.4
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
A	Pendapatan Umum Daerah		
1	Pendapatan asli daerah	145.284.800.538	180.405.275.377
2	Dana Bagi Hasil	525.812.014.475	256.074.346.184
3	Dana Alokasi Umum	502.944.980.000	494.109.854.000
	Jumlah A	1.174.041.795.013	930.589.475.561
B	Belanja Pegawai		
1	Belanja Gaji dan Tunnjangan	324.987.913.129	359.477.703.946
2	Tambahan pengjhasilan PNS	165.214.341.330	86.131.083.531
	Jumlah B	490.202.254.459	445.608.787.477
	Kemampuan Keuangan Daerah	**683.839.540.554**	**484.980.688.084**

Sumber: Data diolah dari LRA, Kabupaten Tabalong 2016-2017

Berdasarkan data tabel diatas dapat ditentukan kelompok kemampun keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Kemampun keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pada Tahun 2017, Kabupaten Tabalong memiliki

kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 484.980.688.084,-. Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tabalong terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Tabalong.

Memperhatikan Tabel 3.5 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar 84,22%, serta realiasi pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan yang cukup sognifikan sebesar 128,42%.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**51.543.444.272**	**206.122.929.540**	**154.343.631.629**	**155.664.218.455**	**251.006.761.317**	**84.22**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**66.543.444.272**	**254.681.724.582**	**196.889.798.411**	**160.475.007.106**	**274.642.767.321,18**	**78.17**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.643.900.845	253.760.459.668	196.727.628.725	160.475.007.106	274.642.767.321,18	79.20
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	899.543.427	921.264.914	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3.1.8	Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Modal			-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**15.000.000.000**	**48.558.795.042**	**42.383.997.096**	**4.810.788.651**	**23.636.006.004,00**	**128.42**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	47.913.172.000	40.000.000.000	-	21.000.000.000	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	645.623.042	2.383.997.096	4.810.788.651	2.636.006.004,00	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-		-
3.2.5	Penyertaan Modal Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		**51.543.444.272**	**206.122.929.540**	**154.343.631.629**	**155.664.218.455**	**251.006.761.317**	**84.22**

Sumber: DPKAD, Kabupaten Tabalong 2013-2017

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Tabalong serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*.

Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Neraca Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun (Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	**2.536.970.371.449**	**3.453.838.157.756**	**3.868.633.131.126**	**3.608.822.054.639**	**3.626.524.378.392**
Aset Lancar	**294.264.462.186**	**259.739.635.513**	**267.119.368.349**	**343.215.985.062**	**181.960.903.440**
Kas di Kas Daerah	247.598.301.774	181.294.571.692	139.670.092.902	245.440.976.451	86.673.131.184
Kas di Bend. Pengeluaran	70.928.575	8.994.585	3.929.390	-	-
Kas di Bend. Penerimaan	82.981.017	20.065.400	92.495.407	430.000	
Kas Lainnya	-	252.023.752	2.122.739.464		35.961.374
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-	1.328.814.381	1.051.354.208	685.226.191
Kas di Bendahara BLUD	6.091.229.319	-	19.475.739.823	28.154.802.881	31.678.840.572
Kas di Bendahara BOS	-			734.863.049	200.937.930
Piutang Pajak	8.204.105.555	11.086.611.463	3.216.181.009	8.524.450.017	7.701.155.853
Piutang Retribusi	1.311.851.678	1.393.452.302	9.888.979.232	1.675.796.528	1.838.884.049
Piutang Dana Bagi Hasil	21.415.813.821	35.144.341.203	67.097.610.287	36.410.449.244	30.174.951.234
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.405.027.624	-	958.827.338	15.853.157	-
Piutang Lainnya	3.776.250.075	9.474.056.985	9.258.889.351	11.678.995.851	12.940.321.589
Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-
Persediaan	4.307.972.748	5.641.455.684	6.486.805.699	9.528.013.676	10.031.493.464
Investasi Jangka Panjang	**96.026.050.147**	**141.727.008.758**	**203.512.677.543**	**196.075.870.226**	**213.431.938.593**
Inv. Non Permanen Lainnya	2.790.591.250	2.790.591.250	2.790.591.250	-	-

Uraian	Tahun (Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penyertaan Modal Pemda	93.235.458.897	138.936.417.508	200.722.086.293	196.075.870.226	213.431.938.593
Aset Tetap	**2.118.542.449.556**	**3.069.213.685.430**	**2.732.793.427.945**	**3.027.517.603.900**	**3.214.089.734.244**
Tanah	508.513.221.648	1.118.754.312.383	1.134.779.923.550	1.149.448.792.310	1.153.865.372.768
Peralatan dan Mesin	166.105.604.636	205.766.166.282	264.871.770.531	302.020.664.896	354.068.579.562
Gedung Bangunan	411.061.954.438	470.654.968.154	527.087.767.585	595.686.107.192	645.087.960.929
Jalan Irigasi Jaringan	913.518.299.575	1.076.241.743.237	1.263.000.659.480	1.603.711.119.930	1.798.376.145.489
Aset Tetap Lainnya	10.296.382.486	42.984.016.336	62.533.821.645	34.839.891.220	56.996.402.799
Kontruksi dalam Pengerjaan	109.046.986.773	154.812.479.038	157.463.363.968	168.016.905.294	166.706.699.462
Akum. Penyusutan	-	-	676.943.878.815	-826.205.876.942	-961.011.426.765
Dana Cadangan					
Dana Cadangan					
Aset Lainnya	**28.137.409.560**	**42.309.522.519**	**39.351.620.601**	**42.012.595.451**	**17.041.802.115**
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	36.084.560	34.594.620	34.594.620	34.594.620	32.593.860
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27.054.000.000	27.054.000.000	27.054.000.000	27.054.000.000	27.054.000.000
Aset Tidak Berwujud	-	455.944.135	1.296.794.135	3.331.672.135	4.298.343.235
Aset Non Lancar Lainnya	-	-	-	0	80.052.512
Aset Lain-lain	1.047.325.000	14.764.983.764	10.966.231.846	11.592.328.696	11.561.145.708
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-		-25.984.333.200

Uraian	Tahun (Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kewajiban	**17.816.303.760**	**5.921.764.705**	**8.204.154.834**	**5.563.366.935**	**10.547.840.000**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	-	55.030.041	12.170.527		
Kewa jangka pendek	-	-	-		
Urtang kepada Pihak Ketiga	-	-	-		
Pendapatan Diterima dimuka	-	-	-	135.316.468	339.948.812
Utang Beban	-	-	3.488.859.285	115.206.199	6.841.744.086
Utang Jangka Pendek Lainnya	17.816.303.760	5.866.734.664	4.703.125.022	5.312.844.268	3.286.094.590
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				5.563.366.935	10.547.840.000
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		0	0
Ekuitas Dana	**2.519.154.067.689**	**3.507.068.087.515**	**3.234.572.939.603**	**3.603.258.687.704**	**3.615.976.538.392**
Ekuitas Dana	2.519.154.067.689	3.507.068.087.515	3.234.572.939.603	3.603.258.687.704	3.615.976.538.392
Total Ekuitas dan Kewajiban	**2.536.970.371.447**	**3.512.989.852.220**	**3.242.777.094.437**	**3.608.822.054.639**	**3.626.524.378.392**

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Tabalong 2013-2017

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada lima tahun terakhir yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas. Namun pada analisis berikut yang disajikan hanya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, sedangkan untuk rasio aktivis tidak dianalisis karena pada nilai kewajiban neraca hanya ada pada tahun 2013 dan 2017. Adapun analisis neraca dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Rasio Likuiditas**					
1	Rasio Lancar	16,01	41,02	2553,75	61,69	17,25
2	Rasio Quick	15,76	40,07	0,00	0,00	0,00
B.	**Rasio Solvabilitas**					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,01	0,002	0,0022	0,1542	0,2909
2	Rasio Hutang Terhadap Modal (Ekuitas)	0,0071	0,0017	0,0028	0,1544	0,2917

Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2014

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD Yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada

aturan yang melandasinya baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD Yang sah adalah pendapatan yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis pendapatan pajak Daerah dan retribusi daerah. Kelompok selanjutnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan bangunan, bagi hasil bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan bagi hasil Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk *block grand* dari Pemerintah, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah. DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan . selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana perimbangan yang penggunaannnya ditentukan oleh Pemerintah, misalnya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perdagangan, dan bidang infrastruktur. Ketentuan tentang DAK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Kelompok terakhir adalah Lain-lain Pendapatan yang sah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Provinsi, antara lain Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bawah Tanah, dan Penyesuaian

Otonomi Khusus, yang biasanya berasal dari Pemerintah Pusat, misalnya dana insentif daerah dan dana tambahan penghasilan untuk guru.

Berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat, pencapaian visi dan misi daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah agar memperkuat kemampuan Pemerintah Pusat.
2) Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu mengembangkan kreatifitas, inisiatif, kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat dalam menggali potensi dan sumber-sumber baru yang ada dalam meningkatkan penerimaan asli daerah dan mengelola keuangan daerah secara optimal, efesien dan efektif dan menghindariu kebocoran.
3) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, agar lebih dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat sasaran dan efesien.
4) Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga keuangan non bank milik pemerintah daerah (BUMD) yang bergerak dalam permodalan usaha mikro yang mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecil secara merata.

Arah kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah meliputi:

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efesiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
2) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggung jawab melayani masyarakat secara langsung dan *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Karja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD)
3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
4) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

5) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap perangkat daerah serta pemeliharaan asset daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang cenderung bertambah besar setiap tahunnya akan mendorong pemerintah daerah mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sepadan dengan kebutuhan daerah.

Belanja daerah yang bisa dialokasikan untuk biaya program pembangunan, bantuan keuangan dan sosial, belanja bagi hasil serta belanja tidak tersangka sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib dalam

bentuk gaji upah dan tunjangan PNS. Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang harus dikelola secara efesien dan efektif untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah.

Pembiayaan pembangunan tidaklah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah semata tanpa adanya partisipasi kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Arah pengelolaan pembiayaan ke depan diharapkan di dalam pembiayaan pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulant bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Tabalong bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tabalong pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah sertauntuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabalong pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa

datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tabalong ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**384.076.878.382**	**451.818.758.592**	**474.758.579.225**	**495.057.478.081**	**452.022.271.493**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	268.507.841.083	284.767.971.353	308.458.353.847	324.987.913.129	359.477.703.946
2	Belanja Tambahan Penghasilan	109.535.916.318	161.283.388.726	159.977.300.143	165.214.341.330	86.131.083.531
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KKDH/WKDH	2.645.100.000	2.632.500.000	2.667.600.000	2.667.600.000	3.747.000.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	3.388.020.981	1.259.205.172	1.888.225.000	-	-
5	Insentif Pemungutan Pajak	-	1.549.467.267	1.507.072.870	1.890.706.301	2.403.402.621
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	326.226.074	260.027.365	296.917.321	263.081.395
B.	**Belanja Langsung**	**109.135.675.790**	**188.960.500.097**	**92.436.236.049**	**120.382.228.778**	**129.653.641.604**
1	Belanja Honorarium PNS	22.707.381.369	22.793.262.800	28.108.585.989	28.609.785.280	21.573.170.235
2	Belanja Uang Lembur	-	990.057.250	488.705.000	-	-
3	Belanja Pegawai BLUD	-	459.048.000	2.400.411.000	5.925.672.058	9.153.483.956
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	863.627.200	997.540.000	681.539.300	1.221.885.000	1.901.030.000
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.681.932.116	8.065.373.814	8.674.178.886	9.668.184.511	6.627.562.816

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	325.125.000	25.000.000	-	-
7	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	10.813.038.747	3.686.147.300	4.714.301.525	5.380.055.324	3.380.948.540
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	737.978.587	1.086.264.500	700.225.000	735.906.000	362.232.500
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari2 Tertentu	401.356.775	580.326.000	853.985.000	1.509.255.511	2.245.589.000
10	Belanja Perjalanan Dinas	22.009.887.685	32.613.306.341	28.311.163.849	56.025.278.494	61.827.006.494
11	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
12	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)**	45.920.473.311	117.364.049.092	17.478.140.500	11.306.206.600	22.582.618.063
TOTAL		**493.212.554.172**	**640.779.258.689**	**567.194.815.274**	**615.439.706.859**	**581.675.913.097**

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami penurunan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Pada tahun 2017 proporsi belanja pemenuhan kabutuhan aparatur sebesar 39,73% yaitu terjadi penurunan sebesar 1,2% dari tahun 2016. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2013	493.212.554.172	824.762.231.830	59,80%
2	2014	640.779.258.689	1.121.695.232.477	57,13%
3	2015	567.194.815.274	1.280.544.099.062	44,29%
4	2016	615.439.706.859	1.503.816.594.557	40,93%
5	2017	581.675.913.097	1.463.891.314.420	39,73%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong 2013– 2017

b. Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tabalong
Tahun 2014-2017

No.	Uraian	Realisasi (Rp)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	
A	**Belanja Tidak Langsung**	**476.604.281.076**	**560.931.072.631**	**667.362.557.321**	**628.849.701.453**	**36,13%**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	284.767.971.353	308.458.353.847	324.987.913.129	359.477.703.946	8,10%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	161.283.388.726	159.977.300.143	165.214.341.330	86.131.083.531	-
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	2.632.500.000	2.667.600.000	2.667.600.000	3.747.000.000	13,93%
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	435.830.156	431.569.366	514.366.240	609.077.160	-
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	25.608.897.500	85.740.924.040	171.790.713.000	176.218.352.800	-
6	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	1.888.225.000	-	-	-
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.549.467.267	1.507.072.870	1.890.706.301	2.403.402.621	-
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	326.226.074	260.027.365	296.917.321	263.081.395	-
C	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**48.558.795.042**	**42.383.997.096**	**4.810.788.651**	**23.636.006.004**	**96,65%**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.913.172.000	40.000.000.000	-	21.000.000.000	-
2	Pembayaran Pokok Utang	645.623.042	2.383.997.096	4.810.788.651	2.636.006.004	108,61%
	TOTAL A+B+C	**525.163.076.118**	**603.315.069.727**	**672.173.345.972**	**652.485.707.457**	**23,08%**

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong 2014– 2017

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

a. Sumber Penutup Defisit Riil

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, maka pemerintah Kabupaten Tabalong harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 3.11
Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Daerah	1.011.979.247.226	1.053.741.136.620	1.244.291.477.444	1.617.988.407.431	1.308.522.644.349
2	Belanja Daerah	809.762.231.830	1.063.136.437.435	1.238.160.101.966	1.499.005.805.906	1.440.255.308.416
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.000.000.000	48.558.795.042	42.383.997.096	4.810.788.651	23.636.006.004
A	Defisit Riil	187.217.015.396	(57.954.095.857)	(36.252.621.618)	114.171.812.874	(155.368.670.071)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	66.543.444.271	253.760.459.668	196.727.628.725	160.475.007.106	274.642.767.321
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir/Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	921.264.914	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan	66.543.444.271	254.681.724.582	196.727.628.725	160.475.007.106	274.642.767.321
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		253.760.459.667	196.727.628.725	160.475.007.107	274.646.819.980	119.274.097.250

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong2013–2017

Berdasarkan Tabel analisis Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2017, untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil maka di susun tabel komposisi defisit riil pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tabalong
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi dari total defisit Riil									
		2013	(%)	2014	(%)	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)
	Defisit Ril	187.217.015.396	-	(57.954.095.857)	-	(36.525.621.618)	-	114.171.812.874	-	(155.368.670.071)	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	66.543.444.271	-	253.760.459.668	-	196.727.628.725	-	160.475.007.107	-	274.642.767.321	-
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	921.264.914	-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proporsi dari total defisit Riil									
		2013	(%)	2014	(%)	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan	253.760.459.668	-	196.727.628.725	-	160.475.007.107	-	274.646.819.980	-	119.274.097.250	-

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong 2013–2017

b. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran defisit riil anggaran periode dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2013-2017

NO	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	253.760.459.668	-	196.727.628.725	-	160.475.007.107	-	274.646.819.980	-	119.274.097.250	-
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-		
SILPA RIIL (1-2-3)		253.760.459.668	-	196.727.628.725	-	160.475.007.107	-	274.646.819.980	-	119.274.097.250	-

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong 2013– 2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang alokasinya ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak daerah. Serta lain-lain pendpatan daerah yang sah terbesar dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan dan wewenang serta tanggungjawab kepada masyarakat. Lebih lanjut, belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Tabalong, periode tahun 2020-2024 mengunakan tahun dasar tahun 2018. Pendapatan periode tahun 2020-2024 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,89%. Komponen Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,46%, sedangkan Dana Perimbangan sebesar 9,03% serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,84%.

Proyeksi Belanja periode tahun 2020-2024 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,83%, di antaranya belanja tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,95%. Sedangkan belanja langsung dari tahun 2020-2024 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,41%.

Pembiayaan Kabupaten Tabalong periode tahun 2019-2024 akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan dapat dilakukan dengan pinjaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja daerah 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2019-2024

No	Uraian	PAPBD	Proyeksi (Rp)				
		2018	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**	**1.538.433.173.348**	**1.477.593.388.000**	**1.517.267.524.000**	**1.554.166.090.000**	**1.959.758.580.000**	**2.002.309.273.000**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**164.596.935.430**	**201.109.150.000**	**207.326.047.000**	**214.393.316.000**	**270.495.108.000**	**278.293.542.000**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	54.894.700.000	86.137.508.000	88.373.918.000	89.362.385.000	106.545.238.000	112.116.963.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.866.340.400	9.613.882.000	10.366.954.000	11.085.062.000	11.800.473.000	12.525.282.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.286.076.682	15.050.000.000	15.075.000.000	15.100.000.000	21.364.000.000	22.006.619.000
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	90.549.818.348	90.307.760.000	93.510.175.000	98.845.869.000	130.785.397.000	131.644.678.000
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.027.804.578.610**	**1.039.209.579.000**	**1.070.291.818.000**	**1.095.023.115.000**	**1.440.113.813.000**	**1.468.766.072.000**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	373.000.667.000	441.454.423.000	453.942.453.000	466.384.556.000	796.944.277.000	810.818.940.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	494.109.854.000	515.873.321.000	532.863.687.000	543.520.961.000	554.391.380.000	565.479.207.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	160.694.057.610	81.881.835.000	83.485.678.000	85.117.598.000	88.778.156.000	92.467.925.000
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**346.031.659.309**	**237.274.659.000**	**239.649.659.000**	**244.749.659.000**	**249.149.659.000**	**255.249.659.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	106.292.345.309	9.100.000.000	9.100.000.000	11.100.000.000	11.100.000.000	13.100.000.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	PAPBD	Proyeksi (Rp)				
		2018	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96.199.673.000	121.563.000.000	123.938.000.000	127.038.000.000	131.438.000.000	135.538.000.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	143.539.641.000	106.611.659.000	106.611.659.000	106.611.659.000	106.611.659.000	106.611.659.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	**BELANJA DAERAH**	**1.653.039.942.569**	**1.491.233.582.000**	**1.530.907.718.000**	**1.567.806.284.000**	**1.973.398.774.000**	**2.015.949.467.000**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**778.921.422.285**	**858.807.323.100**	**894.646.158.700**	**929.824.383.450**	**1.003.362.753.350**	**1.041.765.994.050**
2.1.1	Belanja Pegawai	502.248.647.700	559.350.288.300	584.342.123.900	610.639.348.650	638.120.540.850	666.837.781.550
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	78.117.076.050	38.669.440.000	43.669.440.000	48.669.440.000	53.669.440.000	58.669.440.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.443.600.000	40.284.640.000	42.284.640.000	44.284.640.000	46.284.640.000	48.284.640.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.180.000.000	9.576.000.000	9.775.000.000	10.046.000.000	10.336.000.000	10.765.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	181.884.589.700	202.926.954.800	206.574.954.800	208.184.954.800	246.952.132.500	249.209.132.500

No	Uraian	PAPBD	Proyeksi (Rp)				
		2018	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.047.508.835	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**874.118.520.284**	**632.426.258.900**	**636.261.559.300**	**637.981.900.550**	**970.036.020.650**	**974.183.472.950**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(114.606.769.221)**	**(13.640.194.000)**	**(13.640.194.000)**	**(13.640.194.000)**	**(13.640.194.000)**	**(13.640.194.000)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**119.274.097.250**	**38.640.194.000**	**38.640.194.000**	**38.640.194.000**	**38.640.194.000**	**38.640.194.000**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	119.274.097.250	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**4.667.328.030**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	286.076.682	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	4.381.251.348	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**114.606.769.221**	**13.640.194.000**	**13.640.194.000**	**13.640.194.000**	**13.640.194.000**	**13.640.194.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-

Sumber: PAPBD 2018 & hasil analisis

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi SILPA

Berdasarkan data beberapa tahun yang lalu, serta tahun dasar tahun anggaran 2018, diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif dan efisien serta sesuai dengan perencanaan, dengan kondisi tersebut maka SiLPA diproyeksikan tetap, yang disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024

Uraian	PAPBD	Proyeksi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	119.274.097.250	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000

Sumber: Hasil Analisis

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat. Pada periode tahun 2020-2024 diproyeksikan terjadi peningkatan belanja wajib dan mengikat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,56%. Total Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama berdasarkan data APBD Tahun 2018 sebesar Rp 689.362.287.130,- diproyeksikan sampai pada Tahun 2024 mencapai Rp. 941.628.209.850.

Adapun hasil proyeksi untuk 6 (enam) tahun kedepan untuk kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat melalui Tabel 3.16

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

No.	Uraian	PAPBD	Proyeksi				
		2018	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Belanja Tidak Langsung**	**684.694.959.100**	**762.858.538.900**	**791.498.374.500**	**819.405.599.250**	**885.653.969.150**	**916.628.209.850**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	395.570.492.700	435.073.829.800	456.827.522.300	479.668.899.300	503.652.344.300	528.834.962.300
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	95.973.005.000	112.273.889.000	115.412.558.000	118.733.077.000	122.085.911.000	125.405.707.000
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.215.000.000	7.215.000.000	7.215.000.000	7.215.000.000	7.215.000.000	7.215.000.000
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	561.721.700	581.295.800	581.295.800	581.295.800	581.295.800	581.295.800
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	181.884.589.700	202.926.954.800	206.574.954.800	208.184.954.800	246.952.132.500	249.209.132.500
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.006.952.000	4.306.875.400	4.368.695.900	4.468.119.250	4.577.261.900	4.755.848.150
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	483.198.000	480.694.100	518.347.700	554.253.100	590.023.650	626.264.100
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**4.667.328.030**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
1	Penyertaan Modal	286.076.682	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2	Pembayaran pokok utang	4.381.251.348	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B)	**689.362.287.130**	**787.858.538.900**	**816.498.374.500**	**844.405.599.250**	**910.653.969.150**	**941.628.209.850**

Sumber: Hasil Analisis

c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan Belanja Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta tahun dasar tahun anggaran 2018, total penerimaan daerah diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,71%. Dengan demikian dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Tabalong dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 10,84%, proyeksi ini disajikan pada Tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024

No	Uraian	PAPBD	Proyeksi				
		2018	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1.538.433.173.348	1.477.593.388.000	1.517.267.524.000	1.554.166.090.000	1.959.758.580.000	2.002.309.273.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	119.274.097.250	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000	38.640.194.000
	Total Penerimaan	**1.657.707.270.598**	**1.516.233.582.000**	**1.555.907.718.000**	**1.592.806.284.000**	**1.998.398.774.000**	**2.040.949.467.000**
	Dikurangi :						
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	689.362.287.130	787.858.538.900	816.498.374.500	844.405.599.250	910.653.969.150	941.628.209.850
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**968.344.983.468**	**728.375.043.100**	**739.409.343.500**	**748.400.684.750**	**1.087.744.804.850**	**1.099.321.257.150**

Sumber: Hasil Analisis

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas program *(money follow program). Money follow program* merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan *money follow program*, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (*money follow function*).

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka selanjutnya ditetapkan kebijakan terhadap alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 (tiga) kelompok prioritas sebagai berikut:

a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah termasuk belanja yang bersifat *mandatory spending.*
c. **Prioritas III,** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi kapasitas riil keuangan daerah menurut kelompok prioritas Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024

No	Uraian	PAPBD	Proyeksi				
		2018	2020	2021	2022	2023	2024
A	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	968.344.983.468	728.375.043.100	739.409.343.500	748.400.684.750	1.087.744.804.850	1.099.321.257.150
	PRIORITAS I		278,777,877,155	280,896,027,400	281,647,791,000	427,909,193,000	429,743,624,000
	PRIORITAS II		449,597,165,945	458,513,316,100	466,752,893,750	659,835,611,850	669,577,633,150
	PRIORITAS III		-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya.

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis terhadap kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir dan telaahan dokumen rencana lainnya, maka berikut ini disajikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Kabupaten Tabalong.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa

permasalahan Kabupaten Tabalong berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut:

4.1.1 Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong selama 2 (dua) tahun terakhir sejak tahun 2016 mulai menunjukkan peningkatan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pada periode 2012 sampai 2015 sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai menyentuh angka 2,41 persen. Penurunan tersebut diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Tabalong ini, yaitu pertambangan batubara. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong.

   Kondisi perekonomian yang mulai menanjak naik sejak tahun 2016 dan berlanjut ke Tahun 2017 (3,8 persen) masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Tabalong.
2. Persentase penduduk miskin di Tabalong masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Tabalong berada pada 6,09 persen, jauh diatas provinsi yang berada di angka 4,7 persen. Walau demikian, terdapat sisi positif dari upaya pemerintah bersama seluruh stakeholder untuk

penanggulangan masalah kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Tabalong pada periode 2015 sampai 2017. Hal yang perlu diwaspadai terkait masalah kemiskinan di Tabalong, yaitu kondisi kedalaman kemiskinan yang meningkat. Ini berarti, ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Tabalong semakin besar.

3. Angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong tahun 2014 sebesar 0,00087 cenderung meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2015 dan 2016 angka kriminalitas menjadi 0,00097 dan 0,00149. Selain itu, persentase jumlah kasus kriminalitas yang tertangani pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 97,43 persen ke 84,93 persen.
   Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tabalong, sebab banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dikurangi dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

4.1.2 Permasalahan Pelayanan Umum

1. Pendidikan

   Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Tabalong adalah masih rendahnya APK jenjang PAUD, SD sederajat, dan SMP sederajat, dan masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik :

a. Angka Partisipasi Kasar jenjang PAUD di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 sebesar 73,16 persen, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 77,49 persen.
b. Angka Partisipasi Kasar jenjang SD sederajat di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 sebesar 109,42 persen, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 115,37 persen.
c. Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP sederajat di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 sebesar 96,27 persen, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 98,79 persen.
d. Guru SD sederajat yang memiliki kualifikasi S1/D4 baru mencapai 87,95 %, sementara target nasional adalah 100 %.
e. Guru SMP sederajat yang memiliki kualifikasi S1/D4 baru mencapai 93,10 %, sementara target nasional adalah 100 %.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan yaitu:

a. Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular serta potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) :
   1) Tahun 2017 masih ada penemuan kasus TB paru sebanyak 221 orang atau 16,83 % dari 1.381 kasus klinis
   2) Tahun 2017 masih tingginya jumlah kasus penyakit tidak menular (hipertensi 4.288 kasus, diabetes mellitus 2.025 kasus, dan gangguan jiwa 1.686 kasus)
   3) Tahun 2017 angka kejadian malaria 0,8 per 1.000 penduduk

4) Tahun 2017 masih terdapat 146 kasus DBD positif dengan kasus kematian 1 orang

b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dimana pada tahun 2018 jumlah desa/kelurahan yang sudah mencapai UCI (*Universal Child Imunitation*) baru sebesar 90 persen.

c. Masih kurangnya sumber daya kesehatan, dimana rasio dokter umum baru mencapai 23 per 100.000 penduduk, seharusnya 40 per 100.000 penduduk, dan rasio dokter gigi baru mencapai 8 per 100.000 penduduk, seharusnya 11 per 100.000 penduduk

d. Masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, dimana masih ditemukannya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 169 per 100.000 kelahiran hidup, dan ditemukan kasus balita gizi kurang (*stunting*) pada tahun 2017 sebesar 426 orang.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu:

a. Belum optimalnya aksesibilitas antar wilayah
b. Masih rendahnya prasarana dan sarana pengairan
c. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
d. Belum optimalnya cakupan layanan air bersih yang aman
e. Masih diperlukan pembangunan prasarana jalan baru dalam rangka pengembangan perkotaan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan umum dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah :

a. Belum optimalnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
b. Belum terpenuhinya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu masih belum optimalnya penegakan peraturan daerah, masih terjadinya tindakan kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba.

6. Sosial

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Tabalong yaitu meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tabalong. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin menurut data BPS mencapai 15.003 orang (6,09 %). Masih terdapat jumlah anak terlantar sebanyak 1.452 orang, lansia terlantar sebanyak 423 orang, dan penyandang disabilitas sebanyak 647 orang.

Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari PSM, LKS, karang taruna, dan pekerja sosial.

7. Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 mencapai 3,88 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya kompetensi angkatan kerja terhadap kebutuhan dunia kerja di Kabupaten Tabalong, serta rendahnya jiwa kewirausahaan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

   a. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 sebesar 85,15. Angka ini lebih rendah dari IPG Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 88,60 dan nasional sebesar 90,96. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta peran perempuan dalam pembangunan
   b. Terkait status kota layak anak ; Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 menyandang sebagai status kota layak anak Rintisan, artinya Kabupaten Tabalong masih harus berkomitmen menuju kota layak anak. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang publik terbuka ramah anak.

9. Pangan

   Permasalahan bidang pangan adalah belum tersedianya sistem yang menjamin ketersediaan pangan yang cukup dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah untuk mendukung prioritas nasional.

10. Pertanahan

    Permasalahan bidang pertanahan adalah belum optimalnya penyediaan lahan untuk pembangunan.

11. Lingkungan Hidup

    Beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yaitu:

    a. Status mutu sungai di Tabalong tercemar ringan
    b. Belum optimalnya pengelolaan sampah

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    Permasalahan utama pada bidang ini adalah masih belum optimalnya tertib administrasi kependudukan. Hal ini dapat digambarkan dari cakupan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, akte nikah, akte kematian dan kartu keluarga yang belum mencapai 100 persen.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

    Permasalahan utama pada bidang ini adalah :

    a. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat
    b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa
    c. Belum optimalnya peran kelembagaan dan aparatur desa

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    Permasalahan pada bidang ini adalah partisipasi masyarakat sebagai peserta KB baru mengalami penurunan, khususnya pada metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOP/Metode Operasi Pria dan MOW/Metode Operasi Wanita).

15. Perhubungan

    Beberapa permasalahan bidang perhubungan yaitu:

    a. Kurangnya penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan pelayanan angkutan umum
    b. Belum optimalnya peningkatan, pengelolaan dan penataan perparkiran

16. Komunikasi dan Informatika

    Beberapa permasalahan bidang komunikasi dan informatika, yaitu:

    a. Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
    b. Belum maksimalnya penyediaan informasi, komunikasi publik dan keterjangkauan telekomunikasi

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

    Beberapa permasalahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yaitu:

    a. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif
    b. Masih banyaknya koperasi aktif yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
    c. Belum berkembangnya usaha koperasi
    d. Belum optimalnya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah menyebabkan tingkat pertumbuhan UKM rendah

18. Penanaman Modal

    Permasalahan pada bidang ini adalah :

    a. Belum tersedianya peta potensi investasi
    b. Masih belum optimalnya pelayanan perizinan bagi pelaku investasi.

19. Kepemudaan dan Olahraga

    Permasalahan pada bidang ini adalah belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

20. Statistik

Permasalahan pada bidang statistik adalah masih minimnya cakupan data dan informasi pembangunan.

21. Persandian

Beberapa permasalahan pada bidang persandian yaitu :

a. Belum termanfaatkannya bidang persandian dalam pengamanan informasi
b. Belum adanya regulasi yang mengatur keamanan informasi daerah

22. Kebudayaan

Permasalahan pada bidang kebudayaan adalah belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya daerah.

23. Perpustakaan

Permasalahan pada bidang perpustakaan adalah :

a. Masih rendahnya minat baca masyarakat
b. Belum optimalnya peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui literasi

24. Kearsipan

Permasalahan pada bidang kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip.

25. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan adalah :

a. Belum terpenuhinya penganekaragaman benih ikan, terutama ikan lokal
b. Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)

c. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan
d. Masih kurangnya produksi ikan gabus untuk mendukung prioritas provinsi dalam rangka penyediaan albumin

26. Pariwisata

Permasalahan utama bidang pariwisata adalah obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan obyek wisata budaya di Kabupaten Tabalong belum dikelola secara profesional, terutama sarana dan prasarana. Selain itu, kualitas sumberdaya pengelola wisata dan informasi kepariwisataan juga masih belum memadai sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

27. Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

a. Belum optimalnya pengembangan swasembada pajale berkelanjutan
b. Belum terpenuhinya kebutuhan daging (sapi, kambing dan itik) dan telur
c. Masih rendahnya kualitas produksi perkebunan

28. Perdagangan

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah :

a. Belum memadainya prasarana dan sarana perdagangan
b. Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar
c. Belum efektifnya pembinaan distribusi lokal, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan lokal yang kondusif dan dinamis
d. Masih rendahnya akses pasar bagi hasil industri lokal

29. Perindustrian

Permasalahan utama bidang perindustrian adalah :

a. Rendahnya daya saing produk IKM
b. Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah yang berbasis potensi lokal

4.1.3 Permasalahan Penunjang Pelayanan Umum

1. Perencanaan

Permasalahan pada bidang perencanaan adalah :

a. Belum konsistennya implementasi perencanaan pembangunan
b. Masih adanya ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan

2. Keuangan

Permasalahan pada bidang keuangan adalah :

a. Masih besarnya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
b. Kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas.
c. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah.
d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah :

a. Belum tersedianya SDM aparatur yang sesuai dengan analisis beban kerja
b. Belum terpenuhinya SDM aparatur yang sesuai dengan kompetensi jabatan

4. Penelitian dan Pengembangan

   Permasalahan dalam penelitian dan pengembangan adalah :

   a. Belum terpenuhinya kajian penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan daerah
   b. Belum terlaksananya sistem inovasi daerah
   c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam pembangunan.

5. Administrasi Pemerintahan

   Permasalahan dalam administrasi pemerintahan adalah belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

6. Pengawasan

   Permasalahan dalam pengawasan adalah belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis Kabupaten Tabalong disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Tabalong ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional. Isu-isu strategis perlu dikorelasikan dengan isu dan kebijakan nasional maupun regional khususnya yang memberikan

manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan Kabupaten Tabalong sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tabalong perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi penekanan pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan dari pusat dan provinsi. Di samping itu, RPJMD 2019-2024 ini juga harus mengacu pada sasaran pokok dan arahan kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD dan RTRW Kabupaten Tabalong.

4.2.1 Telaahan Isu Strategis Internasional

- **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs)**

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita kenal dengan istilah SDGs merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *Millenium Development* Goals (MDGs). Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan SDGs bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Terdapat 17 pernyataan tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi:

a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
g. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
i. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
j. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
k. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
m. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
n. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
o. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,

menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti- kan kehilangan keanekaragaman hayati.

p. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

q. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.2 Telaahan Isu Strategis Nasional

- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

Penyusunan RPJMD harus mempedomani RPJMN, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Dalam rangka mempedomani RPJMN, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN. Penelaahan terhadap RPJMN dilakukan terhadap RPJMN 2015-2019. Tahun terakhir periode RPJMN adalah 2019, dimana pada tahun tersebut RPJMD Kabupaten Tabalong masih dalam tahap penyusunan. Hal ini disebabkan waktu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih adalah Tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan kondisi mengenai periode RPJMN dan RPJMD Kabupaten Tabalong, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ini, akan ditelaah RPJMN 2015-2019. Berikut ini disajikan visi, misi, dan agenda prioritas (nawa cita) dalam RPJMN.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan agenda prioritas Pemerintah (NAWA CITA) meliputi :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 122, menyatakan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya dengan pembiayaan melalui APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan tentang urusan pemerintahan umum diundangkan.

4.2.3 Telaahan Isu Strategis Provinsi

Telaahan dinamika Provinsi dilakukan dengan melakukan telahaan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021, dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Kalimantan Selatan.

Secara administratif Kabupaten Tabalong berada di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga keberadaannya harus mampu mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, perencanaan pembangunan kabupaten/kota harus memperhatikan perencanaan pembangunan provinsi. Untuk itu, perumusan isu strategis Kabupaten Tabalong memperhatikan isu-isu strategis dan kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Beberapa isu strategis yang menjadi isu pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Daya Saing Perekonomian Daerah
3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan
4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Sosial
5. Kinerja Pemerintahan Daerah

Visi pembangunan Kalimantan Selatan yang ingin diwujudkan pada periode 2016–2021 adalah :

"Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan)
Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Tujuan dari visi misi provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan local;
5. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang;
6. Meningkatkan daya saing perekonomian;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah

Adapun sasaran pembangunan yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
4. Meningkatnya pemahaman keagamaan;
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
6. Meningkatnya kualitas layanan publik;
7. Meningkatnya pendanaan daerah;
8. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah;
9. Terwujudnya aparatur pemerintah yang professional dan pemerintahan akuntabel;
10. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
11. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat;
12. Terselenggaranya PON;
13. Meningkatkan ketahanan budaya;
14. Meningkatnya etos kerja, moralitas, sikap, disiplin, kreatifitas, dan kepedulian;
15. Meningkatnya kerukunan antar dan inter umat beragama;
16. Meningkatnya kualitas budaya masyarakat;
17. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar;
18. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian;
19. Terwujudnya mandiri pangan;
20. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
21. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa;

22. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata; dan
23. Meningkatnya nilai investasi dalam aktivitas perekonomian.

4.2.4 Telaahan Isu Strategis Kabupaten Tabalong

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025, merupakan pedoman pembangunan 20 tahun Kabupaten Tabalong. Pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong memiliki visi:

"KABUPATEN TABALONG MAJU, ADIL DAN LESTARI (M A L)"

Visi "Tabalong Maju, Adil dan Lestari" mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Tabalong memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan yang dicapai memberikan kemakmuran lahir dan bathin bagi setiap lapisan masyarakat dengan adanya jaminan kebebasan menjalankan Agama secara baik dan benar serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh akses akan hasil-hasil pembangunan secara adil. Hal tersebut dilaksanakan dengan pola pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan sumberdaya lokal berwawasan lingkungan untuk membentuk fondasi ekonomi dan sosial yang kuat dan berakar pada kemandirian sehingga menjamin kemajuan dan keadilan yang bersifat lestari dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut pada RPJPD Kabupaten Tabalong, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Tabalong tahun 2006-2025, sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang tinggi keimanan dan ketaqwaannya, berkualitas dalam aspek kesehatan, pendidikan,

dan sosial-budaya, serta menguasai dan menerapkan IPTEK secara optimal bagi kemajuan daerah, nusa, dan bangsa;

b. Mengembangkan ekonomi kearah agribisnis yang berdaya saing tinggi dan berbasis sumber daya lokal dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi partisipasi kelembagaan sosial ekonomi secara optimal;
c. Menyelenggarakan dan mendorong pengelolaan SDA berwawasan lingkungan secara cermat dan efisien serta menjaga kualitas lingkungan yang layak bagi kelestarian kehidupan;
d. Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana yang mantap dan handal untuk mendukung perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat khususnya yang berorientasi agribisnis;
e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat memberikan pelayanan publik secara efisien dan menjamin kepastian hukum bagi penciptaan kehidupan yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sedikitnya memuat Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025, yaitu :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal.

   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Indeks Pembangunan Manusia.
2. Meningkatnya perekonomian daerah dan terkendalinya ketimpangan pendapatan.

   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks gini.
3. Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan

   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Kontribusi Pertanian terhadap PDRB.

4. Menurunnya tingkat kemiskinan
   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Persentase penduduk miskin.
5. Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal.
   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Tingkat Pengangguran Terbuka.
6. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Indek Kualitas Lingkungan Hidup
7. Meningkatnya askses dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten.
   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah dan persentase jalan dalam kondisi mantap.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum.
   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Persentase penduduk berakses air minum.
9. Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.
   Sasaran pokok ini memiliki indikator kinerja: Nilai SAKIP, Opini BPK, dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 - 2034, tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Tabalong adalah mewujudkan pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan memprioritaskan pengembangan agribisnis berbasis sumber daya lokal, industri dan usaha pertambangan yang memperhatikan

kelestarian sumber daya alam, daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Tabalong.

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Tabalong terdiri dari:

a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah;
   1) menjaga keterkaitan antar kawasan kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
   2) Mengembangkan infrastruktur PKL, PPK, dan PPL;
   3) Menjaga keterkaitan antara PKL dengan PPK, dan PPL;
   4) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
   5) Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan telekomunikasi;
   6) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
   7) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan persampahan; dan
   8) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sanitasi.
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten;

1) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
2) Meningkatkan manajemen transportasi darat; dan
3) Mengembangkan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional.

c. Perwujudan pengembangan kawasan strategis yang mendukung berkembangnya agribisnis;
   1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
   2) Mengoptimalkan pengembangan perkebunan karet, peternakan sapi, pertanian tanaman pangan, perbenihan dan perbesaran ikan;
   3) Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
   4) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan agribisnis.

d. Pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
   1) Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
   2) Menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya;
   3) Mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat;

4) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
5) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
6) Membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru dalam kawasan lindung;
7) Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
8) Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
9) Membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
10) Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung;
11) Memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung.

e. Pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan;
1) Memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara;
2) Menetapkan wilayah pertambangan batuan; dan
3) Mengelelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung

dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang.

f. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
   1) Mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
   2) Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   3) Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
   4) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
   5) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
   6) Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan;
   7) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
   8) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan terbarukan untuk menjamin keberlanjutannya;
   9) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
   10) Menegakan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten.

g. Pengembangan industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga;
   1) Mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan menengah dengan akses transportasi;

2) Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal;
3) Mengembangkan industri yang ramah lingkungan; dan
4) Mengembangkan pasar industri kecil dan rumah tangga.

h. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
1) Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
2) Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
3) Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
4) Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
5) Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
6) Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.

i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
1) Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
3) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan

4) Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan

Adapun Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tabalong, meliputi:

a. Pusat-pusat kegiatan;
b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

4.2.5 Telaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut telaahan RPJMD daerah disekitar Kabupaten Tabalong, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten pada 3 (tiga) provinsi.

Tabel 4.1.
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	2016-2021	Visi: "Paser yang Semakin Sejahtera, Merata, Berdaya Saing danBerkelanjutan" Misi: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan pemukiman; 2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan; 3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal.
			Arah Kebijakan Kabupaten Paser periode 2016–2020 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan pemukiman. 2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. 3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. 4. Kohesivitas sosial, budaya, dan adat istiadat lokal.
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan	2017-2022	Visi: "Hulu Sungai Utara MANTAP" Misi: 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif. 2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya daerah. 3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumberdaya lokal dengan berlandaskan potensi daerah. 4. Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektpr pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal. 5. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam.
			Arah Kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2013–2017 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Tabalong, sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahn dan infrastruktur lainnya. 2. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana pemukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya. 3. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian 4. Meningkatkan pengembangan dan konservasi sumber daya air untuk pengoptimalan perlindungan dan pemanfaatan lahan rawa.
3	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	2016-2021	Visi: "Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju danSejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia" Misi: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dankesehatan;

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan; 4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan; 5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan; 6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah; 7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.
			Arah Kebijakan Kabupaten Balangan periode 2016–2021 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Tabalong, sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. 2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. 4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.
4	Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	2013-2018 (telah berakhir tahun ini dan sedang menyusun RPJMD 2018-2023)	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Paser, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan RPJMD Kabupaten Balangan

4.2.6 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat

ditetapkan isu strategis yang memiliki daya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong.

Berikut ini isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong, yaitu :

1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

a. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM agar memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat.
b. Pemberian kemudahan berusaha dan kondisi yang kondusif untuk mendorong tumbuhnya investasi.
c. Peningkatan pengelolaan sektor pertanian untuk menunjang perekonomian daerah dan ketersediaan pangan.
d. Peningkatan pembangunan dan keberdayaan ekonomi masyarakat desa.
e. Meningkatkan kemandirian pangan;
f. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
g. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa;
h. Memperkuat pondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
i. Penurunan angka kemiskinan.
j. Pengembangan sentra industri.
k. Pengembangan ekonomi dengan menggeser dominasi sektor pertambangan kepada sektor non-tambang terutama sektor yang berkontribusi besar dan pertumbuhan yang baik.

2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

a. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
b. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
c. Penurunan *stunting*.
d. *Universal Health Coverage* (UHC) /Jaminan Kesehatan Nasional.

e. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan.
f. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.

3. PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

a. Penyediaan akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100%.
b. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas.
d. Pemanfaatan dan pengendalian Rencana tata ruang kawasan strategis.
e. Pembangunan kota tanpa kumuh.

4. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

a. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai di Tabalong.
b. Menyelenggarakan dan mendorong pengelolaan SDA berwawasan lingkungan.
c. Pembangunan kampung iklim.

5. PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

a. Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas dan cakupan pelayanan publik.
b. Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pembangunan.
c. Perencanaan dan penganggaran responsif gender.
d. Kebijakan pengaturan penyelenggaran *event* seni dan budaya se Provinsi Kalimantan Selatan.
e. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan tetap dibiayai melalui APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan tentang urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong untuk periode 2019-2024 memberi arah yang fokus bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong. Visi Kabupaten Tabalong sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2019-2024. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong.

Mempedomani hal-hal yang diuraikan diatas, maka ditetapkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, adalah:

MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG LEBIH AGAMAIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI

Makna dari pernyatan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais; merupakan pendekatan membumi melalui pembiasaan dalam rangka mengamalkan nilai-nilai agama pada kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk hidup lebih agamais dan modem dalam tatanan sosial kemasyarakatan serta produktif dan bermanfaat dalam bekerja. Nilai-nilai agama yang seharusnya mendapat perhatian tersebut seperti kejujuran, kedisiplinan, musyawarah, keikhlasan, kemandirian, profesionalisme, keadilan, amanah, kebersamaan/persatuan, aspiratif/akomodatif, tawakal dan lain-lain.

Kabupaten Tabalong yang Lebih Sejahtera; merupakan pendekatan lahiriah untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan

nyaman untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, makmur, sehat dan damai.

Kabupaten Tabalong yang Lebih Mandiri; merupakan pendekatan kelembagaan dan profesionalitas dalam rangka perkuatan sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara lebih bijak dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia yang dioptimalkan, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan pemberdayaan lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif.

5.2. Misi

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong didukung oleh 3 (tiga) misi, yaitu:

1. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais**

   Misi ini mengawal kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Hal pokok yang menjadi pusat perhatian adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berahlak mulia (Tabalong Berkualitas).

2. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

   Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian akan terwujud kualitas hidup masyarakat yang peningkatannya dirasakan secara

signifikan, serta terjadinya penurun angka kemiskinan yang nyata (Tabalong Sejahtera).

3. Mewujudkan Kemandirian Daerah

Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan pada tercapainya sistem yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Dengan kemandirian inilah akan terwujud kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yaitu :

"Percepatan Pengembangan Ekonomi Terutama Sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Infrastruktur Berkualitas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Utara Kalimantan Selatan".

5.3. Tujuan dan Sasaran

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong 2019-2024 merupakan kelanjutan dari RPJPD priode sebelumnya yaitu 2014-2019. Misi pembangunan periode saat ini merupakan upaya untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun yang terakhir. Untuk itu, tujuan dan sasaran pembangunan juga masih merupakan kelanjutan dari periode pembangunan yang lalu, dengan target pembangunan yang mengarah ke pencapaian kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah yang semakin baik.

Masing-masing misi pembangunan jangka menengah diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran yang terukur. Keterukuran tujuan dan sasaran diindikasikan dengan indikator

kinerja dan target per tahun selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong 2019-2024 disajikan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais

Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif

Sasaran 1.1: Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat

Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sasaran:

2.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal
2.2. Menurunnya tingkat kemiskinan
2.3. Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal
2.4. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
2.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Daerah

Tujuan 3: Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan

Sasaran:

3.1. Terkendalinya ketimpangan pendapatan
3.2. Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan
3.3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3.4. Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi

3.5. Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten
3.6. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum
3.7. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
3.8. Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Tujuan 4: Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel

Sasaran 4.1: Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.

Tabel 5.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2018	2020	2021	2022	2023	2024	
VISI: MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG LEBIH AGAMAIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI										
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais										
1	Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif									
	1.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat	a Indeks kerukunan umat beragama								
		b Angka Kriminalitas		13,0	12,0	11,5	11,0	10,5	10,0	10,0
Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,40	72,17	72,88	73,60	74,33	75,07	75,07
	2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal	a Angka Harapan Hidup	Tahun	70,01	70,21	70,34	70,47	70,60	70,73	70,73
		b Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,99	9,22	9,45	9,69	9,93	9,93
		c Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	13,10	13,43	13,77	14,11	14,46	14,46

Tujuan		Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2018	2020	2021	2022	2023	2024	
		2.2	Menurunnya tingkat kemiskinan		Persentase penduduk miskin	Persen	5,95	5,85	5,70	5,65	5,60	5,55	5,55
		2.3	Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,1	3,09	3,08	3,07	3,06	3,05	3,05
		2.4	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial		Persentase PPKS yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		2.5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	70,84	71,64	72,51	73,38	74,25	75,12	75,12
				b	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	85,20	85,34	85,53	85,72	85,91	86,10	86,10
Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Daerah													
3	Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan				Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,82	3,87	3,91	3,95	3,99	4,03	4,03
		3.1	Terkendalinya ketimpangan pendapatan		Indeks gini		0.328	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
		3.2	Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	a	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	11	11,02	11,04	11,06	11,08	11,15	11,15
				b	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	8,61	10,42	11,47	12,62	13,89	15,29	15,29

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2018	2020	2021	2022	2023	2024	
	3.3	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Indeks Ketahanan Pangan		81,11	82,66	83,21	83,84	84,03	84,72	84,72
	3.4	Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi	a	Persentase UKM Aktif	Persen	66	70	73	76	79	82	82
			b	Persentase koperasi aktif	Persen	67	70	74	78	82	86	86
			c	Kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	9,50	11,12	12,03	13,02	14,08	15,24	15,24
	3.5	Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten	a	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah	Persen	80	82	83	85	87	90	90
			b	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	78,02	80	81.26	82.54	83,87	85,25	85,25
	3.6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,22	66,12	66,73	67,34	67,96	68,58	68,58
	3.7	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		71,10	71,16	71,19	71,22	71,25	71,28	71,28
	3.8	Meningkatnya kualitas pembangunan desa		Indeks desa membangun		0,5999	0,6875	0,6910	0,6950	0,7050	0,7150	0,7150

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2018	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel				Indeks Reformasi Birokrasi		50	67	78	79	80	82	82
		4.1	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.	a	Nilai SAKIP (predikat)		B	B	B	BB	BB	A	A
				b	Opini BPK (predikat)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				c	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		80	85	85	85	85	85	85
				d	Tingkat Kemandirian Daerah		10,70	13,61	13,66	13,79	13,80	13,90	13,90

2.6. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2019-2024

Program politik tahun 2020-2024 yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye pemilihan kepala daerah, merupakan program utama yang diharapkan mampu mengkreasi lompatan-lompatan ekonomi dengan mewujudkan dan mengawal lokomotif-lokomotif pembangunan ekonomi daerah.

Potensi daerah akan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat dengan cara yang tepat. Kemudian mendorong dan mengawal pengelolaan sumber-sumber/pusat-pusat pengembangan ekonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat dengan strategi yang terbaik, serta melakukan kerjasama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga lainnya maupun pihak luar negeri dalam bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Harapannya, pertumbuhan bukan sekedar tinggi, melainkan juga berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan: 1). Pertumbuhan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan 2). Ketersediaan akses hasil pembangunan.

Program politik ini akan terdistribusi dan berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi jangka menengah daerah sebagai berikut :

A. Upaya pencapaian Misi I Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamais, dilakukan melalui :

1. Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum.

   Agar nilai-nilai keagamaan dapat diimplementasikan dengan lebih baik dimasyarakat, masih diperlukan peran pemerintah baik dalam hal pembinaan maupun penegakan hukum. Program terkait peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum ini antara lain :

   a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
   b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
d. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Melalui program–program tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penurunan pelanggaran hukum / tindak kriminalitas.

2. Pemantapan implementasi nilai-nilai dasar keagamaan dalam aktivitas pembangunan.

Pemantapan implementasi nilai-nilai dasar keagamaan dalam aktivitas pembangunan dilakukan melalui kegiatan tausiyah yang secara rutin dilakukan di semua organisasi perangkat daerah, menggalakkan shalat berjamaah pada hari kerja ke tempat ibadah terdekat dan Magrib Mengaji.

3. Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah, khususnya yang bertugas didaerah terpencil, serta aparat dan pamong desa.

Berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan beban kerja, akan diberikan tunjangan terhadap aparat pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai beban kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tumbuh rasa keadilan dan mampu meningkatkan etos kerja aparat pemerintah daerah serta diharapkan akan mengurangi/menghilangkan praktek korupsi oleh aparat pemerintah daerah.

4. Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat.

Kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya pelayanan langsung akan terus dilakukan perbaikan, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi infrastruktur pendukungnya. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan Smart City dan pembangunan mall pelayanan publik. Kualitas pelayanannya akan terus

dievaluasi dan diukur berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat.

B. Upaya pencapaian Misi II Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dilakukan melalui :

1. Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas.

   Pemerintah akan memastikan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana amanat perundang-undangan bisa diakses oleh semua penduduk melalui program-program berikut :

   a. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
   b. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   c. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   e. Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Nonformal dan Informal

   Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai dengan memanfaatkan semua potensi pembiayaan yang tersedia baik dari peran serta masyarakat maupun dari unsur pemerintahan yang lebih tinggi.

   Melalui program-program tersebut diharapkan terjadi peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang serta peningkatan angka melek huruf / pengurangan angka buta aksara.

2. Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaran pendidikan akan didukung oleh perangkat daerah lain dalam rangka memastikan pelayanan pendidikan bisa diakses oleh masyarakat melalui kegiatan pendukung, antara lain:

a. Penyediaan prasarana jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan yang memadai.
b. Peningkatan penyediaan prasarana angkutan yang murah dan berkualitas.
c. Program Pengembangan Perpustakaan

3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program-program berikut :

a. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
b. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
c. Program Sumber Daya Kesehatan
d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD

Melalui program-program tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan usia harapan hidup.

4. Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas.

Pemerintah juga akan memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dapat diakses oleh masyarakat melalui kegiatan :

a. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan
b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
c. Penyediaan obat dan pelayanan kefarmasian
d. Penyediaan dana JKN dan Jamkesda

e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
f. Program Perawatan dan Pengembangan SDM

5. Pemantapan peningkatan perlindungan sosial masyarakat.

Peningkatan perlindungan sosial masyarakat dilaksanakan melalui program :

a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
d. Program Keluarga Harapan

Selain itu pemerintah daerah akan meng-adaptasi program Nasional ke dalam kegiatan di daerah dalam bentuk yang lebih luas, seperti pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi KUBE daerah berdasarkan sektor-sektor ekonomi di masyarakat, kebijakan penyediaan rastra berbasis beras petani lokal. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat juga ditempuh dengan kebijakan perluasan layanan masyarakat miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

6. Revitalisasi pemanfaatan kawasan/area lumbung pangan daerah.

Salah satu sektor yang diharapkan bisa menggeser kontribusi pertambangan terhadap perekonomian daerah adalah sektor pertanian. Maka kawasan lumbung pangan atau yang berpotensi menjadi lumbung pangan daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pengembangan Daerah Irigasi
b. Pengendalian banjir

c. Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang mendukung peningkatan produksi dan produktifitas bahan pangan

7. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelayanan publik.

Optimalisasi dalam pelayanan publik menuntut dukungan infrastruktur yang baik, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan mall pelayanan publik.

8. Optimalisasi terwujudnya aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetap memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan. Melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mengukur dan memastikan kualitas lingkungan hidup dalam kondisi yang terus mengalami peningkatan. Program yang dilaksanakan antara lain :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
b. Program Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup
c. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
d. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang didalamnya terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

9. Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer.

   Dana transfer yang diterima pemerintah daerah akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Penyusunan rencana kinerja yang berkualitas, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel serta pengawasan dan evaluasi yang baik menjadi hal yang mutlak diperlukan.

   Indikator yang menunjukkan pelaksanaan program ini antara lain opini BPK, nilai LPPD dan Nilai SAKIP daerah.

10. Memanfaatkan alternatif pembiayaan.

    Berdasarkan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar perlu ditingkatkan sedangkan alokasi anggaran pada APBD sangat terbatas, maka pemerintah daerah akan memanfaatkan alternatif pembiayaan lain berupa pinjaman daerah sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

C. Upaya pencapaian Misi III Mewujudkan Kemandirian Daerah, dilakukan melalui :

1. Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar

   Pengelolaan peningkatan mutu bahan olahan karet melalui pemantapan pelaksanan Program Gemas Mekar (Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet) dengan upaya menambah unit-unit pengolah pemasaran bahan olahan karet terutama diwilayah atau desa potensial penghasil karet, peningkatan pengetahuan dan peran koperasi petani karet dan bantuan permodalan.

2. Memperkuat daya saing produk UMKM

   Penguatan daya saing hasil produksi UMKN diupayakan melalui peningkatan kualitas produk, fokus dan konsisten terhadap jenis produk yang dihasilkan, mengamati dan

menentukan segmen pasar serta pemanfaatan teknologi informasi.

3. Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih

   Penyiapan tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih akan dicapai melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, yang akan dilakukan melalui program-program berikut :

   a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
   b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

4. Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama/termasuk pola Syariah

   Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah agar dapat merealisasikan akses langsung pelaku usaha mikro dan kecil terhadap dana bergulir melalui skim syariah tanpa perantara.

5. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur multifungsi.

   Akan dibangun Mall Pelayanan Publik serta infrastruktur pendukung yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan daerah.

6. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi

   Kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dilaksanakan dengan program :

   a. Pembangunan dan peningkatan (penguatan/perluasan) jalan dan jembatan untuk membuka akses wilayah-wilayah potensial pertanian, perkebunan dan pariwisata.
   b. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan.
   c. Penataan dan modernisasi pasar-pasar mingguan.
   d. Penataan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan.

e. Penataan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
f. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
g. Peningkatan pelayanan angkutan agar dapat menjangkau semua kecamatan.

7. Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah.

   Kebijakan peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah dilaksanakan dengan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Optimalisasi penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam pembinaan desa

   Pembangunan desa dan masyarakat desa diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa (desa tertinggal, desa maju dan desa mandiri). Program terkait pembangunan masyarakat dalam pembinaan desa antara lain :

   a. Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
   b. Program Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan
   c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

9. Melanjutkan dan menyempurnakan proses pembentukan dan pelaksanaan DANA ABADI.
10. Optimalisasi peningkatan PAD.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, strategi yang telah dipilih, dijabarkan menjadi arah kebijakan. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Penentuan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong menjadi dasar bagi pemilihan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Program pembangunan daerah disajikan pada Tabel 6.2 berdasarkan sasaran pada setiap misi.

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Visi: "Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri"						
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais						
1	Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif	1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat	1.1.1	Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	a. Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamais.
						b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat.
				1.1.2	Penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentramanan dan kenyamanan	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.
						b. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat						
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal.	2.1.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat
				2.1.2	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
		2.2	Menurunnya tingkat kemiskinan	2.2.1	Penanggulangan kemiskinan yang terpadu	Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin
		2.3	Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal	2.3.1	Peningkatan pendapatan riil per kapita	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja
		2.4	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	2.4.1	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan
		2.5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.5.1	Pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
						b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
						c. Meningkatkan keluarga sejahtera.
Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Daerah						
3	Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	3.1	Terkendalinya ketimpangan pendapatan	3.1.1	Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas	a. Meningkatkan potensi, kapasitas produksi dan produktivitas pertanian.
		3.2	Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan			b. Mengembangkan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif produk daerah.
		3.3	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	3.3.1	Peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan	Meningkatkan koordinasi yang sinergi lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
		3.4	Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi	3.4.1	Peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi	a. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
						b. Meningkatkan kapasitas manajemen usaha.
						c. Meningkatkan pengembangan IKM
		3.5	Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten	3.5.1	Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang berkualitas dan merata	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
						b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sanitasi
		3.6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum			Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air.
		3.7	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	3.7.1	Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	a. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan.
						b. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lahan kritis
						c. Mendorong upaya penurunan emisi

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
		3.8	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	3.8.1	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah.
						b. Menguatkan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
4	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	4.1	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	4.1.1	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel.
						b. Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur ke arah kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan.
				4.1.2	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik	Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi (TI).
				4.1.3	Perwujudan manajemen perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daera dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perencanaan pembangunan lintas sektor.
						b. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.
						c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Tabel 6.2.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais															
Tujuan 1 :															
Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif															
Sasaran 1.1 :															
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat															
Program :															
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan	Indeks kerukunan umat beragama			11,084,044,650		11,321,880,100		11,349,751,000		17,335,579,000		17,408,617,000		68,499,871,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Seluruh Kecamatan
	Angka Kriminalitas	13,0	12,0		11,5		11,0		10,5		10,0		10,0		

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat															
Tujuan 2 :															
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat															
Sasaran 2.1 :															
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal															
Program :															
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial-Budaya serta Penerapan IPTEK	Angka Harapan Hidup	70,01 tahun	70,21 tahun	190,566,881,500	70,34 tahun	192,087,160,000	70,47 tahun	192,599,910,000	70,60 tahun	292,936,574,000	70,73 tahun	294,192,888,000	70,73 tahun	1,162,383,413,500	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,62 tahun	8,99 tahun		9,22 tahun		9,45 tahun		9,69 tahun		9,93 tahun		9,93 tahun		

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Harapan Lama Sekolah	12,86 tahun	13,10 tahun		13,43 tahun		13,77 tahun		14,11 tahun		14,46 tahun		14,46 tahun		Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 2.2 :															
Menurunnya tingkat kemiskinan															
Program :															

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Program Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5,95 persen	5,85 persen	9,067,734,000	5,70 persen	9,173,539,500	5,65 persen	9,197,498,000	5,60 persen	14,005,386,000	5,55 persen	14,065,157,000	5,55 persen	55,509,314,500	Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sasaran 2.3 :															
Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal															
Program :															
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,1 persen	3,09 persen	1,541,700,000	3,08 persen	1,602,349,500	3,07 persen	1,605,867,000	3,06 persen	2,466,105,000	3,05 persen	2,476,257,000	3,05 persen	9,692,278,500	Dinas Tenaga Kerja
Sasaran 2.4 :															
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial															
Program :															

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase PPKS yang dilayani	100 persen	100 persen	2,100,000,000	100 persen	2,129,733,500	100 persen	2,135,214,000	100 persen	3,253,921,000	100 persen	3,267,762,000	100 persen	12,886,630,500	Dinas Sosial
Sasaran 2.5 :															
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															
Program :															
Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,84	71,64	1,700,000,000	72,51	1,744,466,500	73,38	1,748,637,000	74,25	2,674,719,000	75,12	2,685,919,000	75,12	10,553,741,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,20	85,34		85,53		85,72		85,91		86,10		86,10		

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah															
Tujuan 3 :															
Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan															
Sasaran 3.1 :															
Terkendalinya ketimpangan pendapatan															
Program :															
Program Peningkatan Ekonomi dan Pengendalian Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0.328	0,32	11,410,020,500	0,31	11,615,544,600	0,30	11,644,749,000	0,29	17,767,186,000	0,28	17,842,379,000	0,28	70,279,879,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 3.2 :															
Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan															
Program:															

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Program Pengembangan Agribisnis Terpadu	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	11 persen	11,02 persen	34,951,173,700	11,04 persen	35,349,597,500	11,06 persen	35,442,186,000	11,08 persen	53,986,382,000	11,15 persen	54,217,048,000	11,15 persen	213,946,387,200	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	8,61 persen	10,42 persen		11,47 persen		12,62 persen		13,89 persen		15,29 persen		15,29 persen		
Sasaran 3.3 :															
Meningkatnya ketahanan pangan daerah															
Program :															
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	81,11	82,66	2,734,773,000	83,21	2,802,580,000	83,84	2,809,338,000	84,03	4,295,383,000	84,72	4,313,400,000	84,72	16,955,474,000	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 3.4 :															
Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi															

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Program :															
Program Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi	Persentase UKM aktif	66 persen	70 persen	1,652,589,800	73 persen	1,679,715,000	76 persen	1,689,534,000	79 persen	2,581,710,000	82 persen	2,592,263,000	82 persen	10,195,811,800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi aktif	67 persen	70 persen		74 persen		78 persen		82 persen		86 persen		86 persen		
	Kontribusi industri terhadap PDRB	9,50 persen	11,12 persen		12,03 persen		13,02 persen		14,08 persen		15,24 persen		15,24 persen		
Sasaran 3.5 :															
Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten															
Program :															
Program Peningkatan Akses, Mobilitas dan Kualitas Jalan	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah	80 persen	82 persen	87,700,000,000	83 persen	88,277,732,000	85 persen	88,518,974,000	87 persen	133,802,425,000	90 persen	134,370,724,000	90 persen	532,669,855,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	78,02 persen	80 persen		81,26 persen		82,54 persen		83,87 persen		85,25 persen		85,25 persen		

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sasaran 3.6 :															
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum															
Program :															
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akses Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	65,22 persen	66,12 persen	26,167,316,700	66,73 persen	26,341,453,900	67,34 persen	26,412,306,000	67,96 persen	40,155,101,000	68,58 persen	40,327,617,000	68,58 persen	159,403,794,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 3.7 :															
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan															
Program :															
Program Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,10	71,16	33,496,040,000	71,19	31,905,934,000	71,22	31,988,102,000	71,25	48,157,985,000	71,28	48,360,128,000	71,28	193,908,189,000	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sasaran 3.8 :															
Meningkatnya kualitas pembangunan desa															
Program :															
Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,5999	0,6875	12,008,165,100	0,6910	12,104,978,700	0,6950	12,137,839,000	0,7050	18,529,181,000	0,7150	18,609,667,000	0,7150	73,389,830,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tujuan 4 :															
Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel															
Sasaran 4.1 :															
Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.															

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019-2024

Misi /Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Program:															
Program Peningkatan Pengelolaan dan Kinerja Pemerintahan Daerah serta Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	206,245,819,950	B	208,124,894,500	BB	208,701,995,550	BB	318,088,383,650	A	319,453646,950	A	1,260,614,740,600	Seluruh Perangkat Daerah
	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	85		85		85		85		85		85		
	Tingkat Kemandirian Daerah	10,70	13,61		13,66		13,79		13,80		13,90		13,90		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan dan seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja. target dan pagu indikatif setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan. optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Kerangka pendanaan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1 memuat data yang sama dengan kerangka pendanaan pada Bab III RPJMD ini. Kapasitas riil keuangan daerah digunakan untuk membiayai belanja langsung dalam bentuk program perangkat daerah.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Tabalong, maka ditetapkan program perangkat daerah Kabupaten Tabalong untuk periode pembangunan 2019-2024. sebagaimana disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

KAPASITAS RIIL / BELANJA	PAPBD	PROYEKSI					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**968.344.983.468**	**731.748.715.300**	**728.375.043.100**	**739.409.343.500**	**748.400.684.750**	**1.087.744.804.850**	**1.099.321.257.150**
BELANJA DAERAH	**1.653.039.942.569**	**1.449.798.796.000**	**1.491.233.582.000**	**1.530.907.718.000**	**1.567.806.284.000**	**1.973.398.774.000**	**2.015.949.467.000**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**778.921.422.285**	**805.605.363.500**	**858.807.323.100**	**894.646.158.700**	**929.824.383.450**	**1.003.362.753.350**	**1.041.765.994.050**
Belanja Pegawai	502.248.647.700	526.962.996.300	559.350.288.300	584.342.123.900	610.639.348.650	638.120.540.850	666.837.781.550
Belanja Hibah	78.117.076.050	33.463.195.000	38.669.440.000	43.669.440.000	48.669.440.000	53.669.440.000	58.669.440.000
Belanja Subsidi							
Belanja Bantuan Sosial	8.443.600.000	38.330.640.000	40.284.640.000	42.284.640.000	44.284.640.000	46.284.640.000	48.284.640.000
Belanja Bunga		-					
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.180.000.000	8.349.000.000	9.576.000.000	9.775.000.00	10.046.000.000	10.336.000.000	10.765.000.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	181.884.589.700	190.525.362.700	202.926.954.800	206.574.954.800	208.184.954.800	246.952.132.500	249.209.132.500
Belanja Tidak Terduga	2.047.508.835	7.974.169.500	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	**874.118.520.284**	**644.193.432.500**	**632.426.258.900**	**636.261.559.300**	**637.981.900.550**	**970.036.020.650**	**974.183.472.950**

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	NON URUSAN															
	Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP		BB	76,263,215,305	BB	76,733,928,000	BB	76,939,041,000	BB	116,609,160,000	BB	117,107,562,000	BB	463,652,906,305	Semua Perangkat Daerah
	URUSAN PENDIDIKAN															
	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	93,45	94,67	5,656,000,000	95,98	5,707,069,000	97,29	5,722,208,000	98,60	8,706,153,000	100	8,743,438,000	100	34,534,868,000	Dinas Pendidikan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	a. APK SD b. APM SD	a. 109,42 b. 98,70	a. 109,68 b. 98,96	20,409,652,500	a. 109,94 b. 99,22	20,549,243,000	a. 110,2 b. 99,48	20,604,457,000	a. 110,46 b. 99,74	31,327,170,000	a. 110,72 b. 100	31,461,726,000	a. 110,72 b. 100	124,352,248,500	Dinas Pendidikan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1 b. Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertikat pendidik	a. 84,78 b. 52,16	a. 87,82 b. 61,73	12,401,695,000	a. 90,86 b. 71,30	12,493,238,000	a. 93,90 b. 80,87	12,526,700,000	a. 96,94 b. 90,44	19,048,980,000	a. 100 b. 100	19,130,740,000	a. 100 b. 100	75,601,353,000	Dinas Pendidikan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. APK SMP b. APM SMP	a. 96,27 b. 78,96	a. 97,02 b. 83,17	13,534,545,500	a. 97,77 b. 87,38	13,632,886,000	a. 98,52 b. 91,59	13,669,425,000	a. 99,27 b. 95,80	20,785,922,000	a. 100 b. 100	20,875,151,000	a. 100 b. 100	82,497,929,500	Dinas Pendidikan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Nonformal dan Informal	AMH	99,36	99,49	1,770,380,000	99,62	1,798,135,000	99,75	1,802,721,000	99,88	2,748,531,000	100	2,760,199,000	100	10,879,966,000	Dinas Pendidikan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN															
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA b. Desa/Kel yang mencapai UCI c. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi d. Persentase Pelayanan Penderita DM	a. 61,01% b. 90% c. 19,70% d. 100%	a. 70% b. 90% c. 100% d. 100%	2,700,000,000	a. 70% b. 90% c. 100% d. 100%	2,733,333,000	a. 70% b. 90% c. 100% d. 100%	2,740,443,000	a. 70% b. 90% c. 100% d. 100%	4,173,870,000	a. 70% b. 90% c. 100% d. 100%	4,191,667,000	a. 70% b. 90% c. 100% d. 100%	16,539,313,000	Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Puskesmas c. UHC d. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kebidanan e. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	a. 75% b. 100% c. 70% d. 95,9% e. 100%	a. 80% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%	37,021,147,000	a. 85% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%	37,260,358,000	a. 90% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%	37,360,740,000	a. 95% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%	56,796,721,000	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%	57,040,796,000	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100% e. 10%	225,479,762,000	Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	a. AKI b. AKB c. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan d. Persentase baduta stunting e. Persentase balita stunting f. KKS g. Persentase kunjungan pasien miskin ke FASKES h. Jumlah kunjungan bayi ke yang memperoleh pelayanan kesehatan di faskes	a. 168 b. 4 c. 100% d. 21,80% e. 36,50% f. swastisaba g. 56,2 % h. 97,4%	a. 130 b. 6 c. 100% d. 20% e. 30% f. swastisaba g. 60 % h. 100%	4,500,000,000	a. 125 b. 6 c. 100% d. 17% e. 25% f. swastisaba g. 65 % h. 100%	4,544,133,000	a. 120 b. 6 c. 100% d. 14% e. 20% f. swastisaba g. 70 % h. 100%	4,556,132,000	a. 115 b. 6 c. 100% d. 11% e. 15% f. swastisaba g. 75 % h. 100%	6,933,717,000	a. 110 b. 6 c. 100% d. 8% e. 10% f. swastisaba g. 80 % h. 100%	6,963,382,000	a. 110 b. 6 c. 100% d. 8% e. 10% f. swastisaba g. 80 % h. 100%	27,497,364,000	Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Sumber Daya Kesehatan	a. Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk b. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	a. 1:6178 b. 75%	a. 1:5000 b. 80%	12,500,000,000	a. 1:4000 b. 85%	12,592,133,000	a. 1:3500 b. 90%	12,625,862,000	a. 1:3000 b. 95%	19,199,706,000	a. 1:2500 b. 100%	19,282,114,000	a. 1:2500 b. 100%	76,199,815,000	Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD (BLUD)	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	99,84%	100%	61,195,753,000	100%	61,580,060,000	100%	61,746,057,000	100%	93,862,403,000	100%	94,265,860,000	100%	372,650,133,000	RSUD atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	a. Survei Kepuasan b. Akreditasi Rumah Sakit	a. Kurang Baik b. Belum Terpenuhi	a. Baik b. B (madya)	1,450,000,000	a. Baik b. B (madya)	1,475,833,000	a. Sangat Baik b. madya utama	1,479,548,000	a. Sangat Baik b. paripurna	2,257,309,000	a. Sangat Baik b. paripurna	2,266,865,000	a. Sangat Baik b. paripurna	8,929,555,000	RSUD atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kesehatan
	Program Perawatan dan Pengembangan SDM	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat	90%	95%	100,000,000	95%	117,733,000	95%	117,781,000	95%	187,423,000	95%	188,079,000	95%	711,016,000	RSUD atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kebinamargaan	a. Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 b. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) c. Persentase Jalan kondisi Baik dan Sedang d. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik		a. 2,29% b. 50,24% c. 79% d.	76,900,000,000	a. 1,53% b. 50,57% c. 80,26% d.	77,369,533,000	a. 0,76% b. 50,9% c. 81,54% d.	77,574,111,000	a. 0% b. 51,24% c. 82,87% d.	117,141,045,000	a. 0% b. 51,57% c. 84,25% d.	117,638,151,000	a. 0% b. 51,57% c. 84,25% d.	466,622,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Keciptakaryaan	a. Persentase penduduk berakses air minum b. Persentase rumah tinggal bersanitasi c. Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi d. Persentase rumah tangga pengguna air bersih		a. 100% b. 90% c. 40% d.	26,167,316,700	a. 100% b. 93% c. 50% d.	26,341,453,900	a. 100% b. 95% c. 60% d.	26,412,306,000	a. 100% b. 98% c. 70% d.	40,155,101,000	a. 100% b. 100% c. 80% d.	40,327,617,000	a. 100% b. 100% c. 80% d.	159,403,794,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pemberdayaan, Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	a. persentase tersedianya layanan SIPJAKI b. Persentase penerapan majemen mutu konstruksi		a. 15% b. 10%	1,100,000,000	a. 25% b. 20%	1,132,733,500	a. 40% b. 30%	1,139,572,000	a. 50% b. 40%	2,520,545,000	a. 70% b. 50%	2,537,683,000	a. 70% b. 50%	8,430,533,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	a. Rasio Jaringan Irigasi b. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		a. 5,84 b. 70%	14,750,000,000	a. 5,97 b. 71%	14,855,633,000	a. 6,24 b. 73%	14,895,473,000	a. 6,36 b. 74%	22,649,516,000	a. 6,36 b. 74%	22,746,758,000	a. 6,36 b. 74%	89,897,380,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan dan Penataan Ruang	a. Persentase kawasan terbangun b. Ketaatan terhadap RTRW		a. 90% b. 50	3,433,000,000	a. 95% b. 65	3,470,731,500	a. 98% b. 78	3,479,832,000	a. 99,5% b. 100	5,297,741,000	a. 100% b. 100	5,320,371,000	a. 100% b. 100	21,001,675,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	Program Perumahan Rakyat dan PSU Perumahan	Rasio rumah layak huni	1:3,91	1:2,85	4,750,000,000	1:2,41	4,795,633,500	1:2,04	4,808,311,000	1:1,73	7,317,029,000	1:1,46	7,348,342,000	1:1,46	29,019,315,500	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman dan PSU Permukiman	a. Persentase pemukiman yang tertata b. Persentase lingkungan pemukiman kumuh c. Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan d. Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas	a. 20,034 Ha b. 0,08% c. 2% d. 651,622 Ha e. 50 Ha f. 20,034 Ha	a. 20,034 Ha b. 0,07% c. 40% d. 656,622 Ha e. 30 Ha f. 10,017 Ha	27,355,676,570	a. 20,034 Ha b. 0,06% c. 35% d. 656,622 Ha e. 35 Ha f. 10,027 Ha	27,527,943,000	a. 20,034 Ha b. 0,04% c. 30% d. 656,622 Ha e. 40 Ha f. 10,037 Ha	27,611,024,000	a. 20,034 Ha b. 0,02% c. 10% d. 661,622 Ha e. 45 Ha f. 10,047 Ha	41,977,152,000	a. 20,034 Ha b. 0,01% c. 10% d. 666,622 Ha e. 50 Ha f. 10,057 Ha	42,157,503,000	a. 20,034 Ha b. 0,01% c. 10% d. 666,622 Ha e. 50 Ha f. 10,057 Ha	166,629,298,570	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		wilayah kota atau perkotaan e. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk f. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU														
	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	a. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu b. Kegiatan pembinaan politik daerah	a. 50% b.	a. 60% b.	594,061,000	a. 70% b.	614,758,000	a. 80% b.	616,148,000	a. 90% b.	944,942,000	a. 100% b.	948,854,000	a. 100% b.	3,718,763,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentasi penanganan konflik dengan forum- forum di Kabupaten Tabalong terpenuhi	50%	60%	1,680,000,000	70%	1,707,213,000	80%	1,711,553,000	90%	2,609,956,000	100%	2,621,028,000	100%	10,329,750,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	Program Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	a. Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	a. 50% b.	a.60% b.	712,500,000	a.70% b.	733,908,000	a.80% b.	735,620,000	a.90% b.	1,126,538,000	a.100% b.	1,131,232,000	a.100% b.	4,439,798,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	a. Persentase Penegakan PERDA b. Rasio rumah ber-IMB	a. 75% b.	a. 75% b.	632,500,000	a. 80% b.	653,428,000	a. 85% b.	654,923,000	a. 90% b.	1,003,878,000	a. 100% b.	1,008,044,000	a. 100% b.	3,952,773,000	Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	80%	80%	2,277,885,000	83%	2,308,685,600	90%	2,314,649,000	95%	3,526,662,000	100%	3,541,676,000	100%	13,969,557,600	Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Rasio personel Satpol PP terhadap jumlah penduduk b. Rasio Petugas Linmas	a. 3,55 b. 70%	a. 3,56 b. 70%	1,000,000,000	a. 3,57 b. 77%	1,023,133,500	a. 3,58 b. 85%	1,025,626,000	a. 3,59 b. 90%	1,567,347,000	a. 4,0 b. 100%	1,573,936,000	a. 4,0 b. 100%	6,190,042,500	Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	0%	20%	2,806,248,650	40%	2,840,219,500	60%	2,847,618,000	80%	4,336,775,000	100%	4,355,273,000	100%	17,186,134,150	Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	Program Pencegahan Dini dan Pengendalian Bencana Kebakaran	a. Prosentase cakupan Pencegahan Dini b. Penanggulangan Korban Bencana	a. 80% b. 70%	a. 80% b. 70%	800,000,000	a. 82% b. 78%	821,933,500	a. 87% b. 83%	823,882,000	a. 96% b. 95%	1,260,697,000	a. 100% b. 100%	1,265,968,000	a. 100% b. 100%	4,972,480,500	Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Tanggap Darurat Bencana	Rata-rata Waktu Tanggap (Respon Time)	15 menit	15 menit	393,000,000	15 menit	412,491,000	15 menit	413,335,000	15 menit	636,665,000	15 menit	639,252,000	15 menit	2,494,743,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Prosentase cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%	187,850,000	100%	206,110,000	100%	206,397,000	100%	322,119,000	100%	323,354,000	100%	1,245,830,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH DR)	Prosentase cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	50%	60%	1,200,000,000	70%	-	80%	-	90%	-	100%	-	100%	1,200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Trantibumlinmas
	URUSAN SOSIAL															
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase 26 jenis PPKS yang dilayani	100%	100%	2,500,000,000	100%	2,532,133,000	100%	2,538,700,000	100%	3,867,220,000	100%	3,883,698,000	100%	15,321,751,000	Dinas Sosial atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase 5 jenis PPKS yang dilayani	100%	100%	1,817,734,000	100%	1,845,773,000	100%	1,850,487,000	100%	2,821,137,000	100%	2,833,117,000	100%	11,168,248,000	Dinas Sosial atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang Diberdayakan b. Jumlah sarana sosial	a. 100% b. 10 buah	a. 100% b. 11 buah	2,100,000,000	a. 100% b. 12 buah	2,129,733,500	a. 100% b. 13 buah	2,135,214,000	a. 100% b. 15 buah	3,253,921,000	a. 100% b. 17 buah	3,267,762,000	a. 100% b. 17 buah	12,886,630,500	Dinas Sosial atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Sosial
	URUSAN TENAGA KERJA															
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan b. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	a. 10 paket b. 3 paket	a. 10 paket b. 3 paket	1,050,000,000	a. 10 paket b. 3 paket	1,073,433,500	a. 10 paket b. 3 paket	1,076,062,000	a. 10 paket b. 3 paket	1,644,009,000	a. 10 paket b. 3 paket	1,650,928,000	a. 10 paket b. 3 paket	6,494,432,500	Dinas Tenaga Kerja atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	69,70%	70,36%	270,000,000	70,36%	288,753,000	70,36%	289,263,000	70,36%	448,076,000	70,36%	449,852,000	70,36%	1,745,944,000	Dinas Tenaga Kerja atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	a. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) c. Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh	a. 40 kasus b. 20 kasus c. 17.147 orang	a. 38 kasus b. 23 kasus c. 18.004 orang	221,700,000	a. 36 kasus b. 25 kasus c. 18.905 orang	240,163,000	a. 34 kasus b. 25 kasus c. 19.850 orang	240,542,000	a. 32 kasus b. 25 kasus c. 20.842 orang	374,020,000	a. 30 kasus b. 25 kasus c. 21.884 orang	375,477,000	a. 30 kasus b. 25 kasus c. 21.884 orang	1,451,902,000	Dinas Tenaga Kerja atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	Program Pemberdayaan Perempuan yang Berkeadilan Gender	a. IPG b. IDG	a. 85,15 b. 70,77	a. 85,34 b. 71,64	1,050,000,000	a. 85,53 b. 72,51	1,073,433,500	a. 85,72 b. 73,38	1,076,062,000	a. 85,91 b. 74,25	1,644,009,000	a. 86,1 b. 75,12	1,650,928,000	a. 86,1 b. 75,12	6,494,432,500	DP2PAP2KB atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya	650,000,000	Nindya	671,033,000	Nindya	672,575,000	Nindya	1,030,710,000	Utama	1,034,991,000	Utama	4,059,309,000	DP2PAP2KB atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PANGAN															
	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Distribusi dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	10	20	866,971,000	30	889,306,000	40	891,437,000	50	1,363,381,000	60	1,369,092,000	60	5,380,187,000	Dinas Ketahanan Pangan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pangan
	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Penangangan daerah rawan/rentan pangan	0	2	1,016,437,000	2	1,039,668,000	2	1,042,206,000	1	1,592,549,000	1	1,599,246,000	1	6,290,106,000	Dinas Ketahanan Pangan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pangan
	Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Penganekaragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	86	87,9	851,365,000	88,4	873,606,000	88,9	875,695,000	89,4	1,339,453,000	89,9	1,345,062,000	89,9	5,285,181,000	Dinas Ketahanan Pangan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PERTANAHAN															
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat (tanah aset pemda)	100%	100%	17,600,000,000	100%	17,722,733,000	100%	17,770,315,000	100%	27,019,274,000	100%	27,135,306,000	100%	107,247,628,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pertanahan
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP															
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	a. Persentase pengurangan sampah b. Tempat Pembuangan Sampah per satuan Penduduk c. Penanganan Sampah	a. 5,44% b. c.	a. 22% b. c.	23,860,135,000	a. 24% b. c.	25,368,717,000	a. 26% b. c.	25,436,943,000	a. 27% b. c.	38,672,549,000	a. 30% b. c.	38,838,690,000	a. 30% b. c.	152,177,034,000	Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Indeks kualitas tutupan lahan	62	62,5%	1,086,905,000	63%	1,108,718,500	63,5%	1,110,613,000	64%	1,536,937,000	64,5%	1,542,076,000	64,5%	6,385,249,500	Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	50%	60%	1,341,000,000	70%	1,363,233,500	80%	1,365,318,000	90%	1,828,360,000	100%	1,833,960,000	100%	7,731,871,500	Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas air	63,68	65,98%	575,000,000	68,38	594,533,500	70,78	595,396,000	73,18	822,398,000	75,58	825,031,000	75,58	3,412,358,500	Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penanaman Bambu Pada Kanan-Kiri Sungai dan Daerah Tangkapan Air (DTA), sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	Upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam	20%	100%	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Lingkungan Hidup
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan (%)	94,61%	99,75%	938,777,500	99,85%	961,543,500	99,90%	963,870,000	99,95%	1,473,478,000	100%	1,479,663,000	100%	5,817,332,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil (%)	10.450 lembar	10.450 lembar	150,000,000	10.450 lembar	168,033,500	10.450 lembar	168,217,000	10.450 lembar	264,086,000	52.520 lembar	265,071,000	52.520 lembar	1,015,407,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan dan Pengelolaan SIAK	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi dan kabupaten	ada	ada	714,032,000	ada	735,449,500	ada	737,165,000	ada	1,128,887,000	ada	1,133,591,000	ada	4,449,124,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	a. Nilai survey kepuasan masyarakat b. Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data (%)		a. Puas b. 100 %	255,389,100	a. Puas b. 100 %	274,054,700	a. Puas b. 100 %	274,525,000	a. Puas b. 100 %	425,673,000	a. Puas b. 100 %	427,353,000	a. Puas b. 100 %	1,656,994,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa		40%	8,159,633,600	60%	8,224,854,700	80%	8,246,400,000	90%	12,467,524,000	100%	12,520,361,000	100%	49,618,773,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		40%	995,000,000	60%	1,018,103,000	80%	1,020,582,000	90%	1,559,681,000	100%	1,566,237,000	100%	6,159,603,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa		40%	2,853,531,500	60%	2,862,021,000	80%	2,870,857,000	90%	4,501,976,000	100%	4,523,069,000	100%	17,611,454,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	Program Keluarga Berencana	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	12,25%	13,00%	220,000,000	14,50%	238,453,500	15,25%	238,827,000	17,50%	371,413,000	20,00%	372,860,000	20,00%	1,441,553,500	DP2PAP2KB atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	a. Cakupan Anggota Bina Keluarga yag ber-KB (BKB,BKR, dan BKL) b. Cakupan anggota UPPKS yang Ber-KB	a. 72,50% b. 83,04%	a. 72,75% b. 84,20%	400,000,000	a. 73,80% b. 84,24%	419,533,500	a. 75,83% b. 85,27%	420,396,000	a. 77,90% b. 85,40%	647,398,000	a. 80,00% b. 85,00%	650,031,000	a. 80,00% b. 85,00%	2,537,358,500	DP2PAP2KB atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49%	1,48%	960,000,000	1,47%	982,893,000	1,46%	985,277,000	1,45%	1,506,017,000	1,44%	1,512,342,000	1,44%	5,946,529,000	DP2PAP2KB atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	URUSAN PERHUBUNGAN															
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	- Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Terpenuhi - Meningkatnya kelaikan Operasional Kendaraan Umum / Pribadi Di Jalan Raya)	- 60% - 4000 KBWU (kendaraan umum wajib uji)	- 60% -4200	1,950,000,000	-70% -4500	1,970,833,000	-75% -4600	1,983,906,000	-80% -4800	3,023,933,000	-90% -4900	3,036,786,000	-90% -4900	11,965,458,000	Dinas Perhubungan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	- Jumlah orang/barang melalui bandara/derm aga/terminal per tahun - Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Zero Accident penerbangan)	-149417 - 2118 orang	- 155393 -4500	7,950,000,000	-158382 -4900	8,014,833,000	-161370 -5000	8,036,203,000	5200	12,223,425,000	-164358 -5400	12,275,835,000	5200	48,500,296,000	Dinas Perhubungan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perhubungan
	Program Pembinaan, Peningkatan, dan Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	Kejadian laka lantas dan surat tilang	20 laka dan 792 tilang (Baseline Data)	0 Laka dan 0 tilang	900,000,000	0 Laka dan 0 tilang	922,533,000	0 Laka dan 0 tilang	924,754,000	0 Laka dan 0 tilang	1,414,022,000	0 Laka dan 0 tilang	1,419,952,000	0 Laka dan 0 tilang	5,581,261,000	Dinas Perhubungan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	Program Pengelolaan Informasi Saluran dan Komunikasi Publik	a. Jumlah informasi publik yang tersedia bagi awak media b. Jumlah Permintaan Informasi yang terlayani c. jumlah pengaduan yg didistribusikan ke Perangkat Daerah yang menangani		a. 4430 b. 780 c. 30	3,165,767,000	a. 4430 b. 780 c. 30	3,201,894,000	a. 4430 b. 780 c. 30	3,210,270,000	a. 4430 b. 780 c. 30	4,888,006,000	a. 4430 b. 780 c. 30	4,908,874,000	a. 4430 b. 780 c. 30	19,374,811,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Penyelenggaraan E-Government	a. Nilai SPBE b. Persentase peningkatan Perangkat Daerah terhadap pengelolaan data dan aplikasi dan terintegrasi c. Cakupan layanan telekomunikasi dasar (berbasis RT)		a. 2.2 b. 8 % c. 18,51 %	6,417,017,000	a. 2.5 b. 8 % c. 22,22%	6,472,652,000	a. 3.1 b. 8% c. 14,81 %	6,489,859,000	a. 3.5 b. 8 % c. 18,51%	9,872,981,000	a. 4 b. 8% c. 13,33 %	9,915,284,000	a. 4 b. 8% c. 13,33%	39,167,793,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	Pertumbuhan UMK	24.28	28.04	434,500,000	32.25	437,206,500	37.09	442,111,000	42.65	674,620,000	49.05	677,322,000	49.05	2,665,759,500	Dinas Koperasi UKM atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif	60.45	63.48	338,089,800	66.65	340,095,500	69.98	342,843,000	73.48	523,733,000	77.16	525,786,000	77.16	2,070,547,300	Dinas Koperasi UKM atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	URUSAN PENANAMAN MODAL															
	Program Perencanaan Pembangunan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	1,6 Triliun PDMN dan 250.000 Dollar PMA	1,6 Triliun PDMN dan 250.000 Dollar PMA	1,050,000,000	1,6 Triliun PDMN dan 250.000 Dollar PMA	1,073,433,000	1,6 Triliun PDMN dan 250.000 Dollar PMA	1,076,062,000	1,6 Triliun PDMN dan 250.000 Dollar PMA	1,644,009,000	1,6 Triliun PDMN dan 250.000 Dollar PMA	1,650,928,000	1,6 Triliun PDMN dan 250.000 Dollar PMA	6,494,432,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	25% perusahaan yang taat menyampaikan LKPM	25% perusahaan yang taat menyampaikan LKPM	475,000,000	30% perusahaan yang taat menyampaikan LKPM	494,983,000	35% perusahaan yang taat menyampaikan LKPM	496,050,000	40% perusahaan yang taat menyampaikan LKPM	762,392,000	45% perusahaan yang taat menyampaikan LKPM	765,519,000	45% perusahaan yang taat menyampaikan LKPM	2,993,944,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan	1648 izin	1700 izin	802,566,000	1900 izin	824,514,000	2100 izin	826,471,000	2300 izin	1,264,632,000	2500 izin	1,269,919,000	2500 izin	4,988,102,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal
	Program Pengaduan Kebijakan dan Laporan Layanan	Persentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti	76	79	507,384,000	80	527,561,600	81	528,716,000	82	812,044,000	83	815,385,000	83	3,191,090,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	86%	87%	911,924,500	88%	934,529,500	91%	936,783,000	96%	1,432,305,000	100%	1,438,314,000	100%	5,653,856,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Pembinaan Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	24 Orang	30 orang	2,025,000,000	35 Orang	2,054,283,500	40 Orang	2,059,560,000	45 Orang	3,138,927,000	50 Orang	3,152,274,000	50 Orang	12,430,044,500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN STATISTIK															
	Program Pengelolaan Statistik Sektoral	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah		7	285,445,000	7	304,291,000	7	304,843,000	7	471,757,000	7	473,634,000	7	1,839,970,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Statistik
	URUSAN PERSANDIAN															
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Informasi yang di amankan		50	85,000,000	50	102,643,000	50	102,650,000	50	164,425,000	50	164,981,000	50	619,699,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN KEBUDAYAAN															
	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah	a. Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya b. Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	a. 5 b. 10	a. 5 b. 10	1,498,000,000	a. 5 b. 10	1,524,121,000	a. 5 b. 10	1,527,966,000	a. 5 b. 10	2,330,905,000	a. 5 b. 10	2,340,777,000	a. 5 b. 10	9,221,769,000	Dinas Pendidikan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kebudayaan
	URUSAN PERPUSTAKAAN															
	Program Pengembangan Perpustakaan	a. Persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun b. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	a. 29,49% b. 71.537 buah	a. 35% b. 86.800 buah	930,000,000	a. 40% b. 89.000 buah	952,713,000	a. 45% b. 91.200 buah	955,016,000	a. 50% b. 93.400 buah	1,460,020,000	a. 55% b. 94.600 buah	1,466,147,000	a. 55% b. 94.600 buah	5,763,896,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN KEARSIPAN															
	Program Penyelenggaraan Kearsipan	a. Jumlah SKPD yang memiliki kriteria standar pengelola b. Penerapan pengelolaan arsip secara baku c. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	a. b. 12,9 % c. 25 orang	a. 4 SKPD b. 25 % c. 50 orang	447,000,000	a. 8 SKPD b. 30 % c. 60 orang	466,815,000	a. 10 SKPD b. 35 % c. 50 orang	467,806,000	a. 12 SKPD b. 40 % c. 50 orang	719,461,000	a. 14 SKPD b. 45 % c. 60 orang	722,404,000	a. 14 SKPD b. 45 % c. 60 orang	2,823,486,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kearsipan
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	13.522,3	14.572,8	1,741,335,000	15374,40	1,768,916,000	16220	1,773,422,000	17112	2,703,998,000	18053	2,715,474,000	18053	10,703,145,000	Dinas Perikanan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1580	1.78	400,049,300	1851.2	419,582,500	1943,76	420,446,000	2040,95	647,473,000	2163,41	650,107,000	2163,41	2,537,657,800	Dinas Perikanan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perairan	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0	-	150,000,000	-	168,033,000	-	168,217,000	-	264,086,000	-	265,071,000	-	1,015,407,000	Dinas Perikanan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	45,99	47.1	450,000,000	48,9	469,833,000	51,2	470,832,000	52,3	724,060,000	53,24	727,023,000	53,24	2,841,748,000	Dinas Perikanan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kelautan dan Perikanan
	URUSAN PARIWISATA															
	Program Pengembangan Kepariwisataan	a. Jumlah Kunjungan Wisata b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	a. 794.144 Orang b.	a. 850.000 0rang b.	1,675,000,000	a. 909.500 Orang b.	1,702,183,000	a. 953.000 Orang b.	1,706,509,000	a. 989.000 Orang b.	2,602,290,000	a. 1.020.000 Orang b.	2,613,329,000	a. 1.020.000 Orang b.	10,299,311,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PERTANIAN															
	Program Pengembangan Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas PAJALE	28,5	29,5	975,000,000	30	997,983,000	30,5	1,000,408,000	31	1,529,016,000	31,5	1,535,440,000	31,5	6,037,847,000	Dinas Pertanian Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian
	Program Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura	0,33	0,45	1,250,000,000	0,47	1,274,633,000	0,5	1,277,805,000	0,52	1,950,659,000	0,55	1,958,896,000	0,55	7,711,993,000	Dinas Pertanian Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian
	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh alat dan mesin pertanian	11	11.02	5,716,700,000	11.04	5,768,133,500	11.06	5,783,437,000	11.08	8,799,221,000	11.15	8,836,907,000	11.15	34,904,398,500	Dinas Pertanian Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian
	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas peternakan	5,95	6,95	4,068,089,400	7,05	4,109,884,000	7,3	4,120,824,000	7,5	6,293,951,000	7,8	6,321,046,000	7,8	24,913,794,400	Dinas Pertanian Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang dapat dilayani	18	22	825,000,000	25	847,083,500	28	849,100,000	31	1,299,029,000	35	1,304,464,000	35	5,124,676,500	Dinas Pertanian Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Perkebunan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	45	48	4,625,000,000	48,5	4,669,883,000	49	4,682,222,000	49,5	7,125,373,000	50	7,155,862,000	50	28,258,340,000	Dinas Pertanian Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian
	URUSAN PERDAGANGAN															
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Ekspor - Impor)	a. 8,78 b.	a. 9,21 b.	266,696,000	a. 9,21 b.	285,429,000	a. 9,21 b.	285,930,000	a. 9,21 b.	443,010,000	a. 9,21 b.	444,764,000	a. 9,21 b.	1,725,829,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Indeks Kepuasan Konsumen	0	100	400,000,000	100	419,533,000	100	420,396,000	100	647,398,000	100	650,031,000	100	2,537,358,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perdagangan
	Program Pengelolaan Pasar	a. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD b.Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik	a. 0 b.	a. 85% b.	6,233,374,500	a. 86% b.	6,287,908,000	a. 87% b.	6,304,615,000	a. 88% b.	9,591,411,000	a. 88% b.	9,632,504,000	a. 88% b.	38,049,812,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perdagangan
	URUSAN PERINDUSTRIAN															
	Program Pengembangan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi sektor industri kecil dan menengah terhadap PDRB	10,53%	12,75	880,000,000	12,77%	902,413,000	12,77%	904,580,000	12,79%	1,383,357,000	12,80%	1,389,155,000	12,80%	5,459,505,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PERENCANAAN															
	Program Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi dokumen perencanaan dan pengendalian serta kompilasi data yang dibutuhkan		100%	700,000,000	100%	721,333,000	100%	723,011,000	100%	1,107,372,000	100%	1,111,984,000	100%	4,363,700,000	Bappeda atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perencanaan
	Program Peningkatan Kualitas Rencana Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengendalian	a. Tingkat konsistensi program pada RKPD terhadap RPJMD b. Tingkat konsistensi program pada APBD terhadap RKPD		a. 100% b. 100%	125,000,000	a. 100% b. 100%	183,668,000	a. 100% b. 100%	183,852,000	a. 100% b. 100%	287,851,000	a. 100% b. 100%	288,938,000	a. 100% b. 100%	1,069,309,000	Bappeda atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perencanaan
	Program Peningkatan Kualitas Rencana Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	a. Tingkat konsistensi program pada RKPD terhadap RPJMD b. Tingkat konsistensi program pada APBD terhadap RKPD		a. 100% b. 100%	150,000,000	a. 100% b. 100%	168,033,000	a. 100% b. 100%	170,652,000	a. 100% b. 100%	267,843,000	a. 100% b. 100%	268,788,000	a. 100% b. 100%	1,025,316,000	Bappeda atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perencanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kualitas Rencana Pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	a. Tingkat konsistensi program pada RKPD terhadap RPJMD b. Tingkat konsistensi program pada APBD terhadap RKPD		a. 100% b. 100%	330,500,000	a. 100% b. 100%	349,616,000	a. 100% b. 100%	350,347,550	a. 100% b. 100%	540,837,000	a. 100% b. 100%	543,012,000	a. 100% b. 100%	2,114,312,550	Bappeda atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perencanaan
	Program Peningkatan Kualitas Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	a. Tingkat konsistensi program pada RKPD terhadap RPJMD b. Tingkat konsistensi program pada APBD terhadap RKPD		a. 100% b. 100%	460,000,000	a. 100% b. 100%	479,893,000	a. 100% b. 100%	480,919,000	a. 100% b. 100%	739,393,000	a. 100% b. 100%	742,479,950	a. 100% b. 100%	2,902,684,950	Bappeda atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perencanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN KEUANGAN															
	Program Pengelolaan Penganggaran Keuangan Daerah	Jangka waktu penyusunan dan penetapan dokumen anggaran		≤ 31 Desember	1,604,000,000	≤ 31 Desember	1,630,757,000	≤ 31 Desember	1,634,890,000	≤ 31 Desember	2,493,429,000	≤ 31 Desember	2,504,000,000	≤ 31 Desember	9,867,076,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Keuangan
	Program Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Cakupan berkas SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah		100%	765,000,000	100%	786,723,000	100%	788,577,000	100%	1,207,034,000	100%	1,212,073,000	100%	4,759,407,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Keuangan
	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan rancangan laporan keuangan daerah tepat waktu		≤ 31 Maret	940,000,000	≤ 31 Maret	962,773,000	≤ 31 Maret	965,103,000	≤ 31 Maret	1,475,352,000	≤ 31 Maret	1,481,546,000	≤ 31 Maret	5,824,774,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Keuangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik		100%	1,841,200,000	100%	1,869,380,000	100%	1,874,131,000	100%	2,857,116,000	100%	2,869,251,000	100%	11,311,078,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Keuangan
	URUSAN KEPEGAWAIAN															
	Program Administrasi dan Manajemen Kepegawaian	Persentase Capaian Administrasi dan Manajemen Kepegawaian	93%	93.50%	1,007,000,000	94%	1,030,175,000	95%	1,032,687,000	96%	1,578,080,000	97%	1,584,715,000	97%	6,232,657,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	92,79%	93%	5,183,505,000	94,1%	5,231,739,000	96,9%	5,245,595,000	98,3%	7,981,700,000	99%	8,015,871,000	99%	31,658,410,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	Program Penelitian dan Pengembangan	a. Persentase implementasi rencana kelitbangan b. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan c. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah d. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	800,000,000	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	821,933,000	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	823,882,000	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	1,260,697,000	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	1,265,968,000	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	4,972,480,000	Bappeda atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN															
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		100%	14,648,586,600	100%	14,721,330,000	100%	14,766,539,000	100%	22,451,914,650	100%	22,547,359,000	100%	89,135,729,250	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan		100%	9,300,100,000	100%	9,345,106,000	100%	9,370,473,000	100%	14,193,953,000	100%	14,254,238,000	100%	56,463,870,000	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase pembentukan produk hukum		100%	678,389,250	100%	699,592,900	100%	701,212,000	100%	1,074,238,000	100%	1,078,706,000	100%	4,232,138,150	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Koordinasi dan Pembinaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase tingkat sinkronisasi dan penyelarasan sektor ekonomi dan SDA		100%	1,253,750,000	100%	1,278,405,000	100%	1,281,587,000	100%	1,956,409,000	100%	1,964,671,000	100%	7,734,822,000	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa		100%	1,598,000,000	100%	1,624,721,000	100%	1,628,838,000	100%	2,484,230,000	100%	2,494,761,000	100%	9,830,550,000	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu		100%	150,758,550	100%	168,796,400	100%	168,982,000	100%	265,249,000	100%	266,239,000	100%	1,020,024,950	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Persentase kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi umum dan kenyamanan kantor		100%	14,261,402,500	100%	14,359,104,000	100%	14,402,617,000	100%	21,900,374,000	100%	21,994,395,000	100%	86,917,892,500	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah	Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100%	2,936,100,000	100%	2,970,849,000	100%	2,978,601,000	100%	4,535,870,000	100%	4,555,223,000	100%	17,976,643,000	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Kelembagaan Kinerja dan Pelayanan Publik	Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat A		10%	900,000,000	20%	922,533,000	30%	924,754,000	40%	1,414,022,000	50%	1,419,952,000	50%	5,581,261,000	Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Pelayanan Anggaran dan Pengawasan	Persentase tingkat pelayanan anggaran		100%	5,427,341,175	100%	5,477,038,000	100%	5,491,556,000	100%	8,355,562,000	100%	8,391,340,000	100%	33,142,837,175	Sekretariat DPRD atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Penyelenggaraan Persidangan	Persentase perda yang terselesaikan tepat waktu		100%	9,325,000,000	100%	9,398,083,000	100%	9,423,188,000	100%	14,331,642,000	100%	14,393,117,000	100%	56,871,030,000	Sekretariat DPRD atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Persentase kontribusi PBB dan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah	17	21	1,038,891,000	22	1,064,099,500	23	1,067,531,000	24	1,790,702,000	25	1,799,572,000	25	6,760,795,500	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Transfer	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah	17	21	819,063,200	22	841,110,000	23	843,112,000	24	1,289,926,000	25	1,295,322,000	25	5,088,533,200	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	Program Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	17	21	357,097,200	22	376,373,000	23	377,119,000	24	581,617,000	25	583,968,000	25	2,276,174,200	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Pemerintahan
	URUSAN PENGAWASAN															
	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong -Nilai SAKIP -Persentase temuan yang ditindaklanjuti		- Level 3 - B -	2,254,965,000	- Level 3 - B -	2,285,622,000	- Level 3 - BB -	2,291,529,000	- Level 3 - BB -	3,491,520,000	- Level 3 - A -	3,506,383,000	- Level 3 - A -	13,830,019,000	Inspektorat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pengawasan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2020		2021		2022		2023		2024				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pencegahan Korupsi di Daerah	Persentase SKPD sebagai Zona Integritas Kabupaten Tabalong		-	2,704,885,000	-	2,738,247,000	-	2,745,371,000	-	4,181,360,000	-	4,199,189,000	-	16,569,052,000	Inspektorat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pengawasan
	Program Pengembangan Sumber Daya APIP	Kapabilitas APIP		Level 3	290,750,000	Level 3	309,627,000	Level 4	310,194,000	Level 4	479,890,000	Level 4	481,803,000	Level 4	1,872,264,000	Inspektorat Daerah atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pengawasan
TOTAL					**632,426,258,900**		**636,261,559,300**		**637,981,900,550**		**970,036,020,650**		**974,183,472,950**		**3,850,889,212,350**	

Tabel 7.3
Program Penanggungjawab Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2019-2024

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
1	Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini		
		-Persentase Peserta Didik usia 5-6th yang menerima pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		-Persentase peserta didik PAUD yang menerima 6 buah buku gambar dan 1 set alat mewarnai dalam kondisi baru per semester	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		-Persentase pendidik PAUD paling rendah berijazah D-IV/S1 bidang kependidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikasi profesi guru pendidikan anak usia dini	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Kepala Sekolah PAUD paling rendah berizajah D-IV/S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		-Persentase Kepala Sekolah PAUD yang memiliki sertifikat pendidik dan STTPP Calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau STTPP PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentasi PAUD yang memiliki jumlah guru sesuai dengan rombel	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase jumlah tenaga pendidik yang sesuai dengan rombel, pemenuhan beban mengajar dan jam mata pelajaran	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		b. Pendidikan Dasar		
		-Persentase Peserta Didik usia 7-15th yang menerima pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		-Persentase peserta didik Sekolah Dasar yang menerima 1 paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum dan 1 set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		-Persentase Guru Kelas SD sesuai dengan jumlah kelas yang tersedia	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		-Persentase Guru Mata Pelajaran SD sesuai dengan Kebutuhan Kurikulum	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		-Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima 1 paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum dan 1 set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		-Persentase pendidik Sekolah Dasar paling rendah berijazah D-IV/S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase pendidik Sekolah Dasar yang memiliki sertifikasi pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Kepala Sekolah SD paling rendah berizajah D-IV/S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Kepala Sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik dan STTPP Calon Kepala Sekolah	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		-Persentase tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah paling rendah SMA/sederajat	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase pendidik Sekolah Menengah Pertama paling rendah berijazah D-IV/S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase pendidik Sekolah SMP yang memiliki sertifikasi pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Kepala Sekolah SMP paling rendah berizajah D-IV/S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Kepala Sekolah SMP yang memiliki sertifikat pendidik dan STTPP Calon Kepala Sekolah	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah paling rendah SMA/sederajat	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Guru Kelas SMP sesuai dengan jumlah kelas yang tersedia	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Guru Mata Pelajaran SMP sesuai dengan Kebutuhan Kurikulum	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		-Persentase jumlah tenaga pendidik yang sesuai dengan rombel, pemenuhan beban mengajar dan jam mata pelajaran	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		c. Pendidikan Kesetaraan		
		-Persentase Peserta Didik usia 7-18th yang menerima pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Nonformal dan Informal	Dinas Pendidikan
		-Persentase peserta didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima 1 paket modul pelajaran sesuai dengan kurikulum dan 1 set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Nonformal dan Informal	Dinas Pendidikan
		-Persentase Tutor Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Kebutuhan Kurikulum	Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Nonformal dan Informal	Dinas Pendidikan
		-Persentase pendidik Tutor Pendidikan Kesetaraan paling rendah berijazah D-IV/S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		-Persentase Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan paling rendah berizajah D-IV/S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		-Persentase tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah paling rendah SMA/sederajat	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
		-Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
		-Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		-Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan Balita		
		-Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar		
		-Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif		
		-Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut		
		-Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi		
		-Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus		
		-Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		-Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB		
		-Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinveksi HIV		
		-Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan dan RSUD
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Keciptakaryaan	Dinas PUPR
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	Program Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kebinamargaan	Dinas PUPR

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kebinamargaan	Dinas PUPR
		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kebinamargaan	Dinas PUPR
		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kebinamargaan	Dinas PUPR
		Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kebinamargaan	Dinas PUPR
		Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Keciptakaryaan	Dinas PUPR
		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Keciptakaryaan	Dinas PUPR
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Keciptakaryaan	Dinas PUPR

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Dinas LH
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Dinas LH
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	Program Perumahan Rakyat dan PSU Perumahan	Dinas Perkim
4	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Program Perumahan Rakyat dan PSU Perumahan	Dinas Perkim
		Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	Program Perumahan Rakyat dan PSU Perumahan	Dinas Perkim
		Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota		
5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Satpol PP

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan Dini dan Pengendalian Bencana Kebakaran	Satpol PP
		Persentase penyelesaian dokumen (Kajian Risiko Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penyelesaian dokumen (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penyelesaian dokumen (Rencana Kontinjensi) sampai dinyatakan sah/legal	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase (%) jumlah warga negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Program Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Program Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Program Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	Program Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH DR)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Urusan / Bidang Urusan	Uraian indikator	Program Penanggungjawab	SKPD Penanggung Jawab
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH DR)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti		
		-Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		-Persentase Anak Terlantar	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		-Persentase Lanjut Usia Terlantar	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		-Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		
		-Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran kinerja membutuhkan indikator kinerja yang terukur dan jelas. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

Pada bab ini disajikan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang diindikasikan oleh indikator kinerja dengan target capaian selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan secara umum melalui indikator makro daerah, pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pada Tabel 8.1 disajikan indikator makro daerah yang merupakan indikator pada tingkat dampak (*impact*). Pada Tabel 8.2 disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Sementara pada Tabel 8.3 menyajikan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 atau disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Daerah memuat komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tabalong pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan hasil (*outcome*). Kinerja dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian

hasil (outcome) beberapa program. Sementara kinerja hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Tabel 8.1
Indikator Makro Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,82	3,87	3,91	3,95	3,99	4,03	4,03
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,95	5,85	5,70	5,65	5,60	5,55	5,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,1	3,09	3,08	3,07	3,06	3,05	3,05
4	Indeks Pembangunan Manusia		71,40	72,17	72,88	73,60	74,33	75,07	75,07
5	Indeks Gini		0.328	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,01	70,21	70,34	70,47	70,60	70,73	70,73
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,99	9,22	9,45	9,69	9,93	9,93
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	13,10	13,43	13,77	14,11	14,46	14,46
9	Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	11.106	11.497	11.767	12.042	12.324	12.613	12.613
10	Inflasi	Persen	2,09	1,77	1,58	1,42	1,27	1,14	1,14

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks kerukunan umat beragama								
2	Angka Kriminalitas		13,0	12,0	11,5	11	10,5	10,0	10,0
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,40	72,17	72,88	73,60	74,33	75,07	75,07
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,01	70,21	70,34	70,47	70,60	70,73	70,73
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,99	9,22	9,45	9,69	9,93	9,93
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	13,10	13,43	13,77	14,11	14,46	14,46
7	Persentase penduduk miskin	Persen	5,95	5,85	5,70	5,65	5,60	5,55	5,55
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,1	3,09	3,08	3,07	3,06	3,05	3,05
9	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	70,84	71,64	72,51	73,38	74,25	75,12	75,12
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	85,20	85,34	85,53	85,72	85,91	86,10	86,10
12	Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,82	3,87	3,91	3,95	3,99	4,03	4,03
13	Indeks Gini		0.328	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
14	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	11	11,02	11,04	11,06	11,08	11,15	11,15
15	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	8,61	10,42	11,47	12,62	13,89	15,29	15,29

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
16	Indeks Ketahanan Pangan		81,11	82,66	83,21	83,84	84,03	84,72	84,72
17	Persentase UKM Aktif	Persen	66	70	73	76	79	82	82
18	Persentase koperasi aktif	Persen	67	70	74	78	82	86	86
19	Kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	9,50	11,12	12,03	13,02	14,08	15,24	15,24
20	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah	Persen	80	82	83	85	87	90	90
21	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	78,02	80	81.26	82.54	83,87	85,25	85,25
22	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,22	66,12	66,73	67,34	67,96	68,58	68,58
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		71,10	71,16	71,19	71,22	71,25	71,28	71,28
24	Indeks desa membangun		0,5999	0,6875	0,6910	0,6950	0,7050	0,7150	0,7150
25	Indeks Reformasi Birokrasi		50	67	78	79	80	82	82
26	Nilai SAKIP (predikat)		B	B	B	BB	BB	A	A
27	Opini BPK (predikat)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		80	85	85	85	85	85	85
29	Tingkat Kemandirian Daerah		10,70	13,61	13,66	13,79	13,80	13,90	13,90

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	3,82	3,87	3,91	3,95	3,99	4,03	4,03
2	Inflasi	Persen	2,09	1,77	1,58	1,42	1,27	1,14	1,14
3	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	67.62	70.951	73.268	75.661	78.132	80.683	80.683
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	56.503	58.086	59.169	60.271	61.394	62.538	62.538
5	Indeks Gini	Indeks	0.328	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
6	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	71,40	72,17	72,88	73,60	74,33	75,07	75,07
7	Persentase penduduk miskin	Persen	5,95	5,85	5,70	5,65	5,60	5,55	5,55
8	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	87,88	97,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	70,84	71,64	72,51	73,38	74,25	75,12	75,12
10	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Point	85,20	85,34	85,53	85,72	85,91	86,10	86,10
11	Status Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
12	Angka Melek Huruf	Persen	99,36	99,49	99,62	99,75	99,88	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
13	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,62	8,99	9,22	9,45	9,69	9,93	9,93
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	13,10	13,43	13,77	14,11	14,46	14,46
15	APK SD	Persen	109,42	109,68	109,94	110,20	110,46	110,72	110,72
16	APK SMP/MTs	Persen	96,27	97,02	97,77	98,52	99,27	100,00	100,00
17	APK SMA/SMK/MA	Persen	85,21	86,39	87,18	87,98	88,79	89,60	89,60
18	Angka pendidikan yang ditamatkan:	Persen							
	- SD	Persen	24,98	25,35	25,75	25,85	26,00	26,10	26,10
	- SMP/MTs	Persen	16,35	16,45	16,65	16,85	17,00	17,15	17,15
	- SMA/SMK/MA	Persen	18,30	18,75	18,85	19,00	19,10	19,25	19,25
19	APM SD/SDLB/MI	Persen	98,70	98,96	99,22	99,50	99,70	100,00	100,00
20	APM SMP	Persen	78,98	83,17	87,38	91,60	95,80	100,00	100,00
21	Angka Kematian Bayi/Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	6/1000	6/1000	6/1000	5/1000	5/1000	4/1000	4/1000
22	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,01	70,21	70,34	70,47	70,60	70,73	70,73
23	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,15	96,75	96,95	97,00	97,10	97,25	97,25

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
25	Jumlah Grup Kesenian	Buah	40	41	41	41	42	42	42
26	Jumlah Gedung	Buah	1	1	1	1	1	1	1
27	Jumlah klub olahraga	Buah	76	77	78	79	79	80	80
28	Jumlah Gedung Olahraga	Buah	27	29	30	32	34	36	36
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	**Fokus Layanan Urusan Wajib**								
1.1	**Pendidikan**								
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	93,45	94,67	95,98	97,29	98,60	100	100
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	109,42	109,68	109,94	110,2	110,46	110,72	110,72
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	96,27	97,02	97,77	98,52	99,27	100	100
1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	98,70	98,96	99,22	99,48	99,74	100	100
1.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	78,96	83,17	87,38	91,59	95,80	100	100
1.1.6	Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	99,36	99,49	99,62	99,75	99,88	100	100
1.1.7	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1	Persen	84,78	87,82	90,86	93,90	96,94	100	100
1.1.8	Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertikat pendidik	Persen	52,16	61,73	71,30	80,87	90,44	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.2	**Kesehatan**								
1.2.1	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	61,01	70	70	70	70	70	70
1.2.2	Desa/Kel yang mencapai UCI	Persen	90	90	90	90	90	90	90
1.2.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	19,70	100	100	100	100	100	100
1.2.4	Persentase Pelayanan Penderita DM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75	80	85	90	95	100	100
1.2.6	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.7	UHC	Persen	70	100	100	100	100	100	100
1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kebidanan	Persen	95,9	100	100	100	100	100	100
1.2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.10	Angka Kematian Ibu (AKI)		168	130	125	120	115	110	110
1.2.11	Angka Kematian Bayi (AKB)		4	6	6	6	6	6	6
1.2.12	Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.13	Persentase baduta stunting	Persen	21,80	20	17	14	11	8	8
1.2.14	Persentase balita stunting	Persen	36,50	30	25	20	15	10	10

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.2.15	Kabupaten Kota Sehat (KKS)		Swastisaba	Swastisaba	Swastisaba	Swastisaba	Swastisaba	Swastisaba	Swastisaba
1.2.16	Persentase kunjungan pasien miskin ke FASKES	Persen	56,2	60	65	70	75	80	80
1.2.17	Jumlah kunjungan bayi ke yang memperoleh pelayanan kesehatan di faskes	Persen	97,4	100	100	100	100	100	100
1.2.18	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk		1 : 6178	1 : 5000	1 : 4000	1 : 3500	1 : 3000	1 : 2500	1 : 2500
1.2.19	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	75	80	85	90	95	100	100
1.2.20	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persen	99,84	100	100	100	100	100	100
1.2.21	Survei Kepuasan		Kurang Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1.2.22	Akreditasi Rumah Sakit		Belum Terpenuhi	B (madya)	B (madya)	Madya Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna
1.2.23	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat	Persen	90	95	95	95	95	95	95
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1.3.1	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen		2,29	1,53	0,76	0	0	0
1.3.2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen		50,24	50,57	50,9	51,24	51,57	51,57
1.3.3	Persentase Jalan kondisi Baik dan Sedang	Persen		79	80,26	81,54	82,87	84,25	84,25

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen							
1.3.5	Persentase penduduk berakses air minum	Persen		100	100	100	100	100	100
1.3.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen		90	93	95	98	100	100
1.3.7	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	Persen		40	50	60	70	80	80
1.3.8	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen							
1.3.9	Persentase tersedianya layanan SIPJAKI	Persen		15	25	40	50	70	70
1.3.10	Persentase penerapan majemen mutu konstruksi	Persen		10	20	30	40	50	50
1.3.11	Rasio Jaringan Irigasi	Persen		5,84	5,97	6,24	6,36	6,36	6,36
1.3.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69	71	72	73	74	75	75
1.3.13	Persentase kawasan terbangun	Persen		90	95	98	99,5	100	100
1.3.14	Ketaatan terhadap RTRW	Persen		50	65	78	100	100	100
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1.4.1	Rasio rumah layak huni		1 : 3,91	1 : 2,85	1 : 2,41	1 :2,04	1 :1,73	1 :1,46	1 :1,46
1.4.2	Persentase pemukiman yang tertata	Hektar	20,034	20,034	20,034	20,034	20,034	20,034	20,034

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,08	0,07	0.06	0,04	0,02	0,01	0,01
1.4.4	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	Persen	2	40	35	30	10	10	10
1.4.5	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota atau perkotaan	Hektar	651,622	656,622	656,622	656,622	661,622	666,622	666,622
1.4.6	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Hektar	50	30	35	40	45	50	50
1.4.7	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Hektar	20,034	10,017	10,027	10,037	10,047	10,057	10,057
1.5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**								
1.5.1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.5.2	Kegiatan pembinaan politik daerah								
1.5.3	Persentasi penanganan konflik dengan forum- forum di Kabupaten Tabalong terpenuhi	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.5.4	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.5.5	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP								
1.5.6	Persentase Penegakan PERDA	Persen	75	75	80	85	90	100	100
1.5.7	Rasio rumah ber-IMB								

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.5.8	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persen	80	80	83	90	95	100	100
1.5.9	Rasio personel Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Per 10.000	3,55	3,56	3,57	3,58	3,59	4,0	4,0
1.5.10	Rasio Petugas Linmas	Persen	70	70	77	85	90	100	100
1.5.11	Persentase cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persen	0	20	40	60	80	100	100
1.5.12	Prosentase cakupan Pencegahan Dini	Persen	80	80	82	87	96	100	100
1.5.13	Penanggulangan Korban Bencana	Persen	70	70	78	83	95	100	100
1.5.14	Rata-rata Waktu Tanggap (Respon Time)	Menit	15	15	15	15	15	15	15
1.5.15	Prosentase cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5.16	Prosentase cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.6	**Sosial**								
1.6.1	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2	Persentase 26 jenis PPKS yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3	Persentase 5 jenis PPKS yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6.4	Persentase PSKS yang Diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6.5	Jumlah sarana sosial	Buah	10	11	12	13	15	17	17

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.7	**Tenaga Kerja**								
1.7.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Paket	10	10	10	10	10	10	10
1.7.2	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	Paket	3	3	3	3	3	3	3
1.7.3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,70	70,36	70,36	70,36	70,36	70,36	70,36
1.7.4	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Kasus	40	38	36	34	32	30	30
1.7.5	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	20	23	25	25	25	25	25
1.7.6	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh	Orang	17.147	18.004	18.905	19.850	20.842	21.884	21.884
1.8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1.8.1	IPG	Point	85,15	85,34	85,53	85,72	85,91	86,1	86,1
1.8.2	IDG	Point	70,77	71,64	72,51	73,38	74,25	75,12	75,12
1.8.3	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.9	**Pangan**								
1.9.1	Penguatan Cadangan Pangan		10	20	30	40	50	60	60
1.9.2	Penangangan daerah rawan/rentan pangan		0	2	2	2	1	1	1
1.9.3	Skor Pola Pangan Harapan		86	87,9	88,4	88,9	89,4	89,9	89,9
1. 10	**Pertanahan**								
1.10.1	Persentase luas lahan bersertifikat (tanah aset pemda)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.11	**Lingkungan Hidup**								
1.11.1	Persentase pengurangan sampah	Persen	5,44	22	24	26	27	30	30
1.11.2	Tempat Pembuangan Sampah per satuan Penduduk								
1.11.3	Penanganan Sampah								
1.11.4	Indeks kualitas tutupan lahan		62	62,5	63	63,5	64	64,5	64,5
1.11.5	Persentase pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.11.6	Indeks kualitas air		63,68	65,98	68,38	70,78	73,18	75,58	75,58
1.11.7	Upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam	Persen	20	100	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1.12.1	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	Persen	94,61	99,75	99,85	99,90	99,95	100	100
1.12.2	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Lembar	10. 450	10. 450	10. 450	10. 450	10. 450	52. 520	52. 520
1.12.3	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi dan kabupaten		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.12.4	Nilai survey kepuasan masyarakat			Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas
1.12.5	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	Persen		100	100	100	100	100	100
1.13	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**								
1.13.1	Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa	Persen		40	60	80	90	100	100
1.13.2	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen		40	60	80	90	100	100
1.13.3	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	Persen		40	60	80	90	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.14	**Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana**								
1.14.1	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Persen	12,25	13,00	14,50	15,25	17,50	20,00	20,00
1.14.2	Cakupan Anggota Bina Keluarga yag ber-KB (BKB,BKR, dan BKL)	Persen	72,50	72,75	73,80	75,83	77,90	80,00	80,00
1.14.3	Cakupan anggota UPPKS yang Ber-KB	Persen	83,04	84,20	84,24	85,27	85,40	85,00	85,00
1.14.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,49	1,48	1,.47	1,46	1,45	1,44	1,44
1.15	**Perhubungan**								
1.15.1	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Terpenuhi	Persen	60	60	70	75	80	90	90
1.15.2	Meningkatnya kelaikan Operasional Kendaraan Umum / Pribadi Di Jalan Raya	KBWU (Kendaraan Umum Wajib Uji)	4000	4200	4500	4600	4800	4900	4900
1.15.3	Jumlah orang/barang melalui bandara/dermaga/terminal per tahun		149417	155393	158382	161370		164358	164358
1.15.4	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Zero Accident penerbangan)	Orang	2118	4500	4900	5000	5200	5400	5400
1.15.5	Kejadian laka lantas dan surat tilang	Laka Tilang	20 792	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.16	**Komunikasi dan Informatika**								
1.16.1	Jumlah informasi publik yang tersedia bagi awak media			4430	4430	4430	4430	4430	4430
1.16.2	Jumlah Permintaan Informasi yang terlayani			780	780	780	780	780	780
1.16.3	Jumlah pengaduan yg distribusikan ke Perangkat Daerah yang menangani			30	30	30	30	30	30
1.16.4	Nilai SPBE			2,2	2,5	3,1	3,5	4	4
1.16.5	Persentase peningkatan Perangkat Daerah terhadap pengelolaan data dan aplikasi dan terintegrasi	Persen		8	8	8	8	8	8
1.16.6	Cakupan layanan telekomunikasi dasar (berbasis RT)	Persen		18,51	22,22	14,81	18,51	13,33	13,33
1.17	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**								
1.17.1	Pertumbuhan UMK		24.28	28.04	32.25	37.09	42.65	49.05	49.05
1.17.2	Persentase koperasi aktif	Persen	60.45	63.48	66.65	69.98	73.48	77.16	77.16
1.18	**Penanaman Modal**								
1.18.1	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	PMDN (Triliun) PMA (Dollar)	3,7 -	1,6 250.000	1,6 250.000	1,6 250.000	1,6 250.000	1,6 250.000	1,6 250.000

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.18.2	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penaanman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Persen	25	25	30	35	40	45	45
1.18.3	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan	Izin	1648	1700	1900	2100	2300	2500	2500
1.18.4	Persentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	76	79	80	81	82	83	83
1.19	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1.19.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	86	87	88	91	96	100	100
1.19.2	Jumlah atlet berprestasi	Orang	24	30	35	40	45	50	50
1. 20	**Statistik**								
1.20.1	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	Laporan		7	7	7	7	7	7
1.21	**Persandian**								
1.21.1	Jumlah Informasi yang di amankan	Informasi		50	50	50	50	50	50
1.22	**Kebudayaan**								
1.22.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	Festival	5	5	5	5	5	5	5
1.22.2	Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Situs	10	10	10	10	10	10	10

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.23	**Perpustakaan**								
1.23.1	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Persen	29,49	35	40	45	50	55	55
1.24.2	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	71.537	86.800	89.000	91.200	93.400	94.600	94.600
1.24	**Kearsipan**								
1.24.1	Jumlah SKPD yang memiliki kriteria standar pengelola	SKPD		4	8	10	12	14	14
1.24.2	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	12,9	25	30	35	40	45	45
1.24.3	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	25	50	60	50	50	60	60
2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**								
2.1	**Kelautan dan Perikanan**								
2.1.1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya		13.522,3	14.572,8	15374,40	16220	17112	18053	18053
2.1.2	Jumlah produksi perikanan tangkap		1580	1. 780	1851. 2	1943,76	2040,95	2163,41	2163,41
2.1.3	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Angka Konsumsi Ikan (AKI)		45,99	47. 1	48,9	51,2	52,3	53,24	53,24

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.2	**Pariwisata**								
2.2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	794.144	850. 000	909. 500	953. 000	989. 000	1.020.000	1.020.000
2.2.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	Persen							
2.3	**Pertanian**								
2.3.1	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas PAJALE	Persen	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5
2.3.2	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura	Persen	0,33	0,45	0,47	0,5	0,52	0,55	0,55
2.3.3	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh alat dan mesin pertanian	Persen	11	11.02	11.04	11.06	11.08	11.15	11.15
2.3.4	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas peternakan	Persen	5,95	6,95	7,05	7,3	7,5	7,8	7,8
2.3.5	Persentase cakupan kelompok tani yang dapat dilayani	Persen	11	11.02	11.04	11.06	11.08	11.15	11.15
2.3.6	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Persen	45	48	48,5	49	49,5	50	50
2.4	**Perdagangan**								
2.4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	8,78	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.4.2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Ekspor - Impor)								
2.4.3	Indeks Kepuasan Konsumen		0	100	100	100	100	100	100
2.4.4	Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD	Persen	0	85	86	87	88	88	88
2.4.5	Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik	Unit							
2.5	**Perindustrian**								
2.5.1	Kontribusi sektor industri kecil dan menengah terhadap PDRB	Persen	10,53	12,75	12,77	12,77	12,79	12,80	12,80
3	**Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan**								
3.1	**Perencanaan**								
3.1.1	Persentase realisasi dokumen perencanaan dan pengendalian serta kompilasi data yang dibutuhkan	Persen		100	100	100	100	100	100
3.1.2	Tingkat konsistensi program pada RKPD terhadap RPJMD	Persen		100	100	100	100	100	100
3.1.3	Tingkat konsistensi program pada APBD terhadap RKPD	Persen		100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.2	**Keuangan**								
3.2.1	Jangka waktu penyusunan dan penetapan dokumen anggaran			≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember
3.2.2	Cakupan berkas SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah	Persen		100	100	100	100	100	100
3.2.3	Cakupan rancangan laporan keuangan daerah tepat waktu			≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret
3.2.4	Prosentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik	Persen		100	100	100	100	100	100
3.3	**Kepegawaian**								
3.3.1	Persentase Capaian Administrasi dan Manajemen Kepegawaian	Persen	93	93.5	94	95	96	97	97
3.4	**Pendidikan dan Pelatihan**								
3.4.1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	92,79	93	94,1	96,9	98,3	99	99
3.5	**Penelitian dan Pengembangan**								
3.5.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen		100	100	100	100	100	100
3.5.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.5.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen		100	100	100	100	100	100
3.5.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6	**Administrasi Pemerintahan**								
3.6.1	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.2	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.3	Persentase pembentukan produk hukum	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.4	Persentase tingkat sinkronisasi dan penyelarasan sektor ekonomi dan SDA	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.5	Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.6	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.7	Persentase kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi umum dan kenyamanan kantor	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.8	Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.9	Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat A	Persen		10	20	30	40	50	50
3.6.10	Persentase tingkat pelayanan anggaran	Persen		100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.6.11	Persentase perda yang terselesaikan tepat waktu	Persen		100	100	100	100	100	100
3.6.12	Persentase kontribusi PBB dan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah	Persen	17	21	22	23	24	25	25
3.6.13	Persentase konstibusi Pajak dan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah	Persen	17	21	22	23	24	25	25
3.6.14	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	17	21	22	23	24	25	25
3.7	**Pengawasan**								
3.7.1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.7.2	Nilai SAKIP			B	B	BB	BB	A	A
3.7.3	Persentase temuan yang ditindaklanjuti			-	-	-	-	-	-
3.7.4	Persentase SKPD sebagai Zona Integritas Kabupaten Tabalong	Persen		-	-	-	-	-	-
3.7.5	Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	ribu rupiah	11.106	11.497	11.767	12.042	12.324	12.613	12.613
2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	ribu rupiah	46,99	49,07	50,51	51,99	53,51	55,08	55,08

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3	Ketaatan Terhadap RTRW	persen	84	90	94	98	103	107	107
4	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	9	12	14	17	20	24	24
5	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jumlah	1	2	2	2	3	4	4
6	Jenis. Kelas. dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	19	20	20	20	20	21	21
7	Angka kriminalitas	Jumlah	0,00138	0,00134	0,00131	0,00129	0,00126	0,00124	0,00124
8	Jumlah demo	Kali	0	0	0	0	0	0	0
9	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	5	5	5	5	5	5	5
10	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	9.646	11.25	12.115	13.35	14.15	15.45	15.45
11	Rasio Ketergantungan	persen	47,43	47,00	46,50	46,00	45,50	45,00	45,00

BAB IX

PENUTUP

BAB IX
PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabalong sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati merupakan pedoman bagi pemerintahan Kabupaten Tabalong dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan Renstra-PD. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja-PD setiap tahun.
b. Penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong setiap tahun selama 5 (lima) tahun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024.
c. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabalong dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra-PD Tahun 2019-2024 oleh masing-masing Perangkat Daerah.

e. Bupati Kabupaten Tabalong wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
f. DPRD Kabupaten Tabalong melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

9.2. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi dari bupati terpilih, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah pada saat RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2025, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tabalong Tahun Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tabalong akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tabalong 2005-2025 sesuai periode/tahapan berkenaan. Penyusunan RKPD Tahun 2025 tersebut, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Tabalong 2005-2025, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan RPJMD Periode 2019-2024 diharapkan dapat didukung oleh seluruh masyarakat dan dunia usaha. Dengan sinergi

yang baik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha, diharapkan visi "**Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamais, Sejahtera Dan Mandiri**" dapat terwujud.

BUPATI TABALONG

H.ANANG SYAKHFIANI